

**BAB V**  
**PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA, belanja dan transfer selama satu periode yakni 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp589.100.221.270,00 atau sebesar 100,22% dari target yang ditetapkan pada perubahan APBD, sedangkan belanja daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp473.737.242.968,00 atau sebesar 94,45% dan transfer terealisasi sebesar Rp109.648.997.439,00 atau sebesar 99,73% dari alokasi pada Perubahan APBD.

**5.1.1. Pendapatan - LRA**

Realisasi pendapatan pada tahun 2019 mencapai 100,22% atau sebesar Rp589.100.221.270,00 dari total target yang ditetapkan sebesar Rp587.814.516.837,00. Jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2018 sebesar Rp591.049.611.191,00, maka pendapatan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1.949.389.921,00 atau sebesar 0,33%. Jenis pendapatan daerah ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang diklasifikasikan menjadi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

**5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA**

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp18.049.669.248,00 atau sebesar 109,25% dari total target sebesar Rp16.522.188.475,00 yang ditetapkan pada perubahan APBD. Pendapatan Asli Daerah ini mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni sebesar Rp208.733.472,00. Uraian lebih lanjut atas Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut.

**a. Pendapatan Pajak Daerah - LRA**

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp5.542.813.864,00 atau sebesar 106,43% dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD sebesar Rp5.207.975.599,00. Jika dibandingkan dengan realisasi

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018, realisasi Pendapatan Pajak Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp919.597.982,00 atau naik sebesar 19,89%.

Jika dilihat dari masing-masing objek pajak, terdapat pelampauan realisasi Pajak Daerah dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD. Adapun rincian Pendapatan Pajak Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA**

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Pajak Hotel	22.500.000,00	15.452.000,00	68,68
Pajak Restoran	2.850.000.000,00	3.143.542.886,00	110,30
Pajak Hiburan	4.700.000,00	1.840.000,00	39,15
Pajak Reklame	50.000.000,00	41.200.095,00	82,40
Pajak Penerangan Jalan	847.956.158,00	962.633.822,00	113,52
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	557.011.720,00	79,57
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	677.819.441,00	677.283.341,00	99,92
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	55.000.000,00	143.850.000,00	261,55
<b>JUMLAH</b>	<b>5.207.975.599,00</b>	<b>5.542.813.864,00</b>	<b>106,43</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Dari seluruh objek Pendapatan Pajak Daerah, dapat dilihat terdapat tiga objek pajak yang realisasinya melampaui target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD yaitu Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak hotel tahun 2019 terealisasi sebesar Rp15.452.000,00 atau sebesar 68,68% dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Realisasi penerimaan pajak hotel ini berasal dari Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebesar Rp13.472.000,00 dan Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 sebesar Rp1.980.000,00.

Pencapaian pajak restoran tahun 2019 terealisasi sebesar Rp3.143.542.886,00 atau sebesar 110,30% dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp2.850.000.000,00. Realisasi pendapatan pajak restoran ini berasal dari pelunasan piutang pajak restoran PT. Prasmanindo Boga Utama tahun 2018 sebesar Rp724.113.801,00 dan pendapatan pajak restoran dari seluruh rumah makan yang ada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019 sebesar Rp2.419.429.085,00. Dari seluruh pendapatan pajak restoran untuk tahun 2019, PT. Prasmanindo Boga Utama merupakan kontributor penyeter pajak restoran dengan jumlah yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp2.480.140.729,00 atau 78,89%. PT. Prasmanindo Boga Utama merupakan perusahaan penyedia makanan pada perusahaan tambang PT. J-Resources yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pendapatan pajak hiburan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1.840.000,00 atau sebesar 39,15%. Realisasi pajak hiburan ini terdiri dari pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya sebesar Rp340.000,00 dan pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan sebesar Rp1.500.000,00.

Pendapatan pajak reklame tahun 2019 sebesar Rp41.200.095,00 atau sebesar 82,40% dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Pendapatan pajak reklame ini merupakan pendapatan dari pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.

Pendapatan pajak penerangan jalan tahun 2019 sebesar Rp962.633.822,00 merupakan penerimaan pajak penerangan jalan sumber lain dari PT. PLN Persero

Cab. Kotarajobagu. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan ini melampaui target yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp847.956.158,00 atau mencapai 113,52%. Penerimaan pajak penerangan jalan ini terdiri dari pelunasan piutang pajak penerangan jalan Bulan Desember tahun 2018 sebesar Rp77.956.158,00 dan penerimaan pajak penerangan jalan bulan Januari s.d November tahun 2019 sebesar Rp884.677.664,00.

Realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan tahun 2019 sebesar Rp557.011.720,00 atau sebesar 79,57% dari target pada Perubahan APBD. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan pajak batu kapur sebesar Rp180.545.564,00, pasir dan kerikil sebesar Rp252.148.401,00, pasir kuarsa sebesar Rp36.924.239,00, dan tanah diatome sebesar Rp87.393.516,00.

Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2019 sebesar Rp677.283.341,00 atau sebesar 99,92% dari target pada Perubahan APBD. Pendapatan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2019 sebesar Rp677.283.341,00 terdiri dari pajak bumi dan bangunan perkotaan sebesar Rp56.225.795,00 dan pajak bumi dan bangunan perdesaan sebesar Rp621.057.546,00. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan terdiri dari pelunasan piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan tahun 2018 sebesar Rp41.307,00 dan penerimaan untuk tahun 2019 sebesar Rp56.184.488,00. Sedangkan realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan terdiri dari pelunasan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan tahun 2018 sebesar Rp433.930,00 dan penerimaan untuk masa pajak tahun 2019 sebesar Rp620.623.616,00.

Pendapatan BPHTB Tahun 2019 melampaui target pada Perubahan APBD yakni sebesar Rp143.850.000,00 atau sebesar 261,55%. Realisasi penerimaan ini terdiri dari BPHTB Pemindahan Hak sebesar Rp97.000.000,00 dan BPHTB Pemberian Hak Baru sebesar Rp46.850.000,00.

b. Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp736.844.310,00 dengan capaian sebesar 98,99% dari target anggaran pada Perubahan APBD sebesar Rp744.332.500,00. Realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah tahun 2019 lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun sebelumnya yang mencapai Rp717.393.050,00. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah - LRA**

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan	326.650.000,00	427.316.440,00	130,82
Retribusi Pelayanan Pasar	97.000.000,00	79.774.000,00	82,24
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.982.500,00	1.735.000,00	87,52
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	165.000.000,00	132.240.000,00	80,15
Retribusi Tempat Pelelangan	70.000.000,00	61.757.500,00	88,23
Retribusi Terminal	700.000,00	1.720.000,00	245,71
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	13.000.000,00	1.779.000,00	13,68
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.000.000,00	5.750.000,00	28,75
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	50.000.000,00	24.772.370,00	49,54
<b>JUMLAH</b>	<b>744.332.500,00</b>	<b>736.844.310,00</b>	<b>98,99</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan Tahun 2019 sebesar Rp427.316.440,00 terdiri dari realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebesar Rp87.171.500,00, pendapatan retribusi puskesmas keliling sebesar Rp2.415.000,00, pendapatan retribusi puskesmas pembantu sebesar Rp34.365.000,00, dan pendapatan retribusi rumah sakit umum daerah sebesar Rp303.364.940,00. Adapun rincian penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di masing-masing unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.3 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA**

UPTD	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Puskesmas Keliling	Puskesmas Pembantu	Rumah Sakit Umum Daerah
Puskesmas Molibagu	31.452.000,00	-	6.605.000,00	-
Puskesmas Duminanga	5.784.000,00	-	6.075.000,00	-
Puskesmas Milangodaa	8.555.000,00	1.075.000,00	2.420.000,00	-
Puskesmas Pinolosian	22.375.000,00	1.090.000,00	3.030.000,00	-
Puskesmas Adow	4.280.000,00	-	3.800.000,00	-
Puskesmas Dumagin	4.210.000,00	200.000,00	2.400.000,00	-
Puskesmas Onggunoi	5.840.000,00	50.000,00	750.000,00	-
Puskesmas Momalia	4.675.500,00	-	9.285.000,00	-
Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	303.364.940,00
<b>Jumlah</b>	<b>87.171.500,00</b>	<b>2.415.000,00</b>	<b>34.365.000,00</b>	<b>303.364.940,00</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Pendapatan retribusi pelayanan pasar tahun 2019 adalah sebesar Rp79.774.000,00 atau sebesar 82,24% dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Pendapatan retribusi pelayanan pasar ini terdiri dari pendapatan retribusi pelataran sebesar Rp34.048.000,00, pendapatan retribusi los sebesar Rp37.116.000,00 dan pendapatan retribusi kios sebesar Rp8.610.000,00. Retribusi pelayanan pasar ini dikelola oleh SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor Tahun 2019 sebesar Rp1.735.000,00 atau sebesar 87,52%. Realisasi pendapatan ini terdiri dari realisasi pendapatan retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up sebesar Rp1.535.000,00 dan retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Truck sebesar Rp200.000,00. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ini dikelola oleh SKPD Dinas Perhubungan. Selain mengelola pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan juga mengelola retribusi terminal. Selama Tahun 2019 realisasi pendapatan retribusi terminal yang diperoleh berdasarkan Tabel 5.2 sebesar Rp1.720.000,00 atau sebesar 245,71% dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Pendapatan retribusi terminal ini hanya diperoleh dari satu obyek saja yakni retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum.

Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun 2019 sebesar Rp132.240.000,00 atau sebesar 80,15% dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Retribusi pemakaian kekayaan daerah ini merupakan retribusi kendaraan bermotor yang dikelola oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Pendapatan retribusi tempat pelelangan tahun 2019 sebesar Rp61.757.500,00 atau sebesar 88,23%. Pendapatan retribusi tempat pelelangan ini berasal dari retribusi tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh SKPD Dinas Perikanan selama tahun 2019. Selain mengelola retribusi tempat pelelangan, tahun 2019 Dinas

Perikanan juga mengelola retribusi penjualan produksi usaha daerah berupa benih ikan dengan realisasi pendapatan sebesar Rp5.750.000,00 atau 28,75% dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD.

Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga tahun 2019 sebesar Rp1.779.000,00 atau hanya sebesar 13,68% dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Pendapatan retribusi ini bersumber dari pelayanan tempat pariwisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan tahun 2019 berdasarkan tabel 5.2 sebesar Rp24.772.370,00 atau sebesar 49,54% dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Obyek pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan ini bersumber dari pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan ini dikelola oleh SKPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa hanya terdapat dua penerimaan retribusi daerah yang memenuhi target bahkan melampaui target pada Perubahan APBD yakni retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi terminal yang masing-masing mencapai 130,82% dan 245,71%. Terhadap kondisi tersebut Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi terhadap SKPD pengelola retribusi daerah.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2019 sebesar Rp626.846.731,00 atau sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Realisasi ini merupakan penerimaan piutang bagian laba (Deviden) Tahun 2018 atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada PT. Bank SulutGo.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2019 sebesar Rp11.143.164.343,00 atau sebesar 112,07% dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar Rp9.943.033.645,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, terjadi penurunan sebesar Rp830.556.520.

**Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah - LRA**

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	276.250.000,00	-
Penerimaan Jasa Giro	1.040.000.000,00	1.060.814.733,00	102,00
Pendapatan Bunga	2.250.000.000,00	2.960.416.656,00	131,57
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	250.000.000,00	718.964.774,00	287,59
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	176.165.438,00	-
Pendapatan Denda Pajak	51.713.668,00	35.731.248,00	69,09
Pendapatan Denda Retribusi	-	14.747.333,00	-
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
Pendapatan dari Pengembalian	418.251.977,00	571.949.377,00	136,75
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	-	18.592.000,00	-
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	-	33.662.000,00	-
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	3.334.9507,00	-
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	3.946.368.000,00	3.644.688.377,00	92,36
Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN	1.969.700.000,00	1.610.847.500,00	81,78
<b>JUMLAH</b>	<b>9.943.033.645,00</b>	<b>11.143.164.343,00</b>	<b>112,07</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Terdapat realisasi penerimaan dari penjualan aset daerah yang sudah tidak terpakai dan masa manfaatnya sudah habis selama Tahun 2019 sebesar Rp276.250.000,00. Realisasi penerimaan ini merupakan hasil penjualan peralatan/mesin berupa kendaraan dan inventaris. Penerimaan pendapatan ini tidak ditargetkan dalam Perubahan APBD.

Realisasi penerimaan jasa giro tahun 2019 sebesar Rp1.060.814.733,00 atau mencapai 102,00% dari target pada Perubahan APBD. Pendapatan jasa giro ini terdiri dari jasa giro kas daerah sebesar Rp1.028.623.432,00 dan jasa giro bendahara sebesar Rp32.191.301,00. Adapun realisasi Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah pada Rekening Pengeluaran sebesar Rp292.261.784,00, Rekening Penerimaan sebesar Rp263.742,00 dan Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp736.097.906,00. Selain menerima pendapatan jasa giro, Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menerima pendapatan bunga yang bersumber dari penempatan deposito pada PT Bank Sulutgo Cabang Molibagu. Adapun realisasi pendapatan bunga deposito tahun 2019 adalah sebesar Rp2.960.416.656,00, lebih besar dari yang ditargetkan pada Perubahan APBD.

Realisasi penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp718.964.774,00 atau mencapai 287,59% dari target yang ditetapkan pada APBD Perubahan. Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) ini merupakan penerimaan TGR Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan dan penyedia jasa atau pihak ketiga.

Terdapat realisasi atas Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2019 sebesar Rp176.165.438,00. Pendapatan ini diperoleh dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang kesehatan sebesar Rp43.464.881,00, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang pekerjaan umum sebesar Rp114.107.514,00, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang perencanaan pembangunan sebesar Rp15.629.280,00, dan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar Rp2.963.713,00. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan ini tidak ditargetkan pada APBD maupun APBD Perubahan karena diharapkan seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan dan selesai tepat waktu.

Realisasi pendapatan denda pajak sebesar Rp35.731.248,00 merupakan pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak restoran sebesar Rp18.866.736,00, pendapatan denda pajak reklame sebesar Rp20.790,00, dan pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp16.843.722,00. Selain itu, terdapat realisasi pendapatan denda retribusi sebesar Rp14.747.333,00 yang merupakan pendapatan denda retribusi pelayanan kesehatan.

Terdapat realisasi pendapatan hasil eksekusi atas jaminan tahun 2019 sebesar Rp17.000.000,00. Pendapatan ini bersumber dari hasil eksekusi atas jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MIS Batuhamba tahun 2017 pada SKPD Dinas Pendidikan.

Realisasi pendapatan dari pengembalian tahun 2019 sebesar Rp571.949.377,00. Pendapatan ini terdiri dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp18.785.000,00, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp103.775.500,00, pendapatan dari pengembalian uang muka sebesar Rp116.357.400,00, pengembalian kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp207.566.700,00, dan pengembalian kelebihan pembayaran lainnya sebesar Rp125.464.777,00.

Terdapat realisasi pendapatan penyelenggaraan diklat tahun 2019 sebesar Rp18.592.000,00. Pendapatan ini merupakan penerimaan biaya pelatihan dasar CPNS Golongan III tahun 2019 dimana pesertanya bukan merupakan calon pegawai negeri sipil Kab. Bolaang Mongondow Selatan yakni atas nama Devied Pittersen Ruus dan Jenifer Stephanie Porong.

Realisasi hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah tahun 2019 sebesar Rp33.662.000,00. Realisasi ini diperoleh dari sewa ruangan oleh PT Bank Sulutgo untuk digunakan sebagai Kantor Kas dan ATM, serta sewa bangunan kantin.

Realisasi lain-lain PAD yang Sah Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp3.334.907,00. Pendapatan lain-lain PAD yang sah lainnya ini bersumber dari kesalahan atau kelebihan penyeteroran pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan jenis tertentu.

Pendapatan dana kapitasi JKN Tahun 2019 sebesar Rp3.644.688.377,00 atau sebesar 92,36% dari target pada Perubahan APBD yang dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA**

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Momalia	650.484.000,00	634.338.742,00	97,52
Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Milangodaa	291.564.000,00	289.375.597,00	99,25
Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Molibagu	1.171.584.000,00	1.001.226.810,00	85,46
Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Duminanga	377.028.000,00	359.022.191,00	95,22
Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Pinolosian	687.456.000,00	642.351.800,00	93,44
Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Adow	217.944.000,00	206.335.763,00	94,67
Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Dumagin	550.308.000,00	512.037.474,00	93,05
<b>JUMLAH</b>	<b>3.946.368.000,00</b>	<b>3.644.688.377,00</b>	<b>92,36</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN Tahun 2019 sebesar Rp1.610.847.500,00 atau sebesar 81,78% dari target pada Perubahan APBD yang dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Non Kapitasi - LRA**

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Momalia	-	7.320.000,00	-
Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Milangodaa	14.000.000,00	5.600.000,00	40,00
Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Molibagu	30.700.000,00	700.000,00	2,28
Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Duminanga	15.400.000,00	10.500.000,00	68,18
Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Pinolosian	137.100.000,00	77.420.000,00	56,47
Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Adow	-	6.300.000,00	-
Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Dumagin	22.500.000,00	-	-
Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN RSUD	1.750.000.000,00	1.503.007.500,00	85,89
<b>JUMLAH</b>	<b>1.969.700.000,00</b>	<b>1.610.847.500,00</b>	<b>81,78</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

### 5.1.1.2. Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang diterima baik dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan dana penyesuaian maupun dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk bagi hasil pajak. Pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp491.575.229.022,00 atau mencapai 99,48% dari total target anggaran sebesar Rp494.152.045.362,00 pada perubahan APBD. Uraian lebih lanjut atas pendapatan transfer adalah sebagai berikut.

#### a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp477.544.028.397,00 atau sebesar 99,83% dari target anggaran sebesar Rp478.368.191.022,00 yang ditetapkan pada perubahan APBD. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan realisasi penerimaan sebesar Rp4.830.740.023,00. Secara umum penurunan penerimaan pendapatan transfer pemerintah pusat ini terjadi pada pendapatan transfer Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun pendapatan transfer pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA**

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Bagi Hasil Pajak	8.926.791.463,00	8.148.848.231,00	91,29
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	18.886.816.259,00	18.949.338.819,00	100,33
Dana Alokasi Umum (DAU)	361.695.058.000,00	364.595.503.000,00	100,80
Dana Alokasi Khusus (DAK)	88.859.525.300,00	85.850.338.347,00	96,61
<b>JUMLAH</b>	<b>478.368.191.022,00</b>	<b>477.544.028.397,00</b>	<b>99,83</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana tabel diatas terdiri dari dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang penerimaannya dapat diuraikan sebagai berikut.

#### 1) Bagi Hasil Pajak - LRA

Dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp8.148.848.231,00 atau sebesar 91,29% dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Penerimaan bagi hasil pajak ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp463.203.344,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak - LRA**

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan	2.626.547.000,00	2.845.696.880,00	108,34
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan	5.371.000,00	3.811.018,00	70,96
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan	40.899.850,00	51.425.200,00	125,73
Bagi Hasil Dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	2.499.688.613,00	1.639.998.093,00	65,61
Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	3.753.163.000,00	3.578.929.555,00	95,36
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	1.122.000,00	28.987.485,00	2.583,55
<b>JUMLAH</b>	<b>8.926.791.463,00</b>	<b>8.148.848.231,00</b>	<b>91,29</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019



Realisasi Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan tahun 2019 sebesar Rp2.845.696.880,00 atau sebesar 108,34% dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Jika dirinci lebih jauh, dari target penerimaan tahun 2019 sebesar Rp2.626.547.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp1.405.162.700,00 atau hanya sebesar 53,49%, sedangkan penerimaan lainnya sebesar Rp1.440.534.180,00 merupakan realisasi penerimaan atas kurang bayar sama dengan tahun 2018 yang dialokasikan pada tahun 2019.

Realisasi Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan tahun 2019 hanya sebesar Rp3.811.018,00 atau 70,96% dari target penerimaan pada Perubahan APBD. Jika dirinci, dari target penerimaan sebesar Rp5.371.000,00 tahun 2019, yang terealisasi hanya sebesar Rp2.148.400,00, sedangkan sisanya sebesar Rp1.662.618,00 merupakan penerimaan atas kurang bayar sampai dengan tahun 2018 yang dialokasikan pada tahun 2019.

Realisasi Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perhutanan tahun 2019 sebesar Rp51.425.200,00 atau sebesar 125,73% dari target pada Perubahan APBD. Realisasi ini merupakan realisasi tahun 2019 yang memang melampaui target yang ditetapkan pada perubahan APBD.

Realisasi Bagi Hasil Dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 tahun 2019 sebesar Rp1.639.998.093,00 atau sebesar 65,61% dari target pada Perubahan APBD. Dari target penerimaan tahun 2019 sebesar Rp2.499.688.613,00, hanya terealisasi sebesar Rp1.521.705.600,00, sedangkan realisasi sebesar Rp118.292.493,00 merupakan penerimaan atas kurang bayar sampai dengan tahun 2018 yang dialokasikan pada tahun 2019.

Capaian realisasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 sebesar 95,36% dengan jumlah Rp3.578.929.555,00. Dari realisasi penerimaan tahun 2019 sebesar Rp3.578.929.555,00, terdapat sejumlah Rp576.399.155,00 yang merupakan penerimaan atas kurang bayar sampai dengan tahun 2018 yang dialokasikan pada tahun 2019.

Bagi Hasil Dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya terealisasi sebesar Rp28.987.485,00 dengan capaian sebesar 2.583,55%. Pelampauan penerimaan dari target yang ditetapkan ini disebabkan adanya penerimaan atas kurang bayar sampai dengan tahun 2018 yang dialokasikan pada tahun 2019 sebesar Rp28.538.685.

## 2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA – LRA**

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	22.624.316,00	46.506.000,00	205,56
Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	-	-	-
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	601.255.840,00	640.840.181,00	106,58
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	16.787.231.026,00	17.078.993.538,00	101,74
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	591.296.746,00	592.843.300,00	100,26
Bagi Hasil Dari Sumber Daya Perikanan	884.408.329,00	590.155.800,00	66,73
<b>JUMLAH</b>	<b>18.886.816.259,00</b>	<b>18.949.338.819,00</b>	<b>100,33</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Realisasi pendapatan Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan tahun 2019 sebesar Rp46.506.000,00. Selain realisasi tersebut, terdapat realisasi kurang bayar sampai dengan tahun 2018 yang dialokasikan pada tahun 2019 sebesar Rp53.995.959,00 namun dilakukan pemotongan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 8/PK/2019 tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Tabel 5.9 dapat dilihat bahwa tidak terdapat realisasi penerimaan atas Bagi Hasil dari Dana Reboisasi tahun 2019. Namun pada tahun 2019 telah dialokasikan kurang bayar bagi hasil dana reboisasi sampai dengan tahun 2018 yang kemudian dipotong kembali sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 8/PK/2019 tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp889.723,00.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) tahun 2019 melampaui target yang ditetapkan pada Perubahan APBD yakni sebesar Rp640.840.181,00 atau 106,58%. Hal tersebut disebabkan adanya penerimaan kurang bayar tahun 2017 yang dialokasikan pada tahun 2019 sebesar Rp45.832.444,00 dan kurang bayar sampai dengan tahun 2018 yang dialokasikan pada tahun 2019 sebesar Rp232.915.797,00 namun dilakukan pemotongan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 8/PK/2019 tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp221.887.964,00 sehingga dana yang masuk ke RKUD hanya sebesar Rp9.027.833,00.

Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) tahun 2019 terealisasi Rp17.078.993.538,00 atau sebesar 101,74% dari target pada Perubahan APBD. Pelampauan penerimaan ini disebabkan adanya realisasi kurang bayar tahun 2017 yang dialokasikan pada tahun 2019 sebesar Rp3.387.081.804,00 dan kurang bayar sampai dengan tahun 2018 yang dialokasikan pada tahun 2019 sebesar Rp1.322.156.708,00 namun dipotong kembali sebesar Rp1.814.474,00 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 8/PK/2019 tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019, sehingga yang diterima pada RKUD sebesar Rp1.320.342.234,00.

Realisasi Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi tahun 2019 juga melampaui target pada Perubahan APBD yakni sebesar Rp592.843.300,00 atau 100,26%. Namun realisasi penerimaan ini merupakan realisasi atas target untuk tahun 2019 saja.

Bagi Hasil Dari Sumber Daya Perikanan tahun 2019 hanya terealisasi sebesar Rp590.155.800,00 atau hanya 66,73% dari target pada Perubahan APBD. Selain realisasi tersebut, terdapat realisasi kurang bayar sampai dengan tahun 2018 yang dialokasikan pada tahun 2019 sebesar Rp99.184.671,00 namun dilakukan pemotongan kembali berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 8/PK/2019 tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019.

3) Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Penerimaan Dana Alokasi Umum pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp364.595.503.000,00 atau tercapai sebesar 100,80% dari target pada Perubahan APBD sebesar Rp361.695.058.000,00. Pelampauan realisasi tersebut disebabkan adanya DAU Tambahan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Tahun 2019.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA

Penerimaan Dana Alokasi Khusus pada Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp85.850.338.347,00 atau tercapai sebesar 96,61% dari target atau alokasi Tahun 2019 sebesar Rp88.859.525.300,00. Penerimaan ini turun jauh dari penerimaan tahun sebelumnya yang mencapai Rp107.313.171.134,00. Adapun rincian Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA**

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
DAK Reguler Bidang Pendidikan - SD/SDLB	4.063.938.000,0	4.020.651.391,0	98,9
DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Dasar	3.599.999.000,0	3.484.016.592,0	96,8
DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Rujukan	2.199.999.000,0	1.967.720.064,0	89,4
DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Keluarga Berencana	1.450.000.000,0	1.233.685.500,0	85,1
Tunjangan Profesi Guru PNSD	13.429.367.120,0	13.734.419.720,0	102,3
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	376.500.000,0	376.500.000,0	100,0
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	687.118.815,0	687.118.815,0	100,0
Bantuan Operasional Kesehatan	5.849.510.906,0	5.398.921.683,0	92,3
Akreditasi Puskesmas	1.332.586.589,0	1.332.586.589,0	100,0
Jaminan Persalinan	-	-	-
Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.265.646.590,0	1.265.646.590,0	100,0
DAK Reguler Bidang Pendidikan-SMP	3.723.800.000,0	3.714.534.971,0	99,8
DAK Penugasan Bidang Air Minum	2.093.000.000,0	2.062.997.000,0	98,6
DAK Penugasan Bidang Sanitasi	1.800.000.000,0	1.800.000.000,0	100,0
DAK Penugasan Bidang Pasar	4.540.498.000,0	4.283.178.809,0	94,3
DAK Reguler Bidang Pendidikan - SKB	1.491.676.000,0	1.044.173.200,0	70,0
Tunjangan Khusus Guru	1.495.953.000,0	1.606.672.200,0	107,4
Pelayanan Administrasi Kependudukan	755.730.280,0	755.730.280,0	100,0
DAK Reguler Bidang Air Minum	2.159.252.000,0	2.141.812.000,0	99,2
DAK Reguler Bidang Sanitasi	2.578.494.000,0	2.578.494.000,0	100,0
DAK Reguler Bidang Pertanian	1.327.597.000,0	1.216.957.000,0	91,7
DAK Reguler Bidang Perpustakaan Daerah	225.000.000,0	223.561.500,0	99,4
DAK Reguler Bidang Jalan	21.271.447.000,0	21.056.767.855,0	99,0
DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	2.201.495.000,0	1.969.962.458,0	89,5
DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	1.416.677.000,0	1.359.380.000,0	96,0
DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB - Penurunan Stunting	102.988.000,0	72.091.600,0	70,0
DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB - Pengendalian Penyakit	2.882.735.000,0	2.556.149.043,0	88,7
DAK Penugasan Bidang Irigasi	3.147.881.000,0	2.900.423.487,0	92,1
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	768.900.000,0	384.450.000,0	50,0
Dana Pelayanan Kepariwisata	621.736.000,0	621.736.000,0	100,0

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
<b>JUMLAH</b>	<b>88.859.525.300,0</b>	<b>85.850.338.347,0</b>	<b>96,6</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA

Tidak terdapat anggaran maupun realisasi atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019.

c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pendapatan transfer dari Provinsi Sulawesi Utara yakni berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang terealisasi sebesar Rp14.031.200.625,00 dengan tingkat capaian 88,90% dari target pada Perubahan APBD sebesar Rp15.783.854.340,00. Dari jumlah realisasi penerimaan sebesar Rp14.031.200.625,00 terdapat realisasi atas penerimaan pelunasan piutang bulan Oktober s.d Desember 2018 sebesar Rp3.074.230.513,00, sedangkan sisanya merupakan realisasi atas penerimaan bulan Januari s.d Desember tahun 2019. Anggaran Bagi Hasil Pajak pada Perubahan APBD ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100 Tahun 2019 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2019 serta kurang bayar bagi hasil pajak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2018.

Berikut disajikan tabel rincian anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

**Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lainnya-LRA**

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	2.982.766.038,00	2.876.000.641,00	96,42
Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.650.107.154,00	2.236.483.044,00	84,39
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.662.011.943,00	6.122.322.369,00	91,90
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	20.411.075,00	41.028.950,00	201,01
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	3.468.558.130,00	2.755.365.621,00	79,44
<b>JUMLAH</b>	<b>15.783.854.340,00</b>	<b>14.031.200.625,00</b>	<b>88,90</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

d. Bantuan Keuangan – LRA

Tidak terdapat realisasi penerimaan berupa Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2018 menerima bantuan keuangan untuk bidang infrastruktur olahraga sebesar Rp829.255.500,00 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018. Adapun sisa dana atas bantuan keuangan tersebut telah dikembalikan kepada

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 3 Desember 2019 dengan SP2D Nomor 05688/SP2D-LS/BTL/4.04.5.2/2019 sejumlah Rp117.003.000,00.

### 5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Tahun 2019 memperoleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Pendapatan Hibah sebesar Rp10.722.640.000,00 dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp68.752.683.000,00.

#### a. Pendapatan Hibah – LRA

Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019 sebesar Rp10.722.640.000,00 atau sebesar 127,84% dari alokasi pada Perubahan APBD. Realisasi pendapatan hibah ini merupakan realisasi penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah tahun 2019. Pendapatan Hibah Dana BOS dicatat sebagai lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa pendapatan dana BOS dianggarkan pada Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Hibah, Obyek Pendapatan Hibah Dana BOS. Adapun rincian pendapatan hibah dana BOS ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA

NO.	SEKOLAH	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
1	SDN 1 Lion	70.400.000,00	66.880.000,00	95,00
2	SDN 2 Lion	59.200.000,00	122.880.000,00	207,57
3	SDN Saibuah	98.400.000,00	166.200.000,00	168,90
4	SDN 1 Meyambanga	129.600.000,00	255.600.000,00	197,22
5	SDN 2 Meyambanga	108.800.000,00	105.600.000,00	97,06
6	SDN 3 Meyambanga	71.200.000,00	71.520.000,00	100,45
7	SDN 1 Momalia	211.200.000,00	199.360.000,00	94,39
8	SDN 2 Momalia	143.200.000,00	131.040.000,00	91,51
9	SDN 3 Momalia	156.000.000,00	152.800.000,00	97,95
10	SDN 4 Momalia	115.200.000,00	112.640.000,00	97,78
11	SDN 1 Sinombayuga	92.000.000,00	90.720.000,00	98,61
12	SDN 2 Sinombayuga	92.800.000,00	183.680.000,00	197,93
13	SDN 3 Sinombayuga	42.400.000,00	41.760.000,00	98,49
14	SDN Pilolahunga	131.200.000,00	126.720.000,00	96,59
15	SMP N Lion	71.000.000,00	77.000.000,00	108,45
16	SMP N Momalia	322.000.000,00	727.200.000,00	225,84
17	SMP N Sinombayuga	132.000.000,00	138.000.000,00	104,55
18	SMP N Tonala	220.000.000,00	210.400.000,00	95,64
19	SMP N Satap Luwoo	79.000.000,00	163.400.000,00	206,84
20	SDN 1 Milangodaa	196.000.000,00	191.520.000,00	97,71
21	SDN 2 Milangodaa	94.400.000,00	170.360.000,00	180,47
22	SDN Tolutu	79.200.000,00	79.200.000,00	100,00
23	SDN Botulodu	43.200.000,00	42.240.000,00	97,78
24	SMP N Milangodaa	148.000.000,00	156.400.000,00	105,68
25	SDN Biniha	109.600.000,00	106.400.000,00	97,08
26	SDN Duminanga	88.800.000,00	89.760.000,00	101,08
27	SDN 1 Bakida	104.000.000,00	104.640.000,00	100,62
28	SDN 2 Bakida	76.800.000,00	137.880.000,00	179,53
29	SDN Motolohu	64.800.000,00	65.760.000,00	101,48

NO.	SEKOLAH	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
30	SDN Transpatoa	30.400.000,00	29.440.000,00	96,84
31	SDN Soputa	23.200.000,00	28.960.000,00	124,83
32	SMP N Bakida	102.000.000,00	103.200.000,00	101,18
33	SDN 1 Tablila	40.800.000,00	41.760.000,00	102,35
34	SDN 2 Tablila	54.400.000,00	109.520.000,00	201,32
35	SDN 1 Tolondadu	52.000.000,00	48.480.000,00	93,23
36	SDN 2 Tolondadu	61.600.000,00	134.960.000,00	219,09
37	SDN Sondana	90.400.000,00	90.080.000,00	99,65
38	SDN 1 Molibagu	74.400.000,00	69.600.000,00	93,55
39	SDN 2 Molibagu	44.800.000,00	41.600.000,00	92,86
40	SDN 3 Molibagu	81.600.000,00	84.160.000,00	103,14
41	SDN Popodu	80.800.000,00	78.560.000,00	97,23
42	SDN Toluaya	51.200.000,00	51.200.000,00	100,00
43	SDN 1 Salongo	118.400.000,00	221.280.000,00	186,89
44	SDN 2 Salongo	118.400.000,00	250.560.000,00	211,62
45	SDN 3 Salongo	60.800.000,00	60.160.000,00	98,95
46	SDN Dudepo	100.000.000,00	98.720.000,00	98,72
47	SDN Tangagah	72.000.000,00	143.760.000,00	199,67
48	SMP N Molibagu	387.000.000,00	401.000.000,00	103,62
49	SMP N Tangagah	114.000.000,00	116.400.000,00	102,11
50	SDN Mataindo	116.000.000,00	116.640.000,00	100,55
51	SDN 1 Torosik	43.200.000,00	42.880.000,00	99,26
52	SDN 2 Torosik	47.200.000,00	46.240.000,00	97,97
53	SDN Adow	64.800.000,00	119.640.000,00	184,63
54	SDN Tobayagan	132.800.000,00	134.080.000,00	100,95
55	SDN Adow Selatan	55.200.000,00	52.960.000,00	95,94
56	SDN Lupon	11.200.000,00	11.840.000,00	105,71
57	SMP N Adow	200.000.000,00	365.000.000,00	182,50
58	SMP N Tobayagan	80.000.000,00	83.600.000,00	104,50
59	SMP N Satap Mataindo	57.000.000,00	60.000.000,00	105,26
60	SDN 1 Linawan	82.400.000,00	81.440.000,00	98,83
61	SDN 2 Linawan	105.600.000,00	193.680.000,00	183,41
62	SDN Blomata	155.200.000,00	150.720.000,00	97,11
63	SDN 1 Pinolosian	117.600.000,00	116.000.000,00	98,64
64	SDN 2 Pinolosian	121.600.000,00	116.480.000,00	95,79
65	SDN Nunuk	100.800.000,00	98.880.000,00	98,10
66	SDN 1 Kombot	98.400.000,00	188.800.000,00	191,87
67	SDN 2 Kombot	86.400.000,00	171.600.000,00	198,61
68	SDN Lungkap	78.400.000,00	77.120.000,00	98,37
69	SMP N Pinolosian	325.000.000,00	327.000.000,00	100,62
70	SMP N Kombot	168.000.000,00	163.600.000,00	97,38
71	SDN Matandoi	80.000.000,00	78.400.000,00	98,00
72	SDN 2 Matandoi	64.000.000,00	150.800.000,00	235,63
73	SDN Dumagin A	91.200.000,00	91.200.000,00	100,00
74	SDN Dumagin B	53.600.000,00	54.880.000,00	102,39
75	SDN Onggundi	79.200.000,00	74.720.000,00	94,34
76	SDN Dayow	44.800.000,00	113.200.000,00	252,68
77	SDN Modisi	44.800.000,00	44.160.000,00	98,57
78	SDN Posilagon	106.400.000,00	107.360.000,00	100,90
79	SDN Iligon	30.400.000,00	29.440.000,00	96,84
80	SDN Pidung	32.800.000,00	89.520.000,00	272,93
81	SMP N Dayow	133.000.000,00	133.800.000,00	100,60
82	SMP N Satap Posilagon	117.000.000,00	238.200.000,00	203,59
83	SMP N Dumagin	109.000.000,00	256.600.000,00	235,41
84	SMP N Pangia	46.000.000,00	51.200.000,00	111,30
<b>JUMLAH</b>		<b>8.387.600.000,00</b>	<b>10.722.640.000,00</b>	<b>127,84</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

b. Pendapatan Lainnya - LRA

Pendapatan Lainnya pada Tahun Anggaran 2019 merupakan penerimaan Dana Desa yang terealisasi sebesar Rp68.752.683.000,00 dengan tingkat capaian realisasi sebesar 100,00% dari target anggaran yang ditetapkan pada perubahan APBD sesuai Alokasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 Lampiran XVIII Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota. Anggaran dan realisasi Dana Desa dicatat pada Pendapatan Lainnya berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsiliasi data APBD Tahun Anggaran 2019.

### 5.1.2. Belanja

Realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp473.737.242.968,00 atau 94,45% dari target sebesar Rp501.567.925.519,47 pada perubahan APBD. Jenis belanja daerah ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga yang dapat dirinci sebagai berikut.

#### 5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja operasi pada tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp380.409.642.413,00 atau mencapai 94,84% dari total anggaran sebesar Rp401.087.014.719,97 pada perubahan APBD. Adapun rincian belanja operasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Belanja Pegawai

Tabel 5.13 Belanja Pegawai

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	128.786.302.312,47	125.218.495.499,00	97,23
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	43.745.268.004,00	41.207.183.956,00	94,20
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.706.850.000,00	1.651.078.336,00	96,62
<b>JUMLAH</b>	<b>174.240.440.316,47</b>	<b>168.076.757.791,00</b>	<b>96,46</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain belanja gaji dan tunjangan, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan dalam belanja pegawai. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2018, pada tahun 2019 terjadi kenaikan belanja sebesar Rp9.012.821.137,00. Hal ini disebabkan adanya penambahan calon pegawai negeri sipil selama tahun 2019 serta adanya kenaikan pangkat dan gaji berkala bagi aparatur sipil negara.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp186.810.406.020,00 atau mencapai 93,36% dari total anggaran sebesar Rp200.101.247.703,50. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2018 sebesar Rp209.253.888.423,00, maka dapat dilihat belanja barang dan jasa tahun 2019

mengalami penurunan sebesar Rp22.443.482.403,00. Adapun rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Belanja Bahan: Pakai Habis	11.808.918.315,00	9.971.739.843,00	84,44
Belanja Bahan/Material	5.000.770.095,00	4.660.748.317,00	93,20
Belanja Jasa Kantor	55.293.562.604,50	52.377.811.646,00	94,73
Belanja Premi Asuransi	9.025.464.000,00	11.421.697.619,00	126,55
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.945.991.500,00	5.110.166.320,00	73,57
Belanja Cetak dan Penggandaan	3.793.240.450,00	3.334.723.250,00	87,91
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.603.473.000,00	2.372.280.000,00	91,12
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	401.750.000,00	279.190.000,00	69,49
Belanja Sewa Alat Berat	6.400.000,00	0,00	-
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	761.825.000,00	593.078.600,00	77,85
Belanja Makanan dan Minuman	6.411.842.500,00	5.621.167.650,00	87,67
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	455.400.000,00	380.646.100,00	83,59
Belanja Pakaian Kerja	307.191.600,00	248.143.400,00	80,78
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	687.742.400,00	594.262.350,00	86,41
Belanja Perjalanan Dinas	54.843.235.147,00	52.112.043.204,00	95,02
Belanja Pemeliharaan	4.827.001.187,00	4.728.235.835,00	97,95
Belanja Jasa Konsultansi	2.699.182.150,00	1.940.771.500,00	71,90
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	244.298.900,00	199.529.000,00	81,67
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	885.910.000,00	701.615.000,00	79,20
Belanja Honorarium PNS	8.182.300.000,00	7.973.683.500,00	97,45
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	497.000.000,00	394.500.000,00	79,38
Belanja Barang Dana BOS	6.896.058.955,00	6.485.515.853,00	94,05
Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	1.566.500.000,00	1.561.500.000,00	99,68
Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan	94.450.000,00	75.000.000,00	79,41
Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.140.160.000,00	4.956.505.000,00	80,72
Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	771.850.000,00	547.648.000,00	70,95
Belanja Pengujian Kualitas Lingkungan*	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
Belanja Barang dibawah Kapitalisasi	2.000.872.600,00	1.882.331.317,00	94,06
Belanja Pegawai Dana BOS	605.566.300,00	564.595.000,00	93,23
Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.517.341.000,00	2.897.377.716,00	82,37
Belanja Operasional Pengawasan	2.693.950.000,00	2.693.900.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>200.101.247.703,50</b>	<b>186.810.406.020,00</b>	<b>93,36</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

c. Belanja Hibah

Belanja hibah tahun 2019 terealisasi sebesar Rp9.902.834.912,00 atau sebesar 94,83% dari total anggaran sebesar Rp10.442.281.700,00 pada perubahan APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja hibah tahun 2018 sebesar Rp4.098.800.000,00, maka dapat dilihat terjadi kenaikan belanja hibah sebesar Rp5.804.034.912,00. Tidak terealisasinya belanja hibah sebesar 100,00% dikarenakan tidak adanya permintaan pembayaran dari penerima hibah berkaitan. Adapun rincian belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.15 Belanja Hibah

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	80.000.000,00	0,00	-
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	10.362.281.700,00	9.902.834.912,00	95,57
<b>JUMLAH</b>	<b>10.442.281.700,00</b>	<b>9.902.834.912,00</b>	<b>94,83</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Anggaran belanja hibah kepada kelompok masyarakat tahun 2019 sebesar Rp80.000.000,00 tidak terealisasi. Belanja hibah ini ditujukan kepada Panitia Pembangunan Mesjid dan Panitia Pembangunan Taman Pengajian yang sampai dengan 31 Desember 2019 tidak diajukan permintaan pencairan dana hibah.

Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp9.902.834.912,00 atau sebesar 95,57% dari anggaran belanja sebesar Rp10.362.281.700,00. Realisasi belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan terdiri dari hibah kepada Komite Organisasi Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp100.000.000,00, hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp250.000.000,00, hibah kepada BAWASLU sebesar Rp150.000.000,00, hibah kepada Muhammadiyah Rp75.000.000,00 dan hibah kepada lembaga PAUD sebesar Rp795.600.000,00 pada SKPKD. Sedangkan rincian belanja hibah pada SKPD lain dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.16 Rincian Belanja Hibah pada SKPD

URAIAN	JUMLAH Rp
DINAS PENDIDIKAN	820.223.200,00
Hibah Buku Kurikulum PAUD	150.643.500,00
Hibah untuk Kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	30.552.000,00
Hibah Permainan Edukatif Luar dan Dalam	450.670.000,00
Rehabilitasi Berat Jamban Siswa SMP Cokro Salongo	38.300.000,00
Pengadaan Buku Ujian Akhir SD/MI	6.035.700,00
Pengadaan Buku Ujian SMP	17.732.000,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru MIS Batuhamba	126.290.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM PRP2KP	6.814.737.000,00
Pembangunan IPAL Komunal	2.451.000.000,00
Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal	1.710.000.000,00
Penataan Ruang Terbuka Hijau	1.678.737.000,00
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	975.000.000,00
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	236.830.000,00
Hibah Barang Gendre Kit	236.830.000,00
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	256.178.128,00
Hibah Peralatan Olahraga	88.240.528,00
Hibah Barang Kegiatan Olahraga Tingkat Provinsi	167.937.600,00
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	80.645.000,00
Pembangunan Big Letter Pantai Modisi	63.545.000,00
Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Tempat Parkir Obyek Wisata Pantai Modisi	12.000.000,00
Jasa Konsultansi Perencanaan Pemasangan Lampu Taman Pantai Modisi	5.100.000,00
BAGIAN UMUM	323.621.584,00
Pengadaan Kendaraan Dinas (Station Wagon)	323.621.584,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.532.234.912,00</b>

Sumber : Buku Besar Pembantu Tahun 2019

Realisasi belanja hibah pada SKPD sebesar Rp8.532.234.912,00 sebagaimana tabel diatas berasal dari belanja barang dan jasa yang dikonversi menjadi belanja hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD.

d. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk kondisi psikososial, dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Belanja bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp15.619.643.690,00 atau sebesar 95,81% dari total anggaran sebesar Rp16.303.045.000,00. Belanja bantuan sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.17 Belanja Bantuan Sosial**

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	14.948.045.000,00	14.635.143.690,00	97,91
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	1.355.000.000,00	984.500.000,00	72,66
<b>JUMLAH</b>	<b>16.303.045.000,00</b>	<b>15.619.643.690,00</b>	<b>95,81</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp14.635.143.690,00 terdiri dari bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang direncanakan yakni bantuan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan disabilitas sebesar Rp.862.200.000,00 pada SKPKD dan belanja pada SKPD lainnya sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 5.18 Rincian Belanja Bantuan Sosial pada SKPD**

URAIAN	JUMLAH Rp
DINAS SOSIAL	6.874.920.000,00
Belanja bantuan sosial rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	6.874.920.000,00
DINAS PERIKANAN	2.139.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial Pengadaan Rumpon + Lampu Tenaga Surya	298.100.000,00
Pengadaan Perahu Fiber 0.5 GT	482.020.000,00
Pengadaan Perahu Fiber 1 GT	1.359.380.000,00
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	3.846.655.000,00
Pengadaan Herbisida	102.960.000,00
Pengadaan Benih Jagung Hibrida	191.625.000,00
Pekerjaan Belanja Barang yang diserahkan kemasyarakat	45.600.000,00
Pengadaan Benih Cabe Rawit	78.750.000,00
Pengadaan Bibit Ternak Sapi	2.435.500.000,00
Pengadaan Bibit Coklat Sambung Pucuk	420.000.000,00
Pengadaan Mesin Potong Rumput	278.850.000,00
Pengadaan Cord Sellar	120.120.000,00
Pengadaan Power Tresher	173.250.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	911.868.690,00
Pengadaan Alat Pres Batu Bata	119.200.000,00
Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri	792.668.690,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.772.943.690,00</b>

Sumber : Buku Besar Pembantu Tahun 2019

Realisasi belanja bantuan sosial pada SKPD sebesar Rp13.772.943.690,00 sebagaimana tabel diatas berasal dari belanja barang dan jasa yang dikonversi menjadi belanja bantuan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD sebagaimana perlakuan juga terhadap belanja hibah berupa barang.

Sedangkan belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebesar Rp984.500.000,00 terdiri dari bantuan sosial kepada anggota masyarakat yang direncanakan berupa dana beasiswa sebesar Rp584.500.000,00 dan bantuan sosial kepada anggota masyarakat yang tidak direncanakan berupa dana duka bagi ahli waris sebesar Rp400.000.000,00 pada SKPKD. Tidak terealisasinya bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebesar 100% dikarenakan tidak adanya permintaan pembayaran dari penerima bantuan.

### 5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan atau satu periode akuntansi. Belanja modal pada tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp93.210.597.555,00 atau mencapai 93,70% dari total anggaran sebesar Rp99.480.910.799,50 pada perubahan APBD. Belanja modal tahun 2019 turun jauh dari belanja modal tahun sebelumnya yang mencapai Rp150.320.829.452,00. Belanja modal sesuai dengan SAP diklasifikasikan menjadi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

#### a. Belanja Modal Tanah

Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merencanakan untuk melakukan pembelian tanah dengan total anggaran sebesar Rp850.000.000,00 namun yang dapat terealisasi hanya sebesar 75,12% atau sebesar Rp638.545.000,00 dari total anggaran yang ditetapkan pada perubahan APBD. Realisasi belanja tanah ini merupakan belanja tanah lapangan olah raga di Desa Soguo sebesar Rp473.715.000,00 dan belanja tanah untuk bangunan bersejarah sebesar Rp164.830.000,00.

#### b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp18.807.122.512,00 atau sebesar 91,30% dari total anggaran sebesar Rp20.600.278.106,23 yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Rincian belanja peralatan dan mesin dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	297.000.000,00	292.815.000,00	98,59
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	5.207.058.125,00	4.874.126.426,00	93,61
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	936.189.645,00	773.170.500,00	82,59
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	110.270.100,00	56.136.000,00	50,91
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	915.743.464,00	843.310.248,00	92,09
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.146.605.559,23	2.804.996.931,00	89,14
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.406.094.616,00	5.036.481.830,00	93,16

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	291.549.400,00	277.714.400,00	95,25
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	290.302.085,00	273.834.726,00	94,33
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	99.400.000,00	91.684.440,00	92,24
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	2.867.179.112,00	2.542.703.006,00	88,68
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	23.534.000,00	17.848.000,00	75,84
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	45.572.000,00	37.800.005,00	82,95
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	15.882.000,00	15.882.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Dana BOS	939.098.000,00	659.819.000,00	91,56
<b>JUMLAH</b>	<b>20.600.278.106,23</b>	<b>18.807.122.512,00</b>	<b>91,30</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp25.854.664.401,00 atau sebesar 96,17% dari total anggaran sebesar Rp26.883.003.432,27 yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.20 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	8.179.118.000,00	7.901.647.000,00	96,61
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	999.800,00	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.143.029.540,00	2.066.272.000,00	96,42
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.406.000.000,00	4.173.927.000,00	94,73
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.573.594.476,27	4.536.730.035,00	99,19
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	405.137.750,00	385.749.750,00	95,21
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.133.248.000,00	2.995.657.000,00	95,61
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.314.360.416,00	1.267.255.616,00	96,42
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	70.365.450,00	49.950.000,00	70,99
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	1.188.000.000,00	1.170.332.000,00	98,51
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Asrama	1.035.000.000,00	927.374.000,00	89,60
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	384.150.000,00	329.770.000,00	85,84
<b>JUMLAH</b>	<b>26.883.003.432,27</b>	<b>25.854.664.401,00</b>	<b>96,17</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2019 terealisasi sebesar Rp46.983.703.366,00 atau 93,58% dari total anggaran sebesar Rp50.204.438.831,00. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.21 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	34.045.722.000,00	32.367.126.866,00	95,07
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	3.500.000.000,00	3.328.417.650,00	95,10
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	4.782.017.000,00	4.389.805.700,00	91,80
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	700.000.000,00	186.615.000,00	26,66
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	1.114.000.000,00	894.137.000,00	80,26
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	500.000.000,00	485.368.000,00	97,07
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	185.477.831,00	167.762.800,00	90,45
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum	5.277.222.000,00	5.065.695.350,00	95,99
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	100.000.000,00	98.775.000,00	98,78
<b>JUMLAH</b>	<b>50.204.438.831,00</b>	<b>46.983.703.366,00</b>	<b>93,58</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya tahun 2019 terealisasi sebesar Rp926.562.276,00 atau 98,24% dari total anggaran sebesar Rp943.190.430,00 yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Adapun belanja aset tetap lainnya ini terdiri dari belanja pengadaan buku ilmu pengetahuan umum sebesar Rp815.931.180,00, belanja barang bercorak kebudayaan alat kesenian sebesar Rp37.840.000,00, belanja barang bercorak kebudayaan alat olah raga sebesar Rp29.434.000,00 dan belanja alat olah raga senam sebesar Rp43.357.096,00.

### 5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga ini ditujukan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Selama tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan belanja tidak terduga sebesar Rp117.003.000,00. Belanja ini merupakan pengembalian sisa dana bantuan khusus keuangan bidang infrastruktur olahraga kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam kurun waktu satu tahun yakni 1 Januari s.d 31 Desember 2019 patut kita syukuri bersama bahwa tidak terjadi bencana alam maupun bencana sosial ataupun lainnya yang tidak diharapkan terjadi pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

### 5.1.3. Transfer

Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019 sebesar Rp109.648.997.439,00 atau 99,73% dari total anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.

#### 5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer bagi hasil pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan transfer bagi hasil pajak daerah. Realisasi belanja bagi hasil pendapatan dalam bentuk Bagi Hasil Pajak Daerah yang ditujukan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp681.965.888,00 atau sebesar 74,41% dari target yang ditetapkan pada Perubahan APBD. Bagi Hasil Pajak Daerah dianggarkan berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019, serta Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran 2018. Adapun rincian anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
1	Desa Tanggah	10.809.336,00	7.158.341,00	66,22
2	Desa Salongo	10.854.020,00	7.185.155,00	66,20
3	Desa Toluwya	16.159.795,00	13.977.831,00	86,50
4	Desa Molibagu	20.485.122,00	16.487.286,00	80,48
5	Desa Popodu	21.492.057,00	19.084.407,00	88,80
6	Desa Tolondadu	8.860.378,00	7.108.334,00	80,23
7	Desa Tabisa	24.226.583,00	19.990.975,00	82,52
8	Desa Sondana	16.739.473,00	14.573.399,00	87,06
9	Desa Dudupo	10.808.262,00	7.151.206,00	66,16
10	Desa Pinolantungan	11.055.104,00	7.358.153,00	66,56
11	Desa Tolondadu I	10.898.116,00	7.222.618,00	66,27
12	Desa Tolondadu II	8.363.343,00	6.155.941,00	73,61
13	Desa Soguo	10.875.639,00	8.101.016,00	74,49
14	Desa Pintadia	15.786.008,00	13.590.111,00	86,09
15	Desa Salongo Timur	8.802.035,00	6.118.745,00	69,52
16	Desa Salongo Barat	8.203.403,00	6.071.289,00	74,01
17	Desa Dudepo Barat	8.065.913,00	5.914.698,00	73,33
18	Desa Lion	8.771.851,00	6.110.350,00	69,66
19	Desa Momalia II	8.209.464,00	6.064.985,00	73,88
20	Desa Meyambang	10.934.963,00	7.285.593,00	66,63
21	Desa Saibuah	8.142.494,00	6.010.229,00	73,81
22	Desa Tolutu	8.308.984,00	6.230.513,00	74,99
23	Desa Milangodaa	10.742.925,00	7.075.186,00	65,86
24	Desa Sinombayuga	8.201.778,00	6.130.602,00	74,75
25	Desa Luwrio	10.805.526,00	7.137.786,00	66,06
26	Desa Momalia I	18.710.763,00	14.941.027,00	79,85
27	Desa Milangodaa Barat	10.761.002,00	7.110.286,00	66,07
28	Desa Sakti	10.775.315,00	7.120.091,00	66,08
29	Desa Manggadaa	10.621.553,00	6.972.592,00	65,65
30	Desa Pitolchunga	8.058.676,00	5.907.657,00	73,31
31	Desa Tonala	8.226.804,00	6.094.599,00	74,08
32	Desa Botiliodu	10.926.756,00	7.278.079,00	66,61
33	Desa Tunefuma	8.084.785,00	5.952.671,00	73,63
34	Desa Meyambang Timur	8.096.865,00	5.964.751,00	73,67

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		2019 Rp	2019 Rp	
35	Desa Milangodaa Utara	8.053.501,00	5.902.632,00	73,29
36	Desa Molosipat	8.053.355,00	5.902.405,00	73,29
37	Desa Nunuka Raya	8.135.402,00	6.002.455,00	73,78
38	Desa Pakuju Jaya	8.222.997,00	6.101.642,00	74,20
39	Desa Momilia III	8.071.856,00	5.950.323,00	73,72
40	Desa Inocota	7.960.455,00	5.827.887,00	73,21
41	Desa Linawan	11.223.884,00	7.567.616,00	67,42
42	Desa Nunuk	11.357.465,00	7.525.238,00	66,26
43	Desa Pinolosian	18.850.172,00	15.084.130,00	80,02
44	Desa Kombot	12.040.334,00	9.457.270,00	78,55
45	Desa Lungkap	11.438.697,00	7.781.905,00	68,03
46	Desa Domjata	11.476.167,00	7.323.954,00	63,82
47	Desa Linawan I	10.639.841,00	6.991.342,00	65,71
48	Desa Tolotoyon	8.403.788,00	6.251.279,00	74,39
49	Desa Pinolosian Selatan	10.450.988,00	7.683.551,00	73,52
50	Desa Kombot Timur	10.816.981,00	6.991.799,00	64,64
51	Desa Mataindo	8.252.167,00	6.060.763,00	73,44
52	Desa Adow	18.959.165,00	14.607.226,00	77,05
53	Desa Torosik	11.175.490,00	7.508.389,00	67,19
54	Desa Tobayagan	18.793.629,00	14.778.291,00	78,63
55	Desa Deaga	8.135.709,00	5.810.474,00	71,42
56	Desa Adow Selatan	8.134.891,00	5.984.066,00	73,56
57	Desa Mataindo Utara	8.339.281,00	6.154.273,00	73,80
58	Desa Tobayagan Selatan	16.010.426,00	13.824.077,00	86,34
59	Desa Motendoi	16.113.382,00	13.705.654,00	85,06
60	Desa Dumagin A	18.917.989,00	14.585.614,00	77,10
61	Desa Dumagin B	16.384.488,00	14.177.576,00	86,53
62	Desa Dayow	16.160.266,00	13.972.138,00	86,46
63	Desa Onggundi	10.962.099,00	7.313.269,00	66,71
64	Desa Modisi	8.227.785,00	6.095.530,00	74,08
65	Desa Posilagon	8.098.210,00	5.947.494,00	73,44
66	Desa Pidung	16.207.412,00	14.017.520,00	86,49
67	Desa Ilig'n	8.068.918,00	5.936.804,00	73,58
68	Desa Matandoi Selatan	18.757.287,00	14.689.628,00	78,31
69	Desa Perjuangan	7.920.375,00	5.788.261,00	73,08
70	Desa Onggunoi Selatan	10.761.398,00	7.112.899,00	66,10
71	Desa Bakida	10.924.481,00	7.257.041,00	66,43
72	Desa Duminanga	10.941.153,00	7.273.044,00	66,47
73	Desa Biniha	10.804.969,00	7.131.385,00	66,00
74	Desa Parigia	10.908.247,00	7.240.233,00	66,37
75	Desa Sinundaka	8.322.610,00	6.171.894,00	74,16
76	Desa Sruputa	10.732.876,00	7.084.377,00	66,01
77	Desa Biniha Timur	10.950.887,00	6.953.034,00	63,49
78	Desa Mocolohu	8.123.342,00	5.972.453,00	73,52
79	Desa Trains Pato'a	8.207.130,00	6.074.843,00	74,02
80	Desa Halabolu	8.140.004,00	5.923.167,00	72,77
81	Desa Biniha Selatan	7.964.655,00	5.832.541,00	73,23
<b>JUMLAH</b>		<b>916.461.695,00</b>	<b>681.965.888,00</b>	<b>74,41</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

### 5.1.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi transfer bantuan keuangan tahun 2019 sebesar Rp108.967.031.551,00 atau sebesar 99,94% dari total anggaran sebesar Rp109.029.844.300,00 pada perubahan APBD. Transfer Bantuan Keuangan terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lain, Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan

Lainnya dengan rincian anggaran dan realisasi sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.23 Transfer Bantuan Keuangan**

URAIAN	ANGGARAN 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	%
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	107.789.504.200,00	107.789.504.200,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	240.340.100,00	177.527.351,00	73,87
<b>JUMLAH</b>	<b>109.029.844.300,00</b>	<b>108.967.031.551,00</b>	<b>99,94</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas pelaksanaan pembangunan Stand Sulawesi Utara di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) guna mengoptimalkan fungsi dan peran anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah yang menyatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggungjawab terhadap Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah. Berdasarkan hasil rapat para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 3 November 2016 dimana setiap Kabupaten/Kota pada Tahun 2017 menganggarkan Rp1.000.000.000,00 pada APBD. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Sulawesi Utara Nomor 900/1.087/Sekr-BPK-AD tanggal 12 April 2017 tentang Pemberitahuan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Provinsi Sulawesi Utara dan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 424 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 900/2944/Sekr BPK-AD tanggal 1 November 2017 perihal Dana Rehabilitasi Anjungan Sulawesi Utara Taman Mini Indonesia Indah, menyampaikan bahwa dalam usaha menyiapkan kebutuhan dana untuk rehabilitasi anjungan Sulawesi Utara Taman Mini Indonesia Indah Pemerintah Kabupaten/Kota kembali menganggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dan APBD Tahun Anggaran 2019 masing-masing per tahun sebesar Rp1.000.000.000,00. Adapun Bantuan keuangan ini untuk tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari total yang dianggarkan pada Perubahan APBD.

Realisasi belanja bantuan keuangan ke desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa terealisasi sebesar Rp107.789.504.200,00 atau sebesar 100,00% dari total anggaran pada perubahan APBD. Realisasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud terdiri dari realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp107.779.504.200 dan bantuan keuangan khusus kepada Desa Sakti sebesar Rp10.000.000,00. Anggaran Belanja Alokasi Dana Desa ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Belanja Dana Desa ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 serta Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019. Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.24 Anggaran dan Realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

NO	DESA	ANGGARAN			REALISASI	%
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	TOTAL		
1	Desa Tanggah	792.145.000,00	441.154.000,00	1.233.299.000,00	1.233.299.000,00	100,00
2	Desa Salongo	835.082.000,00	514.235.000,00	1.349.317.000,00	1.349.317.000,00	100,00
3	Desa Tolubay	757.310.000,00	448.668.000,00	1.205.978.000,00	1.205.978.000,00	100,00
4	Desa Molbagu	814.811.000,00	615.860.000,00	1.430.671.000,00	1.430.671.000,00	100,00
5	Desa Popodu	775.092.000,00	480.096.000,00	1.255.178.000,00	1.255.178.000,00	100,00
6	Desa Tolondada	836.969.000,00	458.352.000,00	1.295.321.000,00	1.295.321.000,00	100,00
7	Desa Tablisa	932.682.000,00	493.215.000,00	1.425.897.000,00	1.425.897.000,00	100,00
8	Desa Sondana	859.567.000,00	487.811.000,00	1.347.378.000,00	1.347.378.000,00	100,00
9	Desa Dulepo	787.513.000,00	463.253.000,00	1.250.766.000,00	1.250.766.000,00	100,00
10	Desa Pinolantun-jan	956.727.000,00	494.048.000,00	1.450.775.000,00	1.450.775.000,00	100,00
11	Desa Tolondad. I	919.877.000,00	487.971.000,00	1.407.848.000,00	1.407.848.000,00	100,00
12	Desa Tolondad. II	832.539.000,00	452.812.000,00	1.285.351.000,00	1.285.351.000,00	100,00
13	Desa Soguo	809.099.000,00	461.927.000,00	1.271.026.000,00	1.271.026.000,00	100,00
14	Desa Pivada	745.523.000,00	442.565.000,00	1.188.028.000,00	1.188.028.000,00	100,00
15	Desa Salongo Timur	756.347.000,00	445.495.000,00	1.201.842.000,00	1.201.842.000,00	100,00
16	Desa Salongo Barat	846.151.000,00	425.250.000,00	1.271.401.000,00	1.271.401.000,00	100,00
17	Desa Dulepo Barat	806.808.000,00	433.174.000,00	1.239.982.000,00	1.239.982.000,00	100,00
18	Desa Lion	784.924.000,00	508.216.000,00	1.293.140.000,00	1.293.140.000,00	100,00
19	Desa Homala II	923.006.000,00	514.988.000,00	1.437.994.000,00	1.437.994.000,00	100,00
20	Desa Meyambang	834.526.000,00	495.767.000,00	1.330.293.000,00	1.330.293.000,00	100,00
21	Desa Salbuah	933.819.000,00	535.163.000,00	1.468.982.000,00	1.468.982.000,00	100,00
22	Desa Tokutu	986.911.000,00	525.601.000,00	1.512.512.000,00	1.512.512.000,00	100,00
23	Desa Milangoda	1.014.519.000,00	636.209.000,00	1.650.728.000,00	1.650.728.000,00	100,00
24	Desa Srombayu	837.937.000,00	458.356.000,00	1.296.293.000,00	1.296.293.000,00	100,00
25	Desa Lumoo	1.024.069.000,00	570.489.000,00	1.594.578.000,00	1.594.578.000,00	100,00
26	Desa Homala I	876.901.000,00	558.194.000,00	1.385.095.000,00	1.385.095.000,00	100,00
27	Desa Milangoda Barat	1.074.155.000,00	546.516.000,00	1.620.671.000,00	1.620.671.000,00	100,00
28	Desa Sekit	859.209.000,00	486.229.000,00	1.345.438.000,00	1.345.438.000,00	100,00
29	Desa Hanggada	777.246.000,00	427.735.000,00	1.204.981.000,00	1.204.981.000,00	100,00
30	Desa Pilohun,ur	868.745.000,00	476.970.000,00	1.345.715.000,00	1.345.715.000,00	100,00
31	Desa Tonala	926.937.000,00	541.551.000,00	1.468.488.000,00	1.468.488.000,00	100,00
32	Desa Botuladu	787.892.000,00	443.265.000,00	1.231.157.000,00	1.231.157.000,00	100,00
33	Desa Dohelumu	842.768.000,00	447.946.000,00	1.290.714.000,00	1.290.714.000,00	100,00
34	Desa Meyambang Timur	757.800.000,00	441.115.000,00	1.238.915.000,00	1.238.915.000,00	100,00
35	Desa Milangoda Utara	800.880.000,00	445.286.000,00	1.246.166.000,00	1.246.166.000,00	100,00
36	Desa Molosiput	758.255.000,00	459.531.000,00	1.217.786.000,00	1.217.786.000,00	100,00
37	Desa Nunuka Raya	879.461.000,00	459.893.000,00	1.339.354.000,00	1.339.354.000,00	100,00
38	Desa Pakuku Jaya	806.497.000,00	443.440.000,00	1.249.937.000,00	1.249.937.000,00	100,00
39	Desa Homala. II	784.096.000,00	456.433.000,00	1.240.529.000,00	1.240.529.000,00	100,00
40	Desa Inosiba	849.445.000,00	447.595.000,00	1.297.040.000,00	1.297.040.000,00	100,00
41	Desa Linawan	862.859.000,00	506.284.000,00	1.369.143.000,00	1.369.143.000,00	100,00
42	Desa Nunuk	830.054.000,00	518.791.000,00	1.338.845.000,00	1.338.845.000,00	100,00
43	Desa Pinolalan	751.065.000,00	523.070.000,00	1.274.135.000,00	1.274.135.000,00	100,00
44	Desa Kombot	882.605.000,00	550.957.000,00	1.433.562.000,00	1.433.562.000,00	100,00
45	Desa Lungkap	810.994.000,00	469.751.000,00	1.280.745.000,00	1.280.745.000,00	100,00
46	Desa Binata	808.835.000,00	504.330.000,00	1.313.165.000,00	1.313.165.000,00	100,00
47	Desa Linawan I	847.225.000,00	486.807.000,00	1.334.032.000,00	1.334.032.000,00	100,00
48	Desa Tolotoyon	851.158.000,00	558.187.000,00	1.419.385.000,00	1.419.385.000,00	100,00
49	Desa Pinotian Selatan	788.492.000,00	485.955.000,00	1.248.448.000,00	1.248.448.000,00	100,00
50	Desa Kombot Timur	748.469.000,00	417.672.000,00	1.166.141.000,00	1.166.141.000,00	100,00
51	Desa Mataindu	852.044.000,00	464.128.000,00	1.316.172.000,00	1.316.172.000,00	100,00
52	Desa Adow	896.387.000,00	516.545.000,00	1.406.932.000,00	1.406.932.000,00	100,00
53	Desa Torosik	814.339.000,00	460.937.000,00	1.275.276.000,00	1.275.276.000,00	100,00
54	Desa Tobiyagan	899.681.000,00	501.755.000,00	1.401.436.000,00	1.401.436.000,00	100,00
55	Desa Deaga	797.963.000,00	449.142.000,00	1.247.105.000,00	1.247.105.000,00	100,00
56	Desa Adow Selatan	848.124.000,00	498.817.000,00	1.346.941.000,00	1.346.941.000,00	100,00
57	Desa Mataindu Utara	846.754.000,00	460.058.000,00	1.306.812.000,00	1.306.812.000,00	100,00
58	Desa Tobiyagan Selatan	818.325.000,00	446.713.000,00	1.265.038.000,00	1.265.038.000,00	100,00

NO	DESA	ANGGARAN			REALISASI	%
		DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	TOTAL		
59	Desa Motanda	1.029.994.000,00	508.525.000,00	1.538.529.000,00	1.538.529.000,00	100,00
60	Desa Dumagin A	938.605.000,00	572.783.000,00	1.511.388.000,00	1.511.388.000,00	100,00
61	Desa Dumagin B	820.170.000,00	501.072.000,00	1.321.242.000,00	1.321.242.000,00	100,00
62	Desa Dayor	834.804.000,00	445.717.000,00	1.280.521.000,00	1.280.521.000,00	100,00
63	Desa Ongguni	787.352.000,00	434.725.000,00	1.222.077.000,00	1.222.077.000,00	100,00
64	Desa Modis	978.009.000,00	466.323.000,00	1.444.332.000,00	1.444.332.000,00	100,00
65	Desa Postagon	888.273.000,00	462.910.000,00	1.351.183.000,00	1.351.183.000,00	100,00
66	Desa Pidung	811.400.000,00	417.793.000,00	1.229.193.000,00	1.229.193.000,00	100,00
67	Desa Ilgon	889.083.000,00	443.353.000,00	1.332.436.000,00	1.332.436.000,00	100,00
68	Desa Matandai Selatan	944.091.000,00	463.017.000,00	1.407.108.000,00	1.407.108.000,00	100,00
69	Desa Perjuangan	857.644.000,00	436.055.000,00	1.293.699.000,00	1.293.699.000,00	100,00
70	Desa Ongguni Selatan	866.559.000,00	436.688.000,00	1.303.247.000,00	1.303.247.000,00	100,00
71	Desa Bakida	935.986.000,00	620.848.000,00	1.536.834.000,00	1.536.834.000,00	100,00
72	Desa Dumharang	933.606.000,00	639.102.200,00	1.572.708.200,00	1.572.708.200,00	100,00
73	Desa Binha	791.715.000,00	438.483.000,00	1.230.198.000,00	1.230.198.000,00	100,00
74	Desa Pangla	891.424.000,00	511.023.000,00	1.402.447.000,00	1.402.447.000,00	100,00
75	Desa Siraadake	828.499.000,00	547.890.000,00	1.376.389.000,00	1.376.389.000,00	100,00
76	Desa Soputa	763.537.000,00	434.674.000,00	1.198.211.000,00	1.198.211.000,00	100,00
77	Desa Binra Timur	777.609.000,00	441.294.000,00	1.218.903.000,00	1.218.903.000,00	100,00
78	Desa Mokolohu	853.432.000,00	472.592.000,00	1.326.024.000,00	1.326.024.000,00	100,00
79	Desa Trans Palu'a	782.948.000,00	420.070.000,00	1.203.018.000,00	1.203.018.000,00	100,00
80	Desa Halabolu	755.738.000,00	393.265.000,00	1.149.003.000,00	1.149.003.000,00	100,00
81	Desa Binha Selatan	756.592.000,00	415.945.000,00	1.172.537.000,00	1.172.537.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>68.752.683.000,00</b>	<b>39.026.821.200,00</b>	<b>107.779.504.200,00</b>	<b>107.779.504.200,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa menjadi subyek pembangunan, hal itu menyebabkan aliran dana baik APBD maupun APBN mengalir kepada desa sehingga menimbulkan kewajiban akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan hasil *high level meeting* standar pelaporan keuangan desa tanggal 22 April 2016 di Kementerian Keuangan RI, desa bukan merupakan entitas akuntansi, desa merupakan entitas pelaporan yang artinya desa harus membuat laporan keuangan serta melaporkannya secara mandiri dan terpisah dari laporan keuangan pemerintah daerah hanya saja standar baku sebagai instrumen belum ada. Ringkasan realisasi APBDes per desa dapat dilihat pada Laporan Ikhtisar Realisasi APBDes yang dibuat tersendiri.

Realisasi belanja bantuan keuangan lainnya merupakan bantuan keuangan kepada partai politik dimana terealisasi sebesar Rp177.527.351,00 atau mencapai 73,87% dari target anggaran sebesar Rp240.340.100,00. Adapun partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar Rp108.980.300,00, Partai Golongan Karya (Golkar) sebesar Rp31.548.184,00, Partai Demokrat sebesar Rp15.043.600,00, Partai Persatuan Pembangunan sebesar Rp10.300.767,00 dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sebesar Rp11.654.500,00.

#### 5.1.4. Pembiayaan

##### 5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp23.699.714.677,47 dan terealisasi sebesar Rp23.703.540.331,47 atau sebesar 100,02%, yang diperoleh dari penggunaan SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp23.699.714.677,47 ditambah dengan koreksi SILPA sebesar Rp3.825.654,00. Koreksi SILPA ini terdiri dari koreksi kesalahan pembukuan tahun

sebelumnya dan koreksi SILPA. Koreksi kesalahan tahun sebelumnya merupakan biaya administrasi bank rekening tabungan tahun 2018 yang mengurangi saldo awal kas dana BOS sebesar Rp1.579.822,00 dan penerimaan jasa giro rekening tabungan dan lain-lain pendapatan tahun 2018 yang menambah kembali saldo awal kas dana BOS sebesar Rp8.782,00. Sedangkan koreksi SILPA merupakan koreksi kas di bendahara dana BOS atas pengenaan biaya administrasi dan penutupan rekening tabungan tahun 2019 yang mengurangi saldo kas di bendahara BOS sebesar Rp509.306,00, serta koreksi SILPA atas penghapusan utang PFK Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Akan Merajagih dari Pihak Ketiga sebesar Rp5.906.000,00.

#### 5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Tidak terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan.

#### 5.1.4.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp29.417.521.194,47. Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi pendapatan dengan belanja dan transfer, dengan memperhitungkan pembiayaan netto selama satu tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan	589.100.221.270,00	
Belanja	(473.737.242.968,00)	
Transfer	(109.648.997.439,00)	
<b>Surplus</b>		<b>5.713.980.863,00</b>
Penerimaan Pembiayaan	23.703.540.331,47	
Pengeluaran Pembiayaan	( 0,00)	
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>23.703.540.331,47</b>
<b>SILPA</b>		<b>29.417.521.194,47</b>

#### 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut ini Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019.

Tabel 5.25 Saldo Anggaran Lebih

URAIAN	2019	2018
Saldo Anggaran Lebih Awal	23.699.714.677,47	59.023.736.784,47
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	23.703.540.331,47	58.986.047.128,47
<b>Sub Total</b>	<b>(3.825.654,00)</b>	<b>37.689.656,00</b>
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	29.417.521.194,47	23.699.714.677,47
<b>Sub Total</b>	<b>29.413.695.540,47</b>	<b>23.737.404.333,47</b>

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(1.571.040,00)	(349.656,00)
Lain-lain	0,00	(37.340.000,00)
Koreksi SILPA	5.396.694,00	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>29.417.521.194,47</b>	<b>23.699.714.677,47</b>

Sumber : LPSAL Tahun 2019

Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp23.699.714.677,47 berasal dari SILPA Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun anggaran 2018. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun 2019 sebesar Rp29.417.521.194,47 berasal dari surplus tahun 2019 sebesar Rp5.713.980.863,00 ditambah pembiayaan netto tahun 2019 sebesar Rp23.703.540.331,47 sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah sebesar Rp29.417.521.194,47. Koreksi kesalahan tahun sebelumnya sebesar minus Rp1.571.040,00 diperoleh dari biaya administrasi bank rekening tabungan tahun 2018 yang mengurangi saldo awal kas dana BOS sebesar Rp1.579.822,00 dan penerimaan jasa giro rekening tabungan dan lain-lain pendapatan tahun 2018 yang menambah kembali saldo awal kas dana BOS sebesar Rp8.782,00. Sedangkan koreksi SILPA sebesar Rp5.396.694,00 terdiri koreksi kas di bendahara dana BOS atas pengenaan biaya administrasi dan penutupan rekening tabungan tahun 2019 yang mengurangi saldo kas di bendahara BOS dan SILPA tahun berjalan sebesar Rp509.306,00, serta koreksi SILPA atas penghapusan utang PFK Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan berdasarkan Surat Pernyataan Tidak Akan Menagih dari Pihak Ketiga yang menambah SILPA tahun berjalan sebesar Rp5.906.000,00.

### 5.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

#### 5.3.1. Aset

Secara umum aset Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember 2019 adalah sejumlah Rp1.122.678.222.710,57. Jika dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2018 dengan jumlah Rp1.091.126.480.125,28 dapat dilihat terjadi peningkatan nilai aset sebesar Rp31.551.742.585,29. Jenis aset ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikelompokkan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya, yang lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut.

##### 5.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antar lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Tabel 5.26 Aset Lancar

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Kas di Kas Daerah	28.617.537.311,47	24.305.637.751,47
Kas di Bendahara Penerimaan	9.760.250,00	24.648.724,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	11.400.000,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	333.139.267,00	204.865.919,00
Kas di Bendahara EOS	2.927.502.090,00	97.734.627,00
Kas Lainnya	50.000,00	429.000,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	12.683.188.048,00	5.752.579.745,00
Piutang Lainnya	2.116.200.719,17	0,00
Penyisihan Piutang	(942.282.431,74 )	(882.463.682,03)
Beban Dibayar Dimuka	106.714.674,00	442.012.369,00
Persediaan	38.833.690.918,28	22.889.032.025,25
<b>JUMLAH</b>	<b>84.696.900.846,18</b>	<b>52.834.476.478,69</b>

Sumber : Neraca Tahun 2019

Saldo aset lancar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp84.696.900.846,18. Saldo aset lancar mengalami kenaikan sebesar Rp31.862.424.367,49 jika dibandingkan dengan aset lancar tahun 2018. Kelompok aset lancar sebagaimana tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kas di Kas Daerah

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki 3 (tiga) kas daerah yang ditempatkan pada PT. Bank Sulutgo Cabang Molibagu dalam rangka manajemen kas atas pelaksanaan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada tahun 2019.

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2019 berjumlah sebesar Rp28.617.537.311,47 dari total 3 (tiga) rekening kas daerah. Saldo tersebut merupakan saldo yang telah direkonsiliasi sesuai rekening koran dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.27 Kas di Kas Daerah

NO	BANK NAMA REKENING	NOMOR REKENING	DIBUKA SEJAK	SALDO per 31 Des 2019
1	Bank Sulutgo Cabang Molibagu REKENING PENGELUARAN	030.01.12.000002-0	24/01/2012	400.984.123,00
2	Bank Sulutgo Cabang Molibagu RKUD	030.01.12.000003-3	04/11/2014	28.216.553.188,47
3	Bank Sulutgo Cabang Molibagu REKENING PENERIMAAN	030.01.12.000004-5	05/11/2014	-
<b>JUMLAH</b>				<b>28.617.537.311,47</b>

Sumber : Rekening Koran Per 31 Desember 2019

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Pengelolaan kas di bendahara penerimaan tahun 2019 dilaksanakan secara tunai. Pengelolaan kas di bendahara penerimaan secara tunai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2014 dan perubahannya pada Peraturan Bupati Nomor 482 Tahun 2016. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu bertugas menerima dan menyimpan seluruh penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening penerimaan daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterima, sehingga Pemerintah Daerah tidak mengambil kebijakan pelaksanaan pengelolaan kas di bendahara penerimaan melalui rekening bank.

Saldo kas di bendahara penerimaan merupakan kas di bendahara penerimaan karena alasan tertentu belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, sehingga dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan. Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.760.250,00. Saldo kas di bendahara penerimaan sebagai dimaksud dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.28 Kas di Bendahara Penerimaan**

SKPD	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN/R SUD	RETRIBUSI TERMINAL	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	TOTAL
PUSKESMAS DUMINANGA	573.000,00	-	-	573.000,00
PUSKESMAS ONGGUNOI	330.000,00	-	-	330.000,00
PUSKESMAS MOMALIA	3.745.500,00	-	-	3.745.500,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	2.508.750,00	-	-	2.508.750,00
DINAS PERHUBUNGAN	-	150.000,00	-	150.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	-	-	2.453.000,00	2.453.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>7.157.250,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.453.000,00</b>	<b>9.760.250,00</b>

Sumber : Rincian Saldo Buku Besar Tahun 2019

Saldo kas pada bendahara penerimaan merupakan penerimaan pendapatan daerah pada akhir bulan Desember 2019 yang belum dilakukan penyetoran oleh bendahara penerimaan ke kas daerah atas penerimaan retribusi pelayanan kesehatan/RSUD sebesar Rp7.157.250,00 yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan puskesmas sebesar Rp1.633.500,00, retribusi pelayanan puskesmas pembantu sebesar Rp2.965.000,00, retribusi pelayanan kesehatan puskesmas keliling sebesar Rp50.000,00 dan retribusi pelayanan kesehatan RSUD sebesar Rp2.508.750,00; retribusi terminal sebesar Rp150.000,00 yang merupakan retribusi Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum; serta retribusi pelayanan pasar sebesar Rp2.453.000,00 yang terdiri dari retribusi pelayanan pasar - pelataran sebesar Rp956.000,00, retribusi pelayanan pasar - los sebesar Rp1.287.000,00 dan retribusi pelayanan pasar - kios sebesar Rp210.000,00. Adapun saldo kas pada bendahara penerimaan per 31 Desember 2019 yang telah disetor ke kas daerah pada saat dilakukan rekonsiliasi kas di bendahara penerimaan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5. 29 Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan pada Tahun 2020**

SKPD/Tanggal/STS	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN/R SUD	RETRIBUSI TERMINAL	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	TOTAL
PUSKESMAS DUMINANGA				
22 Januari 2020 / STS Nomor 56-57/STS/PKM-DMG/1/2019	573.000,00	-	-	573.000,00
PUSKESMAS ONGGUNOI				
14 Januari 2020/ STS Nomor 01/STS/PKM-O/1/2020	275.000,00	-	-	275.000,00

SKPD/Tanggal/STS	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN/R SUD	RETRIBUSI TERMINAL	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	TOTAL
24 Januari 2020/ STS Nomor 02/STS/PKM-O/1/2020	55.000,00	-	-	55.000,00
PUSKESMAS MOMALIA				
3 Februari 2020/ STS Nomor 019-022/STS/XI/2019	1.252.500,00	-	-	1.252.500,00
3 Februari 2020/ STS Nomor 021-022/STS/XI/2019	1.252.500,00	-	-	1.252.500,00
3 Februari 2020/ STS Nomor 023-024/STS/XII/2019	1.240.500,00	-	-	1.240.500,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH				
7 Januari 2020/ STS Nomor 1/STS/1.02.10.1/2020	1.568.000,00	-	-	1.568.000,00
8 Januari 2020/ STS Nomor 2/STS/1.02.10.1/2020	940.750,00	-	-	940.750,00
DINAS PERHUBUNGAN				
-	-	150.000,00	-	150.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
22 Januari 2020/ STS Nomor 00001/STS-PAD/3.07.1.1/1/2020	-	-	2.453.000,00	2.453.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>7.157.250,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.453.000,00</b>	<b>9.760.250,00</b>

Sumber : Buku Besar Pembantu Tahun 2019

#### c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun 2019 terdapat kas di bendahara pengeluaran tunai sebesar Rp11.400.000,00. Sisa saldo kas di bendahara pengeluaran tunai tersebut merupakan saldo pada kas bendahara pengeluaran SKPKD atas belanja bantuan sosial lanjut usia sebanyak 3 orang sebesar Rp9.000.000,00 dan disabilitas 1 orang sebesar Rp2.400.000,00 yang tidak ditemukan penerimanya namun belum disetorkan kembali ke Kas Daerah per 31 Desember 2019.

Terhadap bendahara pengeluaran pada SKPD yang lain, seluruhnya telah melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan sisa uang persediaan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan terakhir tahun anggaran 2019. Bendahara pengeluaran juga selaku wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak Pemerintah seperti Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai telah melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan pajak yang dipungut ke Kas Negara per 31 Desember 2019.

#### d. Kas di BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sampai dengan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD sehingga tidak terdapat saldo kas di BLUD.

e. Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Pada FKTP

Kas di bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP merupakan kas atas pengelolaan dana kapitasi untuk mendukung operasional kesehatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah. Dana kapitasi merupakan besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP/Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Dana kapitasi memiliki kekhususan terkait pengelolaannya, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (4) di Peraturan Presiden yang sama dinyatakan bahwa pendapatan dana kapitasi digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP. Setiap pendapatan dan belanja yang dilaksanakan oleh FKTP disajikan pada LRA agar pula memenuhi Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN)/RKUD.

Kas di bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp333.139.267,00. Saldo kas di bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP ini diperoleh dari saldo awal dana kapitasi JKN pada FKTP tahun 2019 sebesar Rp204.865.919,00 ditambah dengan pendapatan dana kapitasi sebesar Rp3.644.688.377,00, lain-lain pendapatan sebesar Rp7.500,00, pengembalian belanja sebesar Rp6.654.500,00 dan utang PFK sebesar Rp27.491.325,00, dikurangi dengan belanja selama tahun 2019 sebesar Rp3.550.568.354,00. Adapun sisa saldo kas di bendahara dana kapitasi JKN dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.30 Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP**

UPTD	SISA KAS TAHUN 2019	UTANG PFK TAHUN 2019			TOTAL
		PPN	PPH 21	PPH 22	
PUSKESMAS MOLIBAGU	9.448.761,00	-	-	-	9.448.761,00
PUSKESMAS DUMINANGA	49.192.764,00	-	-	-	49.192.764,00
PUSKESMAS MILANGODAH	13.364.305,00	-	-	-	13.364.305,00
PUSKESMAS PINOLOSIAN	107.388.541,00	-	-	-	107.388.541,00
PUSKESMAS FIDOW	37.936.696,00	-	-	-	37.936.696,00
PUSKESMAS DUBAGIN	71.216.974,00	-	-	-	71.216.974,00
PUSKESMAS ONGGUNI	-	-	-	-	-
PUSKESMAS MOMALIA	17.099.899,00	13.659.250,00	11.776.925,00	2.055.150,00	44.591.224,00
<b>JUMLAH</b>	<b>305.647.942,00</b>	<b>13.659.250,00</b>	<b>11.776.925,00</b>	<b>2.055.150,00</b>	<b>333.139.267,00</b>

Sumber : Buku Besar Pembantu Tahun 2019.

f. Kas di Bendahara BOS

Dana BOS merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa Dana BOS pada Satdikdas Negeri, maka sisa Dana BOS dicatat sebagai



bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA). Sisa Dana BOS tersebut tidak disetor ke RKUD Kabupaten/Kota dan digunakan oleh Satdikdas Negeri yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS tahun berikutnya.

Kas di bendahara BOS per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.927.502.090,00. Saldo Kas di Bendahara BOS ini terdiri dari Silpa tahun 2019 sebesar Rp2.868.754.547,00 dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang telah diterima oleh bendahara BOS (tunal) selaku wajib pungut akan tetapi belum dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp58.747.543,00. Rincian sisa dana BOS pada bendahara BOS per 31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.31 Kas di Bendahara BOS**

No	Sekolah	Sisa Kas Tahun 2019	Utang PFK Tahun 2019			Total
			PPN	PPH 21	PPH 23	
1	SD Negeri 1 Lion	3.114.905,00	-	-	-	3.114.905,00
2	SD Negeri 2 Lion	66.706.209,00	272.727,00	175.250,00	39.300,00	67.193.486,00
3	SD Negeri Saibuah	78.129.380,00	190.909,00	11.750,00	-	78.332.039,00
4	SD Negeri 1 Meyambang	134.129.139,00	909.090,00	-	75.550,00	135.113.779,00
5	SD Negeri 2 Meyambang	8.424.365,00	969.088,00	337.500,00	108.400,00	9.839.353,00
6	SD Negeri 3 Meyambang	5.420.623,00	499.999,00	116.360,00	46.500,00	6.083.482,00
7	SD Negeri 1 Momalia	8.032.544,00	2.821.818,00	193.005,00	55.656,00	11.103.023,00
8	SD Negeri 2 Momalia	1.907.618,00	2.510.392,00	470.932,00	570.764,00	5.459.706,00
9	SD Negeri 3 Momalia	16.746.607,00	1.428.940,00	37.500,00	270.217,00	18.483.264,00
10	SD Negeri 4 Momalia	5.254.044,00	3.097.279,00	22.500,00	241.502,00	8.615.325,00
11	SD Negeri 1 Sinombayuga	4.450.924,00	1.310.409,00	245.500,00	113.500,00	6.120.333,00
12	SD Negeri 2 Sinombayuga	100.356.785,00	92.946,00	781.500,00	92.504,00	101.323.735,00
13	SD Negeri 3 Sinombayuga	2.139.844,00	-	-	-	2.139.844,00
14	SD Negeri 1 Milangodaa	7.615.454,00	-	-	-	7.615.454,00
15	SD Negeri 2 Milangodaa	80.226.539,00	-	-	-	80.226.539,00
16	SD Negeri Tolutu	410.691,00	-	-	-	410.691,00
17	SD Negeri Pilalahunga	4.231.119,00	1.514.361,00	-	225.600,00	5.971.080,00
18	SD Negeri Botulodu	2.234.604,00	-	-	-	2.234.604,00
19	SD Negeri Sopiata	6.807.900,00	-	-	-	6.807.900,00
20	SD Negeri 1 Tabilaa	3.471.978,00	-	-	-	3.471.978,00
21	SD Negeri 2 Tabilaa	62.748.012,00	-	-	-	62.748.012,00
22	SD Negeri 1 Tolondadu	6.180.056,00	-	-	-	6.180.056,00
23	SD Negeri 2 Tolondadu	80.604.509,00	-	-	-	80.604.509,00
24	SD Negeri Soriana	4.795.810,00	-	-	-	4.795.810,00
25	SD Negeri 1 Molibagu	2.340.227,00	544.455,00	191.250,00	113.843,00	3.189.775,00
26	SD Negeri 2 Molibagu	947.278,00	259.145,00	254.000,00	161.958,00	1.622.381,00
27	SD Negeri 3 Molibagu	4.657.413,00	-	-	-	4.657.413,00
28	SD Negeri Popodu	3.226.423,00	-	-	-	3.226.423,00
29	SD Negeri Toluya	4.254.290,00	-	-	-	4.254.290,00

No	Sekolah	Sisa Kas Tahun 2019	Utang PFK Tahun 2019			Total
			PPN	PPh 21	PPh 23	
30	SD Negeri 1 Salongo	113.721.503,00	-	-	-	113.721.503,00
31	SD Negeri 2 Salongo	140.672.261,00	7.475.616,00	125.000,00	282.714,00	148.555.591,00
32	SD Negeri 3 Salongo	2.459.942,00	272.727,00	258.750,00	113.212,00	3.104.631,00
33	SD Negeri Dudepo	5.416.066,00	204.545,00	-	111.669,00	5.732.280,00
34	SD Negeri Tanggah	76.864.984,00	750.227,00	92.500,00	113.379,00	77.821.090,00
35	SD Negeri Biniha	5.297.898,00	-	-	-	5.297.898,00
36	SD Negeri Duminanga	5.771.256,00	642.673,00	87.500,00	-	6.501.429,00
37	SD Negeri 1 Bakida	5.110.186,00	-	-	-	5.110.186,00
38	SD Negeri 2 Bakida	65.602.213,00	95.454,00	37.500,00	71.250,00	65.806.417,00
39	SD Negeri Motoiohu	3.288.773,00	539.090,00	73.410,00	2.822,00	3.904.095,00
40	SD Negeri Trans Patoa	1.281.898,00	544.950,00	68.750,00	7.650,00	1.903.248,00
41	SD Negeri 1 Linawan	5.728.455,00	827.727,00	-	36.000,00	6.592.182,00
42	SD Negeri 2 Linawan	93.440.976,00	-	-	-	93.440.976,00
43	SD Negeri Iomata	5.850.061,00	-	-	-	5.850.061,00
44	SD Negeri 1 Pinolosian	3.915.619,00	-	-	-	3.915.619,00
45	SD Negeri 2 Pinolosian	4.814.565,00	-	58.750,00	19.602,00	4.892.917,00
46	SD Negeri Nunuh	2.533.285,00	-	-	-	2.533.285,00
47	SD Negeri 1 Kombot	95.404.632,00	681.818,00	283.454,00	57.755,00	96.427.659,00
48	SD Negeri 2 Kombot	98.723.598,00	400.136,00	115.000,00	270.040,00	99.508.774,00
49	SD Negeri Lungkap	3.728.033,00	1.230.408,00	110.000,00	83.319,00	5.151.760,00
50	SD Negeri Matando	8.218.577,00	-	-	-	8.218.577,00
51	SD Negeri 1 Torosik	1.991.561,00	703.754,00	222.500,00	76.799,00	2.994.614,00
52	SD Negeri 2 Torosik	892.017,00	447.431,00	67.500,00	132.473,00	1.539.421,00
53	SD Negeri Adow	61.384.660,00	-	-	-	61.384.660,00
54	SD Negeri Tobryagan	12.691.597,00	204.545,00	160.000,00	45.350,00	13.101.492,00
55	SD Negeri Adov Selatan	4.434.138,00	218.427,00	26.000,00	80.785,00	4.759.350,00
56	SD Negeri Logon	2.096.607,00	-	150.000,00	10.746,00	2.257.353,00
57	SD Negeri 1 Matandai	2.490.946,00	1.368.181,00	22.500,00	117.000,00	3.998.627,00
58	SD Negeri 2 Matandai	92.581.701,00	679.318,00	70.000,00	-	93.331.019,00
59	SD Negeri Dumagin A	7.557.113,00	-	-	-	7.557.113,00
60	SD Negeri Dumagin B	3.308.127,00	-	-	-	3.308.127,00
61	SD Negeri Onggunoi	4.805.128,00	-	-	-	4.805.128,00
62	SD Negeri Dayow	72.655.835,00	-	-	-	72.655.835,00
63	SD Negeri Modisi	4.240.081,00	-	-	-	4.240.081,00
64	SD Negeri Positagon	7.212.512,00	-	-	30.000,00	7.242.512,00
65	SD Negeri Ilig	381.426,00	-	-	50.000,00	431.426,00
66	SD Negeri Pidung	60.244.506,00	-	-	-	60.244.506,00
67	SMPN Mollabau	30.875.920,00	-	-	-	30.875.920,00
68	SMPN Mormalia	410.069.870,00	1.873.863,00	-	1.277.275,00	413.221.008,00

No	Sekolah	Sisa Kas Tahun 2019	Utang PFK Tahun 2019			Total
			PPN	PPH 21	PPH 23	
69	SMPN Bakida	3.674.778,00	-	75.000,00	-	3.749.778,00
70	SMPN Lion	11.723.024,00	117.454,00	180.000,00	35.150,00	12.055.628,00
71	SMPN Milangodas	13.796.929,00	-	-	34.940,00	13.831.869,00
72	SMPN Sinombayuga	8.670.044,00	711.363,00	-	-	9.381.407,00
73	SMPN Tangaqah	9.869.114,00	-	-	-	9.869.114,00
74	SMPN Tonala	7.087.058,00	2.231.364,00	415.000,00	416.873,00	10.150.295,00
75	SMPN Pinoloalan	6.826.800,00	667.945,00	-	63.620,00	7.558.365,00
76	SMPN Adow	171.169.553,00	-	-	-	171.169.553,00
77	SMPN Dumagin	155.136.749,00	1.330.817,00	295.000,00	301.380,00	157.063.946,00
78	SMPN Dayow	1.219.778,00	4.383.720,00	240.000,00	185.360,00	6.028.858,00
79	SMPN Tobayagan	5.797.996,00	-	-	-	5.797.996,00
80	SMPN Kombat	5.109.995,00	-	-	-	5.109.995,00
81	SMP Satap Posilagan	128.838.200,00	443.636,00	147.500,00	24.160,00	129.453.496,00
82	SMP Satap Luwo	85.721.201,00	170.000,00	-	-	85.891.201,00
83	SMP Satap Matjindo	8.461.312,00	681.818,00	30.000,00	11.700,00	9.184.830,00
84	SMPN Pangia	8.328.200,00	-	-	-	8.328.200,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.868.754.547,00</b>	<b>46.320.565,00</b>	<b>6.248.661,00</b>	<b>6.178.317,00</b>	<b>2.927.502.090,00</b>

Sumber : Dinas Pendidikan

#### g. Kas Lainnya

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019 memiliki saldo kas pada Kas Lainnya sebesar Rp50.000,00. Kas Lainnya ini merupakan sisa kas bantuan pemerintah pada Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Penyelenggara Pendidikan Keluarga di Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang belum disetorkan kembali ke kas Negara per 31 Desember 2019.

#### h. Setara Kas

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Per 31 Desember 2019 tidak memiliki setara kas.

#### i. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek ini dapat berupa deposito lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Per 31 Desember 2019 tidak memiliki investasi jangka pendek.

#### j. Piutang Pendapatan

Jumlah piutang pendapatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp12.683.188.048,00. Dibandingkan dengan jumlah piutang di tahun 2018 sebesar Rp5.752.579.745,00, saldo piutang di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp6.930.608.303,00. Saldo piutang per 31 Desember 2019 adalah saldo pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan akan tetapi belum diterima per 31 Desember 2019. Adapun mutasi penambahan dan pengurangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.32 Mutasi Piutang Pendapatan

URAIAN	SALDO AWAL (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
Piutang Pajak Restoran	724.113.801,00	724.113.801,00	178.750.881,00	178.750.881,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	77.956.158,00	77.956.158,00	95.985.489,00	95.985.489,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	877.847.467,00	677.283.341,00	677.215.544,00	877.779.670,00
Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal	626.846.731,00	626.846.731,00	0,00	0,00
Piutang dan Pengembalian	48.522.475,00	42.198.300,00	1.850.000,00	8.174.175,00
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	17.946.000,00	4.000.000,00	0,00	13.946.000,00
Piutang Pendapatan Dana Non Kapitasi	305.116.600,00	301.616.600,00	275.024.900,00	278.524.900,00
Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	5.877.573.591,00	5.877.573.591,00
Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00	2.565.535.185,00	2.565.535.185,00
Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.074.230.513,00	3.074.230.513,00	2.786.918.157,00	2.786.918.157,00
<b>JUMLAH</b>	<b>5.752.579.745,00</b>	<b>5.528.245.444,00</b>	<b>12.458.853.747,00</b>	<b>12.683.188.048,00</b>

Sumber : Buku Besar Pembantu Tahun 2019

Pengurangan piutang pajak restoran sebesar Rp724.113.801,00 merupakan penerimaan pembayaran atas piutang pajak restoran dari PT. Prasmanindo Boga Utama bulan September s.d Desember Tahun 2018 yang diterima pada Rekening Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 28 Januari 2019 sebesar Rp182.824.350,00 dengan STS Nomor 019.a/STS-PD/I/2019, tanggal 20 Februari 2019 sebesar Rp184.438.913,00 dengan STS Nomor 029.a/STS-PD/II/2019, tanggal 26 Februari 2019 sebesar Rp180.054.844,00 dengan STS Nomor 030/STS-PD/II/2019, dan tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp176.795.694,00 dengan STS Nomor 042.a/STS-PD/III/2019. Sedangkan penambahan piutang pajak restoran sebesar Rp178.750.881,00 merupakan pengakuan piutang pajak restoran dari PT. Prasmanindo Boga Utama atas pajak restoran bulan Desember 2019 yang belum diterima per 31 Desember 2019. Piutang pajak restoran bulan Desember 2019 ini telah disetor oleh PT. Prasmanindo Boga Utama pada tanggal 24 Januari 2020 dengan STS Nomor 021.a/STS-PD/I/2020.

Pengurangan piutang pajak penerangan jalan merupakan penerimaan pembayaran atas piutang pajak penerangan jalan dari PT. PLN (Persero) area Kotamobagu bulan Desember TA 2018 sebesar Rp77.956.158,00 yang diterima pada tanggal 16 Januari 2019 dengan STS Nomor 012.a/STS-PD/I/2019. Sedangkan penambahan sebesar Rp95.985.489,00 merupakan pengakuan piutang pajak penerangan jalan dari PT. PLN (Persero) Kotamobagu bulan Desember 2019 yang belum diterima per 31 Desember 2019. Adapun piutang pajak penerangan jalan tersebut telah diterima pembayarannya pada tanggal 16 Januari 2020 dengan STS Nomor 014.a/STS-PD/I/2020.

Saldo piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp877.779.670,00 atau bertambah sebesar Rp67.797,00 dari saldo piutang tahun sebelumnya. Penambahan piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp677.215.544,00 diperoleh dari Penetapan Pendapatan PBB Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan DHKP Tahun 2019. Sedangkan pengurangannya sebesar Rp677.283.341,00 merupakan pelunasan

piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2018 sebesar Rp475.237,00 dan pelunasan piutang untuk masa pajak tahun 2019 sebesar Rp676.808.104,00.

Pengurangan piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta sebesar Rp626.846.731,00 merupakan penerimaan distribusi pembagian deviden dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada PT Eank SulutGo tahun 2018 berdasarkan komposisi modal disetor sebesar 0,36% yang diterima tanggal 26 Maret 2019. Sampai dengan dibuatnya laporan keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum mendapat informasi tentang besaran deviden yang akan diterima pada tahun 2020 atas penyertaan modal tahun 2019.

Piutang dari Pengembalian tahun 2019 sebesar Rp8.174.175,00 merupakan piutang yang disebabkan oleh kelebihan pembayaran SP2D Nomor 4557/SP2D-BL/2010 kepada CV. Cempaka Emas sebesar Rp7.098.600,00 yang seharusnya hanya sebesar Rp744.425,00 Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp6.324.175,00 dan pengakuan piutang atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil yang telah pensiun atas nama Irwan Tubagus sebesar Rp1.850.000,00. Pengurangan piutang sebesar Rp42.198.300,00 merupakan penerimaan pelunasan piutang dari pengembalian kelebihan pembayaran utang jaminan pemeliharaan pekerjaan TA 2018 oleh CV. Mulia sebesar Rp37.340.000,00 dan penerimaan pelunasan piutang kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan bulan November 2018 atas nama Nuzuliyah Puwa sebesar Rp4.858.300,00.

Piutang hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah tahun 2019 sebesar Rp13.946.000,00. Piutang ini merupakan sisa piutang pendapatan dari hasil pemanfaatan kekayaan daerah sewa kantin tahun 2018 a.n. Gustamin Marada sebesar Rp3.746.000,00, Irawati Lamusu sebesar Rp1.746.000,00, Rustam Mahmud sebesar Rp2.746.000,00 dan Hadjis Pakaya sebesar Rp5.708.000,00. Adapun pengurangannya sebesar Rp4.000.000,00 merupakan pelunasan piutang hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp1.000.000,00 atas nama Hadjis Pakaya dan sebesar Rp3.000.000,00 atas nama Irawati Lamusu.

Piutang pendapatan dana non kapitasi tahun 2019 sebesar Rp278.524.900,00. Pengurangan piutang sebesar Rp301.616.600,00 terdiri dari penerimaan pelunasan piutang BPJS untuk klaim dana non kapitasi bulan November s.d Desember 2018 pada RSUD sebesar Rp290.416.600,00, dana non kapitasi Puskesmas Duminanga bulan November s.d Desember tahun 2017 sebesar Rp10.500.000,00 dan dana non kapitasi Puskesmas Molibagu bulan Oktober 2017 sebesar Rp700.000,00. Penambahan piutang pendapatan dana non kapitasi tahun 2019 sebesar Rp275.024.900,00 terdiri dari pengakuan piutang pendapatan dana non kapitasi pada RSUD klaim bulan Agustus 2019 sebesar Rp130.013.900,00 dan klaim bulan September 2019 sebesar Rp134.571.000,00, Puskesmas Milangodaa untuk klaim bulan Juli 2019 sebesar Rp2.100.000,00 dan klaim bulan Agustus 2019 sebesar Rp700.000,00, Puskesmas Molibagu untuk klaim bulan Agustus 2019 sebesar Rp1.400.000,00 dan Puskesmas Momalia untuk klaim bulan Juni 2019 sebesar Rp6.240.000,00.

Piutang bagi hasil pajak tahun 2019 berjumlah sebesar Rp5.877.573.591,00. Piutang tersebut merupakan kurang bayar dana bagi hasil pajak TA 2019 dari pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 sebesar Rp2.400.818.508,00 dan kurang bayar dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat TA 2018 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 sebesar Rp3.476.755.083,00.

Piutang bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam tahun 2019 berjumlah sebesar Rp2.565.535.185,00. Piutang tersebut merupakan kurang bayar dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam TA 2019 dari pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 sebesar Rp2.516.569.767,00 dan kurang bayar dana bagi hasil pajak TA 2018 dari pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 sebesar Rp48.965.418,00

Piutang transfer bagi hasil pajak daerah tahun 2019 sebesar Rp2.786.918.157,00. Pengurangan piutang transfer bagi hasil pajak daerah sebesar Rp3.074.230.513,00 merupakan penerimaan piutang DBH pajak dari Provinsi Sulawesi Utara bulan Oktober 2018 sebesar Rp518.672.710,00, bulan November 2018 sebesar Rp897.158.321,00 dan bulan Desember 2018 sebesar Rp1.012.612.165,00, serta DBH Pajak Rokok Triwulan IV bulan Desember 2018 sebesar Rp645.787.317,00. Sedangkan penambahannya sebesar Rp2.786.918.157,00 terdiri dari :

- Piutang Pendapatan DBH Pajak Provinsi atas kurang bayar bulan Oktober tahun 2019 sebesar Rp419.710,00 berdasarkan Surat Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bulan November 2019 Nomor 971/146-Bapenda tanggal 11 Februari 2020;
- Piutang Pendapatan DBH Pajak Provinsi bulan November tahun 2019 sebesar Rp923.195.079,00 berdasarkan Surat Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bulan November 2019 Nomor 971/146-Bapenda tanggal 11 Februari 2020;
- Piutang Pendapatan DBH Pajak Provinsi bulan Desember tahun 2019 sebesar Rp991.647.948,00 berdasarkan Surat Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Bulan Desember 2019 Nomor 971/103-Bapenda tanggal 17 Februari 2020; dan
- Piutang Pendapatan DBH Pajak Rokok bulan Desember tahun 2019 sebesar Rp871.655.420,00 berdasarkan Surat Penetapan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TW IV Desember 2019 Nomor 971/407-Bapenda tanggal 28 April 2020.

#### k. Piutang Lainnya

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019 memiliki piutang lainnya sebesar Rp2.116.200.719,17. Piutang lainnya ini terdiri dari penyesuaian atas pekerjaan swakelola hibah barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp869.969.900,00, penyesuaian persediaan hibah barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Ipal Komunal yang belum selesai dikerjakan tahun 2018 sebesar Rp360.691.198,66 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, penyesuaian pekerjaan swakelola yang belum selesai fisiknya pada Dinas Pendidikan sebesar Rp698.795.620,51, dan penyesuaian persediaan bahan makanan pokok berupa beras cadangan pangan yang dipinjam oleh pihak pengelola gudang sebesar Rp186.744.000,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

#### l. Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debeturnya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebagai berikut.

**Tabel 5. 33 Kualitas Piutang Tak Tertagih**

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5 %
2	Kurang Lancar	10 %
3	Diragukan	50 %
4	Macet	100 %

Sumber : Peraturan Bupati Kab. Bolaang Mongondow Selatan Nomor 75 Tahun 2019

Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

- Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 tahun dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 2 tahun dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 3 tahun dihitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Saldo penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp900.066.887,85 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.34 Penyisihan Piutang**

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(876.679.147,56)	(855.475.316,29)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	(3.134.233,66)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(9.453.149,50)	(8.482.979,50)
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	(42.215.543,89)	
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	(13.934.590,79)	(15.371.152,58)
<b>JUMLAH</b>	<b>(942.282.431,74)</b>	<b>(882.463.682,03)</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Adapun perhitungan penyisihan piutang dapat dilihat pada Lampiran II Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dalam laporan keuangan ini.

m. **Beban Dibayar Dimuka**

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp106.744.674,00 yang merupakan pembayaran atas beban yang belum menjadi kewajiban sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Saldo beban dibayar dimuka ini terdiri dari pajak kendaraan bermotor dibayar dimuka sebesar Rp69.765.671,00, surat tanda kendaraan bermotor dibayar dimuka sebesar Rp2.035.305,00, sewa gedung/kantor/tempat dibayar dimuka sebesar Rp31.164.383,00, dan sewa gudang dibayar dimuka sebesar Rp3.749.315,00 sebagaimana Tabel 5.33. Rekapitulasi beban dibayar dimuka untuk setiap SKPD dapat dilihat pada Lampiran III dalam Laporan Keuangan ini.

Tabel 5.35 Beban Dibayar Dimuka

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Premi Asuransi Kesehatan	-	258.925.132,00
Pajak Kendaraan Bermotor	69.765.671,00	69.941.943,00
STNK	2.035.305,00	3.345.294,00
Sewa Gedung/Kantor/Tempat	31.164.383,00	43.315.068,00
Sewa Gudang	3.749.315,00	7.854.795,00
Beasiswa Tugas Belajar Profesi	-	58.630.137,00
<b>JUMLAH</b>	<b>106.714.674,00</b>	<b>442.012.369,00</b>

Sumber : Saldo Buku Besar Tahun 2019

n. Persediaan

Persediaan merupakan barang atau perlengkapan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp38.833.690.918,28. Adapun saldo persediaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.36 Persediaan

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Persediaan Alat Tulis Kantor	187.171.000,00	97.388.400,00
Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	7.130.000,00	4.512.500,00
Persediaan Ferengko, materai dan benda pos lainnya	708.000,00	843.100,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	15.159.600,00	22.940.500,00
Persediaan Barang/Bahan Pakai Habis Lainnya	3.654.930.574,00	2.450.256.617,38
Persediaan Bahan obat-obatan	4.652.520.011,94	3.021.361.857,87
Persediaan Bahan Makanan Pokok	243.756.000,00	-
Persediaan Suku Cadang	5.000.000,00	-
Persediaan Barang Cetakn	53.795.831,00	163.564.050,00
Persediaan Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	13.754.075.901,34	8.170.000.000,00
Persediaan Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	236.830.000,00	-
Persediaan Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	16.022.614.000,00	8.953.500.000,00
Persediaan Makanan dan Minuman Kegiatan	-	15.000,00
Persediaan Pakailan kerja lapangan	-	4.650.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>38.833.690.918,28</b>	<b>22.889.032.025,25</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Rincian atas saldo persediaan tersebut selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran IV Persediaan per 31 Desember 2019 pada laporan keuangan ini.

Saldo persediaan tersebut tidak termasuk persediaan yang telah rusak dan kedaluwarsa (*expired*) sebesar Rp385.295.483,88 yang terdiri dari sebagai berikut :

Tabel 5.37 Persediaan Rusak dan Kedaluwarsa

SKPD	Persediaan		Jumlah
	Obat-obatan	Barang Cetakn	
Dinas Kesehatan	212.235.077,00	-	212.235.077,00
Puskesmas Molibagu	10.327.905,10	-	10.327.905,10
Puskesmas Duminanga	20.880.840,78	-	20.880.840,78
Puskesmas Pinolosian	22.519.143,00	-	22.519.143,00
Puskesmas Dumagin	20.577.691,00	-	20.577.691,00



Puskesmas Mangodaa	3.574.580,00		3.574.580,00
Puskesmas Origgunci	21.342.277,00		21.342.277,00
RSUD	73.180.970,00		73.180.970,00
Dinas Kepencudukan, dan Pencatatan Sipil		657.000,00	657.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>384.638.483,88</b>	<b>657.000,00</b>	<b>385.295.483,88</b>

Sumber : Diolah

### 5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Sesuai dengan paragraf 36 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada PT. Bank SulutGo dilakukan dengan menggunakan metode biaya. Dengan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada PT. Bank SulutGo. Penggunaan metode biaya dikarenakan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada PT. Bank SulutGo dibawah 20%. Hasil investasi yang diperoleh berupa deviden tunai diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Tabel 5.38 Rekapitulasi Investasi Jangka Panjang Permanen

URAIAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
Penyertaan Modal Pemda	3.487.034.100,00	3.487.034.100,00	-	-
Investasi Permanen Lainnya	-	-	0,00	
<b>JUMLAH</b>	<b>3.487.034.100,00</b>	<b>3.487.034.100,00</b>	-	-

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Pada APBD tahun 2019 tidak terdapat kebijakan mengenai penambahan nilai investasi pada PT. Bank SulutGo sehingga tidak terdapat penambahan penyertaan modal per 31 Desember 2019.

Sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki investasi jangka panjang sebesar Rp3.487.034.100,00. Investasi tersebut seluruhnya merupakan investasi jangka panjang permanen dalam bentuk penyertaan modal pada PT. Bank SulutGo per 31 Desember 2019. Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari rencana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada PT. Bank SulutGo dengan total sebesar Rp50.000.000.000,00 sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada PT. Bank SulutGo.

Tabel 5.39 Rincian Penyertaan Modal pada PT. Bank SulutGo

URAIAN	JUMLAH
Penyertaan Modal pada PT. Bank SulutGo	
Saham 29.724 lembar x Rp100.000,00	2.972.400.000,00
Agio Saham	514.602.586,00
Saldo Dana Setoran Modal	31.514,00
<b>JUMLAH</b>	<b>3.487.034.100,00</b>

Sumber : Diolah

Sesuai dengan Laporan Keuangan PT. Bank SulutGo per 31 Desember 2019 yang telah di audit oleh *Certified Public Accountants* Hadori Sugiarto Adi & Rekan, jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember 2019 sebanyak 29.724 lembar dengan nominal Rp2.972.400.000,00 sebesar 0,31% dari komposisi kepemilikan, agio saham sebesar Rp514.602.586,00, dan saldo

Dana Setoran Modal (DSM) yang tidak mencukupi konversi 1 (satu) lembar saham sebesar Rp31.514,00. Rincian perhitungan Penyertaan Modal pada PT. Bank SulutGo dapat dilihat pada Lampiran V laporan keuangan ini.

Berdasarkan hasil keputusan RUPS tanggal 2 Maret 2020 sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah RUPS Tahunan PT Bank SulutGo Nomor 1 tanggal 2 Maret 2020 disetujui pembagian laba bersih tahun buku 2019 sebesar 75% dari Rp150.341.123.626,00 yaitu sejumlah Rp112.755.842.719,00 dibagikan kepada pemegang saham dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mendapatkan deviden sebesar Rp354.053.346,00.

Disamping itu pula, keputusan RUPS tersebut sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah RUPS Tahunan PT Bank SulutGo Nomor 2 tanggal 2 Maret 2020, menyetujui untuk mengesahkan DSM beberapa pemegang saham dan telah dipindahbukukan pada tanggal 18 Maret 2020 yang mempengaruhi komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menjadi sebesar 0,30% dengan jumlah lembar dan nominal saham yang sama yaitu 29.724 sebesar Rp2.972.400.000,00.

### 5.3.1.3. Aset Tetap

Pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus utama dikarenakan aset tetap memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dalam neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah. Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap diklasifikasi berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, aset tetap dapat dibagi menjadi 6 klasifikasi dan disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.40 Aset Tetap

URAIAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	20.246.551.095,00	18.739.557.525,00	1.506.993.570,00	8,04%
Peralatan dan Mesin	189.408.619.446,26	170.637.014.559,74	18.771.604.886,52	11,00%
Gedung dan Bangunan	370.731.868.917,66	348.184.673.507,66	22.547.195.410,00	6,48%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	871.252.711.502,91	817.082.254.786,91	54.170.456.716,00	6,63%
Aset Tetap lainnya	13.054.938.296,00	13.032.569.726,00	22.368.570,00	0,17%
Konstruksi dalam Pengerjaan	44.759.793.016,49	40.876.038.502,00	3.883.754.514,49	9,50%
Akumulasi Penyusutan	(509.170.206.827,54)	(405.605.852.026,69)	(103.564.354.000,85)	25,53%
<b>JUMLAH</b>	<b>1.000.284.275.446,78</b>	<b>1.002.946.255.780,62</b>	<b>(2.661.980.333,84)</b>	<b>-0,27%</b>

Sumber : Neraca Tahun 2019

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap tahun 2018 sebesar Rp1.002.946.255.780,62, aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp2.661.980.333,84 atau 0,27% pada tahun 2019 sehingga saldo aset tetap per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.000.284.275.446,78. Penurunan aset tetap pada tahun 2019 berasal dari penambahan sebesar Rp140.164.343.150,36 dan pengurangan sebesar Rp142.826.323.484,20. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada aset berikut.

**Tabel 5.41 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap**

URAIAN	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN 2019
Belanja modal aset tetap	93.210.597.555,00	-
Penerimaan hibah aset tetap	12.876.616.406,20	-
Penyesuaian belanja barang dan jasa	279.905.378,00	4.960.000,00
Koreksi aset tetap	738.446,00	981.313.082,00
Koreksi saldo awal aset tetap	245.565.000,00	116.357.400,00
Mutasi aset tetap antar SKPD	11.956.689.472,99	11.956.689.472,99
Reklasifikasi aset tetap	16.492.284.880,49	16.492.284.880,49
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya	-	4.522.155.499,68
Reklasifikasi aset tetap ke piutang lainnya	-	698.795.620,51
Penyesuaian utang pengadaan aset tetap	1.602.831.150,00	990.298.666,00
Akumulasi penyusutan aset tetap	3.499.114.861,68	107.063.468.862,53
<b>JUMLAH</b>	<b>140.164.343.150,36</b>	<b>142.826.323.484,20</b>

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2019

Dari rincian penambahan dan pengurangan aset tetap sebagaimana tabel diatas mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Belanja modal aset tetap terdiri dari penambahan sebesar Rp93.210.597.555,00. Penambahan tersebut berasal dari :
  - Realisasi SP2D sebesar Rp92.056.935.935,00.
  - SPB Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp859.819.000,00.
  - SP2B Dana Kapitasi JKN sebesar Rp293.842.620,00.
2. Penerimaan hibah aset tetap sebesar Rp12.876.616.406,20 terdiri dari :
  - Penerimaan hibah dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI sebesar Rp985.163.000,00.
  - Penerimaan hibah dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.433.600.000,00
  - Penerimaan hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahap IV sebesar Rp202.039.020,00 sesuai dengan Berita Acara nomor 020/B.02/BKD/726/XI/2019 dan 900/1002/BPKPD/XI/2019 tanggal 1 November 2019. Pada berita acara tersebut Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow juga menyerahkan 12 (dua belas) bidang tanah yang namun belum memiliki nilai. Penyerahan 12 (dua belas) bidang tanah dimaksud merupakan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2018 dimana terdapat tanah yang diatasnya berdiri bangunan sekolah dan puskesmas pembantu namun belum memiliki nilai. Terhadap penyerahan 12 bidang tanah yang belum memiliki nilainya tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan penilaian menggunakan metode pendekatan Nilai Jual Objek Pajak setempat berdasarkan tahun perolehan awal tanah sesuai dengan surat Sekretaris Daerah nomor 100/6354/Setda/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 sebesar Rp620.259.550,00 sehingga total hibah aset tetap dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahap IV dicatat pada Neraca sebesar Rp822.298.570,00.

Hibah aset tetap dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara.

Sesuai pasal 14 ayat (1) dan ayat (7) disebutkan bahwa penyerahan aset dilakukan terhadap barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Total hibah aset tetap yang akan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan, dan Dokumentasi Kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan nomor 130/Setdakab/01/43/XII/2008 dan Keputusan Bupati Bupati Bolaang Mongondow nomor 156 Tahun 2012 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Yang Akan Diserahkan Kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tercatat sebanyak 4.823 unit dengan nilai sebesar Rp59.875.569.948,00.

Berdasarkan hasil verifikasi, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebelumnya telah menerima hibah aset tetap :

- 1) Tahap I sebesar Rp3.593.692.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 020/D.03/DPPKAD/89/V/2015 dan 30/HK.BOLSEL/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 serta Surat Keterangan Koreksi Nilai nomor 020/D.03/DPPKAD/43/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.
- 2) Tahap II sebesar Rp10.797.725.308,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 024/B.01/BKD/75/IV/2017 dan nomor 29/HK.BOLSEL/IV/2017 tanggal 18 April 2017.
- 3) Tahap III sebesar Rp7.972.849.490,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 012/B.02/BKD/252/VIII/2017 dan nomor 100/206/HK.BOLSEL/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017.

Sehingga total hibah Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebesar Rp22.566.305.818,00 (Rp3.593.692.000,00 + Rp10.797.725.308,00 + Rp7.972.849.490,00 + Rp202.039.020,00).

Sedangkan sisa hibah aset tetap dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar Rp37.309.264.130,00 (Rp59.875.569.948,00 - Rp22.566.305.818,00) belum dapat diterima berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian aset tetap yang akan dihibahkan tidak diketahui keberadaannya dan terdapat pula barang habis pakai/dikonsumsi dalam operasi pemerintahan berupa bahan (*materials*)/perlengkapan (*supplies*) yang tidak memenuhi klasifikasi sebagai aset tetap. Sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, rusak berat, dan salah catat aset tetap berasal dari barang habis pakai terlebih dahulu dilakukan koreksi maupun penghapusan sebelum dihibahkan sehingga keandalan pengakuan aset tetap dapat terukur pada saat diterima atau diserahkan hak pemilikannya dan atau pada saat penguasaanya berpindah baik dari sisi pemberi maupun penerima.

- Penerimaan hibah berupa tanah dari masyarakat Desa Lion sebesar Rp67.500.000,00.
- Penerimaan hibah dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI sebesar Rp663.000.000,00.
- Penerimaan hibah dari PT Bank Pembangunan Sulawesi Utara Gorontalo sebesar Rp155.000.000,00.

- Penerimaan hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp420.613.000,00.
  - Penerimaan hibah barang yang didalamnya terdapat aset tetap dari Direktorat Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp43.014.043,20.
  - Penerimaan hibah dari Kementerian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp2.286.427.793,00.
3. Penyesuaian belanja barang dan jasa terdiri dari penambahan sebesar Rp279.905.378,00 dan pengurangan sebesar Rp4.960.000,00. Penambahan dan pengurangan tersebut terdiri atas :
- Penambahan penyesuaian belanja barang dan jasa berasal dari :
    - 1) Atribusi/kapitalisasi biaya perolehan aset tetap sebesar Rp182.578.378,00.
    - 2) Penyesuaian belanja hibah barang yang diperuntukan bagi sekolah negeri sebesar Rp43.417.000,00.
    - 3) Penyesuaian belanja barang dan jasa yang merupakan aset tetap sebesar Rp53.910.000,00.
  - Pengurangan penyesuaian belanja barang dan jasa berasal dari belanja modal yang didalamnya terdapat barang habis pakai sebesar Rp4.960.000,00.
4. Koreksi aset tetap terdiri dari penambahan sebesar Rp738.446,00 dan pengurangan sebesar Rp981.313.082,00. Penambahan dan pengurangan tersebut terdiri dari :
- Penambahan koreksi aset tetap berasal dari koreksi atribusi biaya pengiriman barang antar rincian obyek belanja sebesar Rp738.446.
  - Pengurangan koreksi aset tetap berasal dari :
    - 1) Belanja modal dibawah satuan minimum kapitalisasi sebesar Rp851.368.786,00.
    - 2) Belanja modal yang diserahkan ke sekolah swasta sebesar Rp89.576.850,00.
    - 3) Penerimaan hibah dibawah minimum kapitalisasi sebesar Rp33.965.000,00.
    - 4) Penerimaan hibah berupa barang habis pakai sebesar Rp5.664.000,00.
    - 5) Koreksi atribusi biaya pengiriman barang antar rincian obyek belanja sebesar Rp738.446.
5. Koreksi saldo awal aset tetap terdiri dari penambahan yang berasal dari penerimaan hibah tahun sebelumnya yang belum dicatat sebesar Rp245.565.000,00 dan pengurangan yang berasal dari kekeliruan penyajian aset tetap tahun sebelumnya sebesar Rp116.357.400,00.
6. Mutasi aset tetap antar SKPD sebesar Rp11.956.689.472,99 terdiri dari :
- Mutasi aset tetap dari Bagian Humas ke Bagian Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp89.441.290,00 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Sekretariat Daerah sesuai dengan Berita Acara Mutasi Barang Milik Daerah nomor 100/Setda/007/XII/2019.
  - Mutasi aset tetap dari Dinas Pendidikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.762.686.082,99 sesuai Berita Acara Penyerahan Aset Milik Daerah nomor 985/C.01/DISDIK/BOLSEL/X/2019.

- Mutasi aset tetap dari Dinas Pendidikan ke Kecamatan Bolaang Uki sebesar Rp897.421.300,00 sesuai Berita Acara Penyerahan Aset Milik Daerah nomor 990/C.01/DISDIK/BOLSEL/X/2019.
  - Mutasi aset tetap dari Dinas Pendidikan ke Kecamatan Pinolosian sebesar Rp796.356.000,00 sesuai Berita Acara Penyerahan Aset Milik Daerah nomor 986/C.01/DISDIK/BOLSEL/X/2019.
  - Mutasi aset tetap dari Dinas Pendidikan ke Kecamatan Pinolosian Tengah sebesar Rp854.550.000,00 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Aset Milik Daerah nomor 989/C.01/DISDIK/BOLSEL/X/2019.
  - Mutasi aset tetap dari Dinas Pendidikan ke Kecamatan Pinolosian Timur sebesar Rp841.954.000,00 sesuai Berita Acara Penyerahan Aset Milik Daerah nomor 988/C.01/DISDIK/BOLSEL/X/2019.
  - Mutasi aset tetap dari Dinas Pendidikan ke Kecamatan Posigadan sebesar Rp787.103.000,00 sesuai Berita Acara Penyerahan Aset Milik Daerah nomor 987/C.01/DISDIK/BOLSEL/X/2019.
  - Mutasi aset tetap dari Dinas Pertanian ke Dinas Perikanan sebesar Rp927.177.800,00.
7. Reklasifikasi aset tetap sebesar Rp16.492.284.880,40 terdiri dari :
- Reklasifikasi konstruksi dalam pengerjaan baik atas pekerjaan yang telah selesai maupun yang belum selesai sebesar Rp15.594.313.564,49.
  - Reklasifikasi antar aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah sebesar Rp897.971.316,00.
8. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya terdiri dari pengurangan sebesar Rp4.522.155.499,68 yang berasal dari :
- Reklasifikasi aset yang telah rusak berat tahun 2019 sebesar Rp4.335.540.499,68.
  - Reklasifikasi aset yang merupakan masterplan atau dokumen perencanaan makro sebesar Rp186.615.000,00.
9. Reklasifikasi aset tetap ke piutang lainnya terdiri dari pengurangan sebesar Rp698.795.620,51 berasal dari pekerjaan swakelola yang telah dibayar 100% namun belum selesai fisiknya.
10. Penyesuaian utang pengadaan aset tetap terdiri dari penambahan sebesar Rp1.602.331.150,00 yang merupakan pengakuan utang atas pekerjaan yang fisiknya melebihi realisasi keuangan termasuk pekerjaan yang telah selesai namun belum dibayarkan 100%, sedangkan pengurangan sebesar Rp990.298.666,00 berasal dari belanja modal yang merupakan pembayaran/pelunasan utang aset tetap tahun-tahun sebelumnya.
11. Akumulasi penyusutan aset tetap terdiri dari penambahan sebesar Rp3.499.114.861,68 dan pengurangan sebesar Rp107.063.468.862,53. Penambahan dan pengurangan tersebut terdiri atas :
- Penambahan akumulasi penyusutan aset tetap berasal dari :
    - 1) Koreksi saldo awal sebesar Rp38.957.314,00 akibat penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri

sebagaimana dimaksud berdampak terhadap perubahan kebijakan akuntansi dari sisi klasifikasi struktur Bagan Akun Standar maupun dari sisi masa manfaat aset tetap, sehingga penyusutan aset tetap perlu dilakukan penghitungan kembali.

- 2) Mutasi antar SKPD sebesar minus Rp713.591.735,00.
  - 3) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp4.173.749.282,68.
- Pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap berasal dari :
- 1) Beban penyusutan aset tetap tahun 2019 sebesar Rp106.924.168.028,53.
  - 2) Koreksi saldo awal sebesar Rp852.892.569,53 akibat penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud berdampak terhadap perubahan kebijakan akuntansi dari sisi klasifikasi struktur Bagan Akun Standar maupun dari sisi masa manfaat aset tetap, sehingga penyusutan aset tetap perlu dilakukan penghitungan kembali.
  - 3) Mutasi antar SKPD sebesar minus Rp713.591.735,00.

a. Tanah

Tabel 5.42 Tanah

URAIAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	20.246.551.095,00	18.739.557.525,00	1.506.993.570,00	8,04%

Sumber : Neraca Tahun 2019

Tanah yang termasuk dalam aset tetap sesuai PSAP 07 Paragraf 08 adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Tabel 5.43 Rincian Tanah

JENIS	NILAI
Tanah	20.246.551.095,00
Tanah persil	10.924.193.345,00
Tanah bangunan perumahan/g.tempat tinggal	1.246.028.800,00
Tanah untuk bangunan ged.perdagangan/perusahaan	2.234.273.720,00
Tanah untuk bangunan industri	51.050.000,00
Tanah untuk bangunan tempat kerja	7.338.994.725,00
Tanah untuk bangunan tempat ibadah	53.846.100,00
Tanah non persil	1.171.903.300,00
Tanah basah	470.000.000,00
Tanah kering	566.903.300,00
Tanah tandus	135.000.000,00
Lapangan	8.150.454.450,00
Tanah lapangan olah raga	1.268.583.000,00
Tanah untuk jalan	6.211.937.500,00
Tanah untuk bangunan air	211.276.950,00
Tanah untuk bangunan instalasi	50.000.000,00
Tanah untuk bangunan jaringan	12.652.500,00
Tanah untuk bangunan bersejarah	164.830.000,00
Tanah untuk taman	175.332.500,00
Tanah kampung	55.842.000,00

Sumber : Neraca BMD Tahun 2019

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap tanah tahun 2018 sebesar Rp18.739.557.525,00, aset tetap tanah mengalami kenaikan sebesar Rp1.506.953.570,00 atau 8,04% pada tahun 2019 sehingga saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp20.246.551.095,00. Kenaikan aset tetap tanah tahun 2019 diperoleh dari penambahan sebesar Rp3.682.756.370,00 dan pengurangan sebesar Rp2.175.762.800,00. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap tanah sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.44 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah**

URAIAN	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN 2019
Belanja modal aset tetap	638.545.000,00	-
Penerimaan hibah aset tetap	868.298.570,00	-
Penyesuaian belanja barang dan jasa	-	-
Koreksi aset tetap	-	-
Koreksi saldo awal aset tetap	150.000,00	-
Mutasi aset tetap antar SKPD	2.175.762.800,00	2.175.762.800,00
Reklasifikasi aset tetap	-	-
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya	-	-
Reklasifikasi aset tetap ke piutang lainnya	-	-
Penyesuaian utang pengadaan aset tetap	-	-
Akumulasi penyusutan aset tetap	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>3.682.756.370,00</b>	<b>2.175.762.800,00</b>

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2019

Dari rincian penambahan dan pengurangan aset tetap tanah sebagaimana tabel diatas mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Belanja modal aset tetap tanah terdiri dari penambahan sebesar Rp638.545.000,00 yang berasal dari realisasi SP2D yang berasal dari :
  - Atribusi penimbunan lapangan olahraga desa Soguo sebesar Rp473.715.000,00 pada Dinas Pendidikan.
  - Pengadaan tanah untuk monumen pemekaran sebesar Rp115.000.000 dan atribusi penilaian harga tanah pembangunan monumen pemekaran sebesar Rp49.830.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
2. Penerimaan hibah aset tetap tanah sebesar Rp868.298.570,00 terdiri dari :
  - Penerimaan hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahap IV sebesar Rp180.539.020,00 sesuai dengan Berita Acara nomor 020/B.02/BKD/726/XI/2019 dan 900/1002/BPKPD/XI/2019 tanggal 1 November 2019 serta penilaian 12 (dua belas) bidang tanah sebesar Rp620.259.550,00 sesuai dengan surat Sekretaris Daerah nomor 100/6354/Setda/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019.
  - Penerimaan hibah berupa tanah dari masyarakat Desa Llon sesuai dengan Berita Acara nomor 145/07/DL/PSG/BOL-SEL/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 sebesar Rp67.500.000,00 yang dicatat pada Dinas Pendidikan. Nilai hibah aset tetap tanah diperoleh dari penilaian dengan menggunakan metode pendekatan Nilai Jual Objek Pajak setempat berdasarkan tahun perolehan awal tanah sesuai dengan surat Sekretaris Daerah nomor 100/6354/Setda/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 dikarenakan tanah



tersebut belum memiliki nilai pada saat dihibahkan.

3. Koreksi saldo awal aset tetap tanah terdiri dari penambahan yang berasal dari penerimaan hibah tahun 2016 yang belum dicatat dari Direktorat Jenderal Perkebunan Satker Dekonsentrasi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp150.000,00 sesuai dengan Berita Acara nomor 2233/PL.130/E/12/2016 tanggal 30 Desember 2016.
4. Mutasi aset tetap tanah antar SKPD sebesar Rp2.175.762.800,00 terdiri dari :
  - Mutasi aset tetap dari Dinas Pendidikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.268.583.000,00,
  - Mutasi aset tetap dari Dinas Pertanian ke Dinas Perikanan sebesar Rp907.179.800,00.

b. Peralatan dan Mesin

**Tabel 5.45 Peralatan dan Mesin**

URAIAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
<b>ASET TETAP</b>				
Peralatan dan Mesin	189.408.619.446,26	170.637.014.559,74	18.771.604.886,52	11,00%

Sumber : Neraca Tahun 2019

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 10, peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

**Tabel 5.46 Rincian Peralatan dan Mesin**

JENIS	NILAI
Alat besar	9.869.631.810,00
Alat besar darat	9.637.602.810,00
Grador	1.907.180.000,00
Excivator	3.365.000.000,00
Hauler	1.328.556.985,00
Compacting equipment	1.358.465.825,00
Loader	1.678.400.000,00
Alat batu	232.029.000,00
Condressor	94.820.000,00
Pompa	125.209.000,00
Peralatan sar mountenering	12.000.000,00
Alat angkutan	60.260.141.977,00
Alat angkutan darat bermotor	53.761.482.784,00
Kendaraan dinas bermotor perorangan	24.706.853.322,00
Kendaraan bermotor penumpang	3.566.648.630,00
Kendaraan bermotor angkutan barang	4.064.021.500,00
Kendaraan bermotor beroda dua	8.202.800.932,00
Kendaraan bermotor khusus	12.921.257.247,00
Alat angkutan darat bermotor lainnya	299.901.153,00
Alat angkutan darat tak bermotor	296.269.100,00
Kendaraan tak bermotor angkutan barang	220.280.000,00
Kendaraan tak bermotor penumpang	75.989.100,00
Alat angkutan apung bermotor	5.056.421.093,00
Alat angkutan apung bermotor untuk penumpang	4.515.624.093,00
Alat angkutan apung bermotor khusus	540.797.000,00
Alat angkutan apung tak bermotor	1.145.969.000,00

JENIS	NILAI
Alat angkutan apung tak bermotor untuk penumpang	1.145.969.000,00
Alat bengkel dan alat ukur	1.428.809.204,00
Alat bengkel bermesin	42.858.300,00
Perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi	2.015.000,00
Perkakas bengkel service	2.800.000,00
Perkakas bengkel kayu	32.760.000,00
Perkakas pabrik es	5.283.300,00
Alat bengkel tak bermesin	56.926.807,00
Perkakas bengkel konstruksi logam	9.750.000,00
Perkakas bengkel listrik	3.666.000,00
Perkakas standard (standard tools)	12.700.330,00
Perkakas bengkel kerja	27.140.677,00
Peralatan ukur, gip dan feeling	3.669.800,00
Alat ukur	1.329.024.097,00
Alat ukur universal	363.953.950,00
Universal tester	16.653.000,00
Alat ukur/pembanding	14.428.770,00
Alat ukur lain-lain	80.654.119,00
Alat timbangan/biara	853.134.258,00
Alat pertanian	1.410.796.887,00
Alat pengolahan	1.410.796.887,00
Alat pengolahan tanah dan tanaman	281.338.200,00
Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak	148.249.800,00
Alat panen	44.883.850,00
Alat penyimpan hasil percobaan pertanian	323.950.537,00
Alat laboratorium pertanian	63.990.000,00
Alat pasca panen	181.533.000,00
Alat produksi perikanan	212.251.500,00
Alat-alat peternakan	102.020.000,00
Alat pengolahan lainnya	52.580.000,00
Alat kantor dan rumah tangga	30.738.114.918,05
Alat kantor	5.149.387.383,96
Mesin ketik	30.022.500,00
Mesin hitung/mesin jumlah	12.455.000,00
Alat penyimpan perlengkapan kantor	2.892.222.473,00
Alat kantor lainnya	2.214.687.410,96
Alat rumah tangga	21.127.808.192,47
Meubelair	9.114.524.006,32
Alat pengukur waktu	27.950.000,00
Alat pembersih	537.669.500,00
Alat pendingin	3.473.878.669,72
Alat dapur	542.685.800,00
Alat rumah tangga lainnya (home use)	7.131.632.106,43
Alat pemadam kebakaran	299.468.110,00
Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	4.460.919.341,63
Meja kerja pejabat	1.599.551.775,00
Meja rapat pejabat	22.300.000,00
Kursi kerja pejabat	2.026.009.480,00
Kursi rapat pejabat	181.826.200,00
Kursi hadap depan meja kerja pejabat	12.000.000,00
Kursi tamu di ruangan pejabat	35.950.500,00
Lemari dan arsip pejabat	583.281.386,63
Alat studio, komunikasi dan pemancar	7.543.743.349,00
Alat studio	2.960.883.696,00
Peralatan studio audio	1.289.859.640,00
Peralatan studio video dan film	1.566.275.396,00
Peralatan cetak	32.577.960,00
Peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah	72.170.700,00

JENIS	NILAI
Alat komunikasi	574.077.740,00
Alat komunikasi telephone	236.554.440,00
Alat komunikasi radio ssb	90.025.000,00
Alat komunikasi radio hf/fm	28.457.000,00
Alat komunikasi radio vhf	59.100.000,00
Alat komunikasi sosial	159.941.300,00
Peralatan pemancar	4.008.781.913,00
Peralatan antena mf/mw	1.150.000,00
Peralatan antena shf/parabola	102.500.000,00
Peralatan antena penerima vhf	4.460.000,00
Sumber tenaga	3.900.671.913,00
Alat kedokteran dan kesehatan	35.843.121.890,20
Alat kedokteran	35.707.733.187,20
Alat kedokteran umum	15.335.940.082,20
Alat kedokteran gigi	545.535.387,00
Alat kedokteran keluarga berencana	763.386.117,00
Alat kedokteran bedah	2.539.342.140,00
Alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan	2.768.334.546,00
Alat kedokteran tht	38.564.800,00
Alat kedokteran mata	370.398.934,00
Alat kedokteran bagian penyakit dalam	4.265.105.225,00
Alat kedokteran anak	961.052.322,00
Alat kedokteran poliklinik	657.870.908,00
Alat kesehatan rehabilitasi medis	60.780.160,00
Alat kedokteran neurologi (syaraf)	483.092.740,00
Alat kedokteran jantung	647.460,00
Alat kedokteran radiodiagnostic	914.700.000,00
Alat kedokteran nuklir	681.190.656,00
Alat kedokteran gawat darurat	5.321.791.710,00
Alat kesehatan umum	135.388.703,00
Alat kesehatan olah raga	135.388.703,00
Alat laboratorium	16.822.232.087,90
Unit alat laboratorium	4.518.949.724,00
Alat laboratorium kimia air teknik penyehatan	174.651.550,00
Alat laboratorium micro biologi teknik penyehatan	59.004.500,00
Alat laboratorium hidrokimia	2.750.000,00
Alat laboratorium model hidrolika	38.500.000,00
Alat laboratorium bahan bangunan konstruksi	4.291.479,00
Alat laboratorium mekanika tanah dan batuan	1.977.800,00
Alat laboratorium umum	306.266.290,00
Alat laboratorium microbiologi	449.880.000,00
Alat laboratorium kimia	117.000.000,00
Alat laboratorium patologi	2.045.230.000,00
Alat laboratorium imunologi	79.600.000,00
Alat laboratorium hematologi	334.600.000,00
Alat laboratorium film	16.928.300,00
Alat laboratorium makanan	21.292.184,00
Alat laboratorium farmasi	351.028.292,00
Alat laboratorium pembuatan pola	15.250.000,00
Alat laboratorium proses teknologi keramik	3.770.000,00
Alat laboratorium uji keramik	45.000.000,00
Alat laboratorium pertanian	99.097.555,00
Alat laboratorium elektronika dan daya	3.065.000,00
Alat laboratorium lingkungan perairan	9.999.000,00
Alat laboratorium biologi perairan	23.690.000,00
Laboratorium kearsipan	23.159.524,00
Alat laboratorium lain	292.918.250,00
Unit alat laboratorium kimia nuklir	17.464.000,00

JENIS	NILAI
Laboratory safety equipment	17.464.000,00
Alat peraga praktek sekolah	8.522.254.474,00
Alat peraga praktek sekolah bidang studi : bahasa indonesia	2.821.668.818,00
Alat peraga praktek sekolah bidang studi : matematika	257.546.003,00
Alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar	5.939.406,00
Alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan	188.894.136,00
Alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa menengah	1.414.448.465,00
Alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa atas	91.422.336,00
Alat peraga praktek sekolah bidang studi : ips	109.501.309,00
Alat peraga praktek sekolah bidang studi : keterampilan	2.387.608.600,00
Alat peraga praktek sekolah bidang studi : kesenian	797.194.233,00
Alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga	233.752.568,00
Alat peraga praktek sekolah bidang studi : pkn	18.000.000,00
Alat peraga kejuruan	196.278.600,00
Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika	122.291.700,00
Modular counting and scientific electronic	90.000.000,00
Recorder display	32.291.700,00
Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan	274.500.000,00
Meteorological equipment	274.500.000,00
Radiation application and non destructive testing laboratory lainnya	3.000.000,00
Peralatan hidrologi	3.000.000,00
Alat laboratorium lingkungan hidup	3.146.422.190,00
Laboratorium lingkungan	28.197.650,00
Alat laboratorium penunjang	3.118.224.540,00
Peralatan laboratorium hydrodinamica	217.349.999,90
Data acquisition and analyzing system	207.999.999,90
Peralatan umum	9.350.000,00
Alat persenjataan	481.514.225,00
Persenjataan non senjata api	449.279.225,00
Alat keamanan	445.556.000,00
Non senjata api	3.723.225,00
Alat khusus kepolisian	32.235.000,00
Alat dalmas/alat dakhura	32.235.000,00
Komputer	23.473.542.482,10
Komputer unit	19.320.616.703,50
Komputer jaringan	1.831.026.168,60
Personal komputer	17.489.590.534,90
Peralatan komputer	4.152.925.778,60
Peralatan mainframe	125.083.200,00
Peralatan mini komputer	271.766.800,00
Peralatan personal komputer	2.507.503.613,20
Peralatan jaringan	1.177.607.065,40
Peralatan komputer lainnya	70.965.100,00
Alat keselamatan kerja	638.999.300,00
Alat sarung	638.999.300,00
Alat pendukung pencarian	638.999.300,00
Rambu - rambu	324.488.590,00
Rambu-rambu lalu lintas darat	324.488.590,00
Rambu bersuar	229.963.590,00
Rambu tidak bersuar	94.525.000,00
Peralatan olah raga	573.482.726,00
Peralatan olah raga	573.482.726,00
Peralatan permainan	74.437.500,00
Peralatan senam	57.908.596,00
Peralatan olah raga air	65.981.630,00
Peralatan olah raga lainnya	375.155.000,00

Sumber : Neraca BMD Tahun 2019

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap peralatan dan mesin tahun 2018 sebesar Rp170.637.014.559,74, aset tetap peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp18.771.604.886,52 atau 11,00% pada tahun 2019 sehingga saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp189.408.619.446,26. Kenaikan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2019 diperoleh dari penambahan sebesar Rp23.896.409.778,20 dan pengurangan sebesar Rp5.124.804.891,68. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.47 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

URAIAN	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN 2019
Belanja modal aset tetap	18.807.122.512,00	-
Penerimaan hibah aset tetap	3.568.054.836,20	-
Penyesuaian belanja barang dan jasa	169.995.378,00	4.960.000,00
Koreksi aset tetap	738.446,00	564.727.102,00
Koreksi saldo awal aset tetap	232.950.000,00	-
Mutasi aset tetap antar SKPD	219.577.290,00	219.577.290,00
Reklasifikasi aset tetap	897.971.316,00	-
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya	-	4.335.540.499,68
Reklasifikasi aset tetap ke piutang lainnya	-	-
Penyesuaian utang pengadaan aset tetap	-	-
Akumulasi penyusutan aset tetap	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>23.896.409.778,20</b>	<b>5.124.804.891,68</b>

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2019

Dari rincian penambahan dan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana tabel diatas mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

- Belanja modal aset tetap peralatan dan mesin terdiri dari penambahan sebesar Rp93.210.597.555,00. Penambahan tersebut berasal dari :
  - Realisasi SP2D sebesar Rp17.653.460.892,00.
  - SPB Dana Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp859.819.000,00.
  - SP2B Dana Kapitasi JKN sebesar Rp293.842.620,00.
- Penerimaan hibah aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp3.568.054.836,20 yang terdiri dari :
  - Penerimaan hibah berupa 2 (dua) unit Bus Sekolah Ukuran Sedang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp663.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor KU.003/149/I/BASTO-AO/BS/SATKER-DAMM/2019 tanggal 15 Januari 2019.
  - Penerimaan hibah yang bersumber dari dana *Corporate Social Responsibility* PT Bank Pembangunan Sulawesi Utara Gorontalo kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berupa pembelian 5 (lima) unit kontainer sampah sebesar Rp155.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Pemindahbukuan Dana *Corporate Social Responsibility* Tahun 2019 nomor 006a/A/MLBG/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.
  - Penerimaan hibah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp420.613.000,00 yang diberikan kepada :

- 1) SMPN Momalia sebesar Rp210.306.500,00 berupa 3 (tiga) unit peralatan jaringan sebesar Rp3.520.000,00, 8 (delapan) unit peralatan personal komputer sebesar Rp28.251.500,00, 21 (dua puluh satu) unit peralatan studio visual sebesar Rp6.460.000,00, 20 (dua puluh) unit personal komputer sebesar Rp149.600.000,00, dan 1 (satu) unit server komputer sebesar Rp22.475.000,00.
  - 2) SMPN Pinolosian sebesar Rp210.306.500,00 berupa 3 (tiga) unit peralatan jaringan sebesar Rp3.520.000,00, 8 (delapan) unit peralatan personal komputer sebesar Rp28.251.500,00, 21 (dua puluh satu) unit peralatan studio visual sebesar Rp6.460.000,00, 20 (dua puluh) unit personal komputer sebesar Rp149.600.000,00, dan 1 (satu) unit server komputer sebesar Rp22.475.000,00.
- Penerimaan hibah barang yang didalamnya terdapat aset tetap peralatan dan mesin dari Direktorat Kesehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp43.014.043,20 sesuai dengan berita acara sebagai berikut :
- 1) Berita Acara nomor KN.02.03/BIII.5/2019 dan TU.02.01/5/3561/2019 sebesar Rp10.087.400,00.
  - 2) Berita Acara nomor KN.01.01/2/PPK-Antropometri/00129/2019 sebesar Rp32.926.643,20.
- Penerimaan hibah berupa Kapal Banawa Nusantara 48 dari Kementerian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp2.286.427.793,00 sesuai dengan Berita Acara nomor PL.301/14/2/DJPL/2019 dan 10/NPHD-HK/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.
3. Penyesuaian belanja barang dan jasa terdiri dari penambahan sebesar Rp169.995.378,00 dan pengurangan sebesar Rp4.960.000,00. Penambahan dan pengurangan tersebut terdiri atas :
    - Penambahan penyesuaian belanja barang dan jasa berasal dari :
      - 1) Atribusi/kapitalisasi biaya perolehan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp124.578.378,00 berupa biaya pengiriman alat kedokteran umum sebesar Rp67.279.410,00, alat kedokteran mata sebesar Rp724.500,00, alat kedokteran bedah sebesar Rp47.459.450,00, alat kedokteran kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan sebesar Rp2.000.000,00, alat kedokteran poliklinik set sebesar Rp5.459.000,00, alat kedokteran penderita cacat tubuh sebesar Rp1.656.018,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.
      - 2) Penyesuaian belanja hibah barang yang diperuntukan kepada TK Negeri Pembina Salongo sebesar Rp43.417.000,00. Berupa alat peraga/praktek sekolah bidang studi keterampilan sebesar Rp3.608.000,00, alat peraga/praktek sekolah bidang studi keterampilan lain-lain sebesar Rp39.809.000,00.
      - 3) Penyesuaian belanja barang dan jasa yang merupakan aset tetap yang bersumber dari dana Bantuan Operasional sekolah sebesar Rp2.000.000,00 berupa 1 (satu) buah busa UKS sebesar Rp500.000 di SDN Saibuah, 1 (satu) buah dispenser sebesar Rp500.000,00 di SDN 1 Meyambanga, dan 2 (dua) buah terpal tenda sebesar Rp1.000.000,00 di

SDN 3 Momalia.

- Pengurangan penyesuaian belanja barang dan jasa berasal dari belanja modal yang didalamnya terdapat barang habis pakai sebesar Rp4.960.000,00 berupa kabel pada Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp3.160.000,00 dan bendera hias yang bersumber dari belanja dana BOS pada SDN Dumagin sebesar Rp1.800.000,00.
4. Koreksi aset tetap peralatan dan mesin terdiri dari penambahan sebesar Rp738.446,00 dan pengurangan sebesar Rp564.727.102,00. Penambahan dan pengurangan tersebut terdiri dari :
- Penambahan koreksi aset tetap berasal dari koreksi atribusi biaya pengiriman barang antar rincian obyek belanja sebesar Rp738.446 pada Dinas Pendidikan.
  - Pengurangan koreksi aset tetap berasal dari :
    - 1) Belanja modal dibawah satuan minimum kapitalisasi sebesar Rp488.749.656,00 pada SKPD Kecamatan Tomini sebesar Rp2.300.000,00, Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp2.742.500,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp93.141.018,00, RSUD sebesar Rp377.705.882,00, Puskesmas Milangodaa sebesar Rp2.250.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp9.610.256,00, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Keuangan Daerah sebesar Rp1.000.000,00.
    - 2) Belanja modal yang diserahkan ke sekolah swasta sebesar Rp69.575.000,00 berupa 1 (satu) set komputer server pada SMP Cokroaminoto dan SMP Muhammadiyah Molibagu masing-masing sebesar Rp32.812.500,00, 1 (satu) buah alat pengukur tinggi badan pada SMP PGRI Motandoi sebesar Rp1.250.000,00, dan 2 (buah) gitar akustik pada SMPN Pinolosian sebesar Rp2.700.000,00.
    - 3) Penerimaan hibah yang merupakan barang habis pakai sebesar Rp5.664.000,00 pada SMPN Momalia dan SMPN Pinolosian masing-masing berupa peralatan personal komputer sebesar Rp892.500,00, peralatan jaringan sebesar Rp179.500,00, dan peralatan studio visual sebesar Rp1.760.000,00.
    - 4) Koreksi atribusi biaya pengiriman barang antar rincian obyek belanja sebesar Rp738.446 pada Dinas Pendidikan.
5. Koreksi saldo awal aset tetap terdiri dari penambahan yang berasal dari penerimaan hibah tahun sebelumnya yang belum dicatat sebesar Rp232.950.000,00 berupa Mobil Perlindungan Anak (MOLIN) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Berita Acara nomor 79/D.III.5/PL.06/BAST-MOLIN/12/2018 tanggal 31 Desember 2019.
6. Mutasi aset tetap peralatan dan mesin antar SKPD sebesar Rp89.441.290,00 terdiri dari :
- Mutasi aset tetap dari Bagian Humas ke Bagian Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp89.441.290,00.
  - Mutasi aset tetap dari Dinas Pendidikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp110.138.000,00.

- Mutasi aset tetap dari Dinas Pertanian ke Dinas Perikanan sebesar Rp19.998.000,00.
7. Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin terdiri dari penambahan sebesar Rp897.971.316,00 berdasarkan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Penambahan tersebut merupakan reklasifikasi dengan rincian sebagai berikut :
- Reklasifikasi yang berasal dari aset tetap lainnya berupa alat bercorak kebudayaan dan peralatan olahraga sebesar Rp573.482.726,00 pada SKPD Kecamatan Pinolosian Tengah sebesar Rp7.800.000,00, Dinas Pariwisata sebesar Rp177.381.630,00, Bagian Umum sebesar Rp27.500.000,00, dan Dinas Pendidikan sebesar Rp360.801.096,00.
  - Reklasifikasi yang berasal dari aset tetap gedung dan bangunan berupa rambu-rambu sebesar Rp324.488.590,00 pada SKPD Dinas Perhubungan sebesar Rp229.963.590,00 dan Bagian Umum sebesar Rp94.525.000,00.
8. Reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya terdiri dari pengurangan sebesar Rp4.522.155.499,68 yang berasal dari reklasifikasi aset yang telah rusak berat tahun 2019 pada SKPD sebagai berikut :
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp51.511.166,68.
  - Kecamatan Pinolosian sebesar Rp57.298.983,00.
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp6.494.000,00.
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp30.700.000,00.
  - Dinas Sosial sebesar Rp65.997.500,00.
  - Kecamatan Pinolosian Timur sebesar Rp2.090.000,00.
  - Bagian Umum sebesar Rp3.475.448.850,00.
  - Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp299.700.000,00.
- c. Gedung dan Bangunan

**Tabel 5.48 Gedung dan Bangunan**

URAIAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
<b>ASET TETAP</b>				
Gedung dan Bangunan	370.731.868.917,66	348.184.673.507,66	22.547.195.410,00	6,48%

Sumber : Neraca Tahun 2019

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 9, gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, dan museum.

Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok aset tetap tanah.



Tabel 5.49 Rincian gedung dan bangunan

JENIS	NILAI
Bangunan gedung	354.581.551.917,66
Bangunan gedung tempat kerja	338.664.066.119,66
Bangunan gedung kantor	107.055.985.253,78
Bangunan gudang	6.970.504.064,89
Bangunan gedung instalasi	1.546.460.100,00
Bangunan gedung laboratorium	6.815.073.496,00
Bangunan kesehatan	27.825.322.752,00
Bangunan gedung tempat ibadah	15.164.106.000,00
Bangunan gedung tempat pertemuan	3.850.479.413,26
Bangunan gedung tempat pendidikan	78.322.560.225,12
Bangunan gedung tempat olah raga	19.752.673.602,99
Bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar	33.193.239.545,00
Bangunan gedung untuk pos jaga	910.137.900,00
Bangunan gedung garasi/pool	49.780.000,00
Bangunan gedung perpustakaan	10.272.711.401,86
Bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara	94.997.000,00
Bangunan pengujian kelaikan	1.530.300.000,00
Bangunan peternakan/perikanan	658.669.000,00
Bangunan gedung tempat kerja lainnya	21.244.700.344,76
Bangunan gedung pabrik	2.461.055.000,00
Bangunan gedung tempat kerja lainnya	945.311.000,00
Bangunan gedung tempat tinggal	15.917.485.798,00
Rumah negara golongan I	3.847.044.999,00
Rumah negara golongan II	2.020.598.000,00
Rumah negara golongan III	7.255.843.885,00
Mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan	977.793.577,00
Asrama	1.751.744.337,00
Flat/umah susun	64.461.000,00
Monumen	3.735.771.000,00
Candi/tugu peringatan/prasasti	3.735.771.000,00
Tugu	2.079.168.000,00
Bangunan peninggalan	1.656.603.000,00
Tugu titik kontrol/pasti	12.414.546.000,00
Tugu/tanda batas	12.414.546.000,00
Tugu/tanda batas administrasi	2.852.121.500,00
Pagar	9.418.277.500,00
Tugu/tanda batas lainnya	144.147.000,00

Sumber : Neraca BMD Tahun 2019

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap gedung dan bangunan tahun 2018 sebesar Rp348.184.673.507,66, aset tetap gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp22.547.195.410,00 atau 6,48% pada tahun 2019 sehingga saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp370.731.868.917,66. Kenaikan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2019 diperoleh dari penambahan sebesar Rp42.316.872.283,99 dan pengurangan sebesar Rp19.769.676.873,99. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.50 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

URAIAN	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN 2019
Belanja modal aset tetap	25.854.664.401,00	-
Penerimaan hibah aset tetap	1.006.663.000,00	-
Penyesuaian belanja barang dan jasa	-	-
Koreksi aset tetap	-	33.965.000,00

URAIAN	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN 2019
Koreksi saldo awal aset tetap	12.465.000,00	-
Mutasi aset tetap antar SKPD	9.561.349.382,99	9.561.349.382,99
Reklasifikasi aset tetap	5.881.730.500,00	8.678.001.004,49
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya	-	-
Reklasifikasi aset tetap ke piutang lainnya	-	698.795.620,51
Penyesuaian utang pengadaan aset tetap	-	797.565.866,00
Akumulasi penyusutan aset tetap	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>42.316.872.283,99</b>	<b>19.769.676.873,99</b>

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2019

Dari rincian penambahan dan pengurangan aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana tabel diatas mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Belanja modal aset tetap gedung dan bangunan terdiri dari penambahan sebesar Rp93.210.597.555,00 yang berasal dari realisasi SP2D sebesar Rp92.056.935.935,00.
2. Penerimaan hibah aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.006.663.000,00 terdiri dari :
  - Penerimaan hibah bangunan Pasar Tradisional Desa Toluaya dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan Berita Acara nomor 174/BAST/Dp.3/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 sebesar Rp985.163.000,00.
  - Penerimaan hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahap IV sebesar Rp21.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara nomor 020/B.02/BKD/726/XI/2019 dan 900/1002/BPKPD/XI/2019 tanggal 1 November 2019 berupa 4 (unit) bangunan rumah dinas sebesar Rp8.500.000,00 dan 1 (satu) unit bangunan tempat pertemuan lain-lain sebesar Rp13.000.000,00.
3. Koreksi saldo awal aset tetap gedung dan bangunan terdiri dari penambahan yang berasal dari penerimaan hibah tahun sebelumnya yang belum dicatat berupa 2 (dua) unit bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp12.465.000,00 dari Direktorat Jenderal Perkebunan Satker Dekonsentrasi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Berita Acara nomor BA.2233/PL.130/E/2016 tanggal 30 Desember 2016.
4. Koreksi aset tetap gedung dan bangunan terdiri dari pengurangan sebesar Rp33.965.000,00. Pengurangan tersebut berasal dari penerimaan hibah dibawah minimum kapitalisasi berupa 2 (dua) unit bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp12.465.000,00 dari Direktorat Jenderal Perkebunan Satker Dekonsentrasi Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara dan 4 (unit) bangunan rumah dinas sebesar Rp8.500.000,00 dan 1 (satu) unit bangunan tempat pertemuan lain-lain sebesar Rp13.000.000,00 dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Mutasi aset tetap gedung dan bangunan antar SKPD sebesar Rp9.561.349.382,99 terdiri dari :
  - Mutasi aset tetap dari Dinas Pendidikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp5.383.965.082,99.

- Mutasi aset tetap dari Dinas Pendidikan ke Kecamatan Bolaang Uki sebesar Rp897.421.300,00.
  - Mutasi aset tetap dari Dinas Pendidikan ke Kecamatan Pinolosian sebesar Rp796.356.000,00.
  - Mutasi aset tetap dari Dinas Pendidikan ke Kecamatan Pinolosian Tengah sebesar Rp854.550.000,00.
  - Mutasi aset tetap dari Dinas Pendidikan ke Kecamatan Pinolosian Timur sebesar Rp841.954.000,00.
  - Mutasi aset tetap dari Dinas Pendidikan ke Kecamatan Posigadan sebesar Rp787.103.000,00.
6. Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan terdiri dari penambahan sebesar Rp5.881.730.500,00 dan pengurangan sebesar Rp8.678.001.004,49 yang berasal dari dari :
- Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi sebesar Rp5.881.730.500,00 :
    1. Reklasifikasi dari aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang fisiknya telah selesai berupa pembangunan Gereja Oikumene di Panango sebesar Rp3.584.494.000,00, pembangunan Pura di Panango sebesar Rp1.775.700.000,00 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
    - 2) Reklasifikasi dari aset tetap konstruksi dalam pengerjaan atas kapitalisasi biaya perencanaan pembangunan Taman Masjid di Panango sebesar Rp29.678.000,00 dan kapitalisasi biaya perencanaan pembangunan Taman Gereja Oikumene di Panango sebesar Rp29.400.000,00 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
    - 3) Reklasifikasi dari aset tetap konstruksi dalam pengerjaan yang fisiknya telah selesai berupa Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata di Panango sebesar Rp462.458.500,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
  - Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi sebesar Rp8.678.001.004,49 :
    - 1) Reklasifikasi ke aset tetap konstruksi dalam pengerjaan atas pekerjaan rehabilitasi Kantor Bupati Bolaang Mongondow Selatan yang belum dapat dimanfaatkan dan memiliki lanjutan pekerjaan di tahun 2020 sebesar Rp3.379.416.000,00 pada Bagian Umum.
    - 2) Reklasifikasi ke aset tetap konstruksi dalam pengerjaan atas atribusi biaya perencanaan pembangunan Islamic Center yang belum selesai pembangunannya sebesar Rp331.375.000,00 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
    - 3) Reklasifikasi ke aset tetap konstruksi dalam pengerjaan atas 20 (dua puluh) paket pekerjaan swakelola yang belum selesai fisiknya sebesar Rp3.665.567.414,49 pada Dinas Pendidikan.
    - 4) Reklasifikasi ke aset tetap konstruksi dalam pengerjaan atas atribusi biaya perencanaan pembangunan kolam renang Objek Wisata Botulidu sebesar Rp49.780.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
    - 5) Reklasifikasi ke aset tetap konstruksi dalam pengerjaan atas pembangunan Asrama Mahasiswa Putra di Gorontalo tahap I yang masih

memiliki lanjutan pekerjaan sebesar Rp927.374.000,00 pada Dinas Pendidikan.

- 6) Reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin berupa rambu-rambu sebesar Rp324.488.590,00 berdasarkan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
7. Reklasifikasi aset tetap gedung dan bangunan ke piutang lainnya terdiri dari pengurangan sebesar Rp698.795.620,51 yang berasal dari 20 (dua puluh) paket pekerjaan swakelola yang telah dibayar 100% namun belum selesai fisiknya pada Dinas Pendidikan.
8. Penyesuaian utang pengadaan aset tetap gedung dan bangunan terdiri dari pengurangan sebesar Rp797.565.866,00 yang merupakan pembayaran/pelunasan utang aset tetap tahun-tahun sebelumnya atas pekerjaan sebagai berikut :
  - Pembangunan Tugu Perbatasan Daerah Pinolosian Tengah tahun 2018 sebesar Rp151.470.000,00 dan Pembangunan Tugu Perbatasan Daerah Pinolosian Timur tahun 2018 sebesar Rp178.300.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
  - 1 (satu) paket pekerjaan tahun 2013 sebesar Rp49.950.000,00, 1 (satu) paket pekerjaan tahun 2014 sebesar Rp37.137.750,00, dan 26 (dua puluh enam) paket pekerjaan tahun 2018 sebesar Rp172.367.000,00 pada Dinas Pendidikan.
  - Kapitalisasi biaya konsultasi pengawasan peningkatan pembangunan Pasar Pinolosian tahun 2018 sebesar Rp24.950.000,00, kapitalisasi biaya konsultasi pengawasan pembangunan Pasar Soguo tahun 2018 sebesar Rp49.860.000,00, dan kapitalisasi biaya pengawasan pembangunan gedung Pasar Momalia tahun 2018 sebesar Rp29.940.000,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Dari total nilai gedung dan bangunan yang tercatat pada neraca, terdapat 1 (satu) buah bangunan berupa rumah adat kayu semi permanen sebesar Rp279.478.000,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Bangunan tersebut dibangun diatas lahan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di lokasi pameran Kayuwatu – Mapangget yang akan dialihfungsikan untuk pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata Modern. Berdasarkan surat Gubernur Sulawesi Utara nomor 030/19.6680/Sekr-BKAD tanggal 5 Agustus 2019 dan nomor 030.19.8932/Sekr-BKAD tanggal 16 September 2019, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memerintahkan agar Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan pembongkaran dan penghapusan paling lambat 23 September 2019, namun sampai dengan dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan belum melakukan pembongkaran bangunan tersebut dengan pertimbangan penentuan lokasi pemindahan bangunan yang tepat di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

**Tabel 5.51 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

URAIAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
<b>ASET TETAP</b>				
Jalan, Irigasi dan Jaringan	871.252.711.502,91	817.082.254.786,91	54.170.456.716,00	6,63%

Sumber : Neraca Tahun 2019

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 11, jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok aset tetap tanah.

**Tabel 5.52 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan**

JENIS	NILAI
Jalan dan jembatan	686.022.886.460,91
Jalan	657.173.396.904,91
Jalan kabupaten	359.235.127.573,65
Jalan desa	278.398.288.210,26
Jalan khusus	19.539.981.121,00
Jembatan	28.849.489.556,00
Jembatan pada jalan kabupaten	17.217.259.556,00
Jembatan pada jalan desa	10.418.228.000,00
Jembatan pada jalan khusus	1.214.002.000,00
Bangunan air	144.450.456.725,00
Bangunan air irigasi	65.976.439.564,00
Bangunan waduk irigasi	527.254.620,00
Bangunan pengambilan irigasi	31.363.437.382,00
Bangunan pembawa irigasi	32.069.730.862,00
Bangunan pengaman irigasi	1.063.168.700,00
Bangunan pelengkap irigasi	952.848.000,00
Bangunan pengaliran pasang surut	520.147.000,00
Bangunan pengaman pasang surut	520.147.000,00
Bangunan pengembangan rawa dan polder	439.878.000,00
Bangunan pelengkap pengembangan rawa	439.878.000,00
Bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam	54.690.264.661,00
Bangunan pembawa pengaman sungai/pantai	249.515.000,00
Bangunan pembuang pengaman sungai	14.233.377.741,00
Bangunan pengaman pengaman sungai/pantai	39.199.658.920,00
Bangunan pelengkap pengaman sungai	1.007.713.000,00
Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	1.198.320.000,00
Bangunan pembawa pengembangan sumber air	1.198.320.000,00
Bangunan air bersih/air baku	21.142.631.500,00
Bangunan waduk air bersih/air baku	12.160.551.500,00
Bangunan pengambilan air bersih/air baku	1.490.683.000,00
Bangunan pembawa air bersih/air baku	5.796.132.000,00
Bangunan pelengkap air bersih/air baku	134.567.000,00
Bangunan air bersih/air baku lainnya	1.560.698.000,00
Bangunan air kotor	482.776.000,00

JENIS	NILAI
Bangunan pembawa air kotor	282.969.000,00
Bangunan pelengkap air kotor	199.807.000,00
Instalasi	32.155.620.357,00
Instalasi air bersih / air baku	13.598.009.000,00
Instalasi air sumber / mata air	5.074.783.000,00
Instalasi air tanah dangkal	468.000.000,00
Instalasi air bersih / air baku lainnya	8.055.226.000,00
Instalasi air kotor	1.270.900.000,00
Instalasi air buangan domestik	1.270.900.000,00
Instalasi pengolahan sampah	10.110.350.000,00
Instalasi pengolahan sampah organik	7.433.600.000,00
Instalasi pengolahan sampah non organik	2.676.750.000,00
Instalasi pembangkit listrik	1.536.655.000,00
Instalasi pembangkit listrik tenaga surya (plts)	1.536.655.000,00
Instalasi gardu listrik	836.809.600,00
Instalasi gardu listrik induk	594.238.250,00
Instalasi pusat pengatur listrik	242.571.350,00
Instalasi pertahanan	4.448.553.007,00
Instalasi pertahanan di darat	4.448.553.007,00
Instalasi pengamanan	354.343.750,00
Instalasi pengamanan penangkal petir	354.343.750,00
Jaringan	8.623.747.960,00
Jaringan air minum	8.524.972.960,00
Jaringan pembawa	6.740.374.960,00
Jaringan induk distribusi	1.784.598.000,00
Jaringan listrik	98.775.000,00
Jaringan distribusi	98.775.000,00

Sumber : Neraca BMD Tahun 2019

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun 2018 sebesar Rp817.082.254.786,91, aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp54.170.456.716,00 atau 6,63% pada tahun 2019 sehingga saldo aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp871.252.711.502,91. Kenaikan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan tahun 2019 diperoleh dari penambahan sebesar Rp55.908.875.166,00 dan pengurangan sebesar Rp1.783.418.450,00. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.53 Rincian Penambahan dan Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan**

URAIAN	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN 2019
Belanja modal aset tetap	46.983.703.366,00	-
Penerimaan hibah aset tetap	7.433.600.000,00	-
Penyesuaian belanja barang dan jasa	-	-
Koreksi aset tetap	-	-
Koreksi saldo awal aset tetap	-	-
Mutasi aset tetap antar SKPD	-	-
Reklasifikasi aset tetap	-	1.359.070.650,00
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya	-	186.615.000,00
Reklasifikasi aset tetap ke piutang lainnya	-	-
Penyesuaian utang pengadaan aset tetap	1.491.571.800,00	192.732.800,00
Akumulasi penyusutan aset tetap	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>55.908.875.166,00</b>	<b>1.738.418.450,00</b>

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2019

Dari rincian penambahan dan pengurangan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana tabel diatas mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Belanja modal aset tetap jalan, jaringan dan irigasi terdiri dari penambahan yang berasal dari realisasi SP2D sebesar Rp46.983.703.366,00.
2. Penerimaan hibah aset tetap jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp7.433.600.000,00 terdiri dari penerimaan hibah bangunan Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbunan Desa Pinolantungan sebesar Rp6.953.100.000,00, dan bangunan Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lainnya Desa Molibagu Dusun III sebesar Rp480.500.000,00 dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor 355.2/BA/DC/2019 dan 119/769/IX/2019 tanggal 10 September 2019.
3. Reklasifikasi aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi terdiri dari pengurangan sebesar Rp1.359.070.650,00 yang berasal dari pekerjaan yang direklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan sebagai berikut :
  - Reklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan atas pekerjaan pembangunan Jembatan Kuala Asam Desa Adow Tahap I sebesar Rp720.791.000,00 dan Pembangunan Jembatan Desa Tonala Tahap I yang masih memiliki lanjutan pekerjaan dan belum dapat dimanfaatkan sebesar Rp630.469.650,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
  - Reklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan berupa atribusi biaya perencanaan pembangunan talud SDN Iligon sebesar Rp7.810.000,00 pada Dinas Pendidikan.
4. Reklasifikasi aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi ke aset lainnya terdiri dari pengurangan sebesar Rp186.615.000,00 yang merupakan masterplan atau dokumen perencanaan makro database jaringan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
5. Penyesuaian utang pengadaan aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi terdiri dari penambahan sebesar Rp1.491.571.800,00 dan pengurangan sebesar Rp192.732.800,00 yang berasal dari :
  - Penambahan aset dari penyesuaian pengakuan utang atas pekerjaan yang fisiknya melebihi realisasi keuangan termasuk pekerjaan yang telah selesai namun belum dibayarkan 100% sebesar Rp1.491.571.800,00 berasal dari pekerjaan pembangunan jalan kebun Desa Motandoi Selatan sebesar Rp324.408.150,00, pembangunan jalan kebun Desa Nunuka Raya sebesar Rp989.649.000,00, dan pembangunan SPAM perdesaan Desa Nunuk sebesar Rp177.514.650,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
  - Pengurangan aset dari penyesuaian pengakuan utang sebesar Rp192.732.800,00 berasal dari belanja modal yang merupakan pembayaran/pelunasan utang aset tetap tahun-tahun sebelumnya berasal dari pekerjaan pelunasan dan pemasangan baru jaringan listrik Pabrik Es Desa Tanggah tahun 2018 sebesar Rp167.762.800,00 pada Dinas Perikanan dan atribusi biaya konsultasi pengawasan pembangunan drainase Pasar Adow tahun 2018 sebesar Rp24.970.000,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

e. Aset Tetap Lainnya

**Tabel 5.54 Aset Tetap Lainnya**

URAIAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
<b>ASET TETAP</b>				
Aset Tetap lainnya	13.054.938.296,00	13.032.569.726,00	22.368.570,00	0,17%

Sumber : Neraca Tahun 2019

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 12, aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam klasifikasi aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi atas aset tetap yang bukan menjadi hak milik.

**Tabel 5.55 Rincian Aset Tetap Lainnya**

JENIS	NILAI
Bahan perpustakaan	5.544.406.410,00
Bahan perpustakaan tercetak	5.437.931.410,00
Buku umum	5.130.545.910,00
Buku agama	10.270.000,00
Buku ilmu sosial	6.747.000,00
Buku ilmu bahasa	27.020.000,00
Buku matematika dan pengetahuan alam	214.951.000,00
Buku ilmu pengetahuan praktis	6.920.000,00
Buku arsitektur, kesenian, olah raga	40.045.500,00
Buku geografi, biografi, sejarah	1.432.000,00
Bahan perpustakaan terakam dan bentuk mikro	39.875.000,00
Audio visual	39.875.000,00
Karya grafika (graphic material)	66.600.000,00
Karya grafika (graphic material)	66.600.000,00
Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga	579.006.000,00
Barang bercorak kesenian	276.159.000,00
Alat musik	276.159.000,00
Alat bercorak kebudayaan	302.847.000,00
Maket, miniatur, replika, foto dokumen dan benda bersejarah	3.982.000,00
Barang kerajinan	298.865.000,00
Tanaman	893.911.600,00
Tanaman	893.911.600,00
Tanaman	893.911.600,00
Aset tetap dalam renovasi	6.037.614.286,00
Aset tetap dalam renovasi	6.037.614.286,00
Aset tetap dalam renovasi	6.037.614.286,00

Sumber : Neraca BMD Tahun 2019

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap lainnya tahun 2018 sebesar Rp13.032.569.726,00, aset tetap lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp22.368.570,00 atau 0,17% pada tahun 2019 sehingga saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp13.054.938.296,00. Kenaikan aset tetap lainnya tahun 2019 diperoleh dari penambahan sebesar Rp978.472.276,00 dan pengurangan



sebesar Rp956.103.706,00. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.56 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya**

URAIAN	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN 2019
Belanja modal aset tetap	926.562.276,00	-
Penerimaan hibah aset tetap	-	-
Penyesuaian belanja barang dan jasa	51.910.000,00	-
Koreksi aset tetap	-	382.620.980,00
Koreksi saldo awal aset tetap	-	-
Mutasi aset tetap antar SKPD	-	-
Reklasifikasi aset tetap	-	573.482.726,00
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya	-	-
Reklasifikasi aset tetap ke piutang lainnya	-	-
Penyesuaian utang pengadaan aset tetap	-	-
Akumulasi penyusutan aset tetap	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>978.472.276,00</b>	<b>956.103.706,00</b>

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2019

Dari rincian penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya sebagaimana tabel diatas mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Belanja modal aset tetap lainnya terdiri dari penambahan yang berasal dari realisasi SP2D sebesar Rp926.562.276,00.
2. Penyesuaian belanja barang dan jasa terdiri dari penambahan sebesar Rp51.910.000,00 yang berasal dari belanja dana BOS yang merupakan buku kurikulum 2013 kelas 4 SD.
3. Koreksi aset tetap lainnya terdiri dari pengurangan sebesar Rp382.620.980,00. Pengurangan tersebut terdiri dari :
  - Belanja modal dibawah satuan minimum kapitalisasi sebesar Rp362.619.130,00.
    - 1) Pengadaan buku ilmu pengetahuan sebesar R2.185.000,00 pada Dinas Perpustakaan.
    - 2) Pengadaan buku koleksi perpustakaan SD sebesar Rp336.823.380,00, pengadaan buku koleksi perpustakaan SMP sebesar Rp6.880.000,00, dan pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sebesar Rp16.730.750,00 pada Dinas Pendidikan.
  - Belanja modal yang diserahkan ke sekolah swasta sebesar Rp20.001.850,00 yang berasal dari pengadaan buku ujian akhir SMP/MTs sebesar Rp6.248.000,00, pengadaan buku ujian akhir SD/MI sebesar Rp2.490.900,00, pengadaan peralatan seni budaya SMP sebesar Rp4.730.000,00, dan pengadaan sarana pendidikan jasmani olahraga sebesar Rp6.532.950,00 pada Dinas Pendidikan.
4. Reklasifikasi aset tetap lainnya terdiri dari pengurangan sebesar Rp573.482.726 yang merupakan reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin berupa barang bercorak kebudayaan dan peralatan olahraga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.



f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

**Tabel 5.57 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

URAIAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
<b>ASET TETAP</b>				
Konstruksi dalam Pengerjaan	44.759.793.016,49	40.876.038.502,00	3.883.754.514,49	9,50%

Sumber : Neraca Tahun 2019

Sesuai dengan PSAP 08 Paragraf 6, konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode tertentu dan belum selesai.

Jika dibandingkan dengan saldo konstruksi dalam pengerjaan tahun 2018 sebesar Rp40.876.038.502,00, konstruksi dalam pengerjaan mengalami kenaikan sebesar Rp3.883.754.514,49 atau 9,50% pada tahun 2019 sehingga saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp44.759.793.016,49. Kenaikan saldo konstruksi dalam pengerjaan tahun 2019 diperoleh dari penambahan sebesar Rp9.881.842.414,49 dan pengurangan sebesar Rp5.998.087.900,00. Adapun rincian penambahan dan pengurangan konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.58 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan**

URAIAN	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN 2019
Belanja modal aset tetap	-	-
Penerimaan hibah aset tetap	-	-
Penyesuaian belanja barang dan jasa	58.000.000,00	-
Koreksi aset tetap	-	-
Koreksi saldo awal aset tetap	-	116.357.400,00
Mutasi aset tetap antar SKPD	-	-
Reklasifikasi aset tetap	9.712.583.064,49	5.881.730.500,00
Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya	-	-
Reklasifikasi aset tetap ke piutang lainnya	-	-
Penyesuaian utang pengadaan aset tetap	111.259.350,00	-
Akumulasi penyusutan aset tetap	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>9.881.842.414,49</b>	<b>5.998.087.900,00</b>

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2019

Dari rincian penambahan dan pengurangan konstruksi dalam pengerjaan sebagaimana tabel diatas, penambahan aset tetap sebesar Rp9.881.842.414,49 dan pengurangan sebesar Rp5.998.087.900,00 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Penyesuaian belanja barang dan jasa terdiri dari penambahan sebesar Rp58.000.000,00 yang merupakan jasa konsultansi perencanaan pembangunan museum pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Koreksi saldo awal aset tetap konstruksi dalam pengerjaan terdiri dari pengurangan sebesar Rp116.357.400,00 yang berasal dari kekeliruan penyajian aset tetap tahun sebelumnya atas realisasi uang muka pekerjaan pemasangan lampu hias alun-alun ibukota Molibagu tahun 2017 yang seharusnya dicatat sebagai piutang lainnya. Pekerjaan pemasangan lampu hias alun-alun ibukota Molibagu tersebut mengalami pemutusan kontrak pada tahun 2017 disebabkan pihak penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu

yang telah ditetapkan dalam kontrak. Atas pemutusan kontrak tersebut Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman tidak melakukan klaim terhadap jaminan pekerjaan sehingga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengambil upaya dengan melakukan penagihan atas uang muka dimaksud kepada pihak pelaksana dan pihak pelaksana telah melakukan pengembalian uang muka sesuai STS nomor 31/STS/PU-PRPPKP/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp116.357.400,00.

3. Reklasifikasi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan terdiri dari penambahan sebesar Rp9.712.583.064,49 dan pengurangan sebesar Rp5.881.730.500,00 yang berasal dari :
  - Penambahan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp9.712.583.064,49 :
    - 1) Reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan atas pekerjaan rehabilitasi Kantor Bupati Bolaang Mongondow Selatan yang belum dapat dimanfaatkan dan memiliki lanjutan pekerjaan di tahun 2020 sebesar Rp3.379.416.000,00 pada Bagian Umum
    - 2) Reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan atas atribusi biaya perencanaan pembangunan Islamic Center yang belum selesai pembangunannya sebesar Rp331.375.000,00 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
    - 3) Reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan atas 20 (dua puluh) paket pekerjaan swakelola yang belum selesai fisiknya sebesar Rp3.665.567.414,49 pada Dinas Pendidikan.
    - 4) Reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan atas atribusi biaya perencanaan pembangunan kolam renang Objek Wisata Botulidu sebesar Rp49.780.000,00 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
    - 5) Reklasifikasi dari aset tetap gedung dan bangunan atas pembangunan Asrama Mahasiswa Putra di Gorontalo tahap I yang masih memiliki lanjutan pekerjaan sebesar Rp927.374.000,00 pada Dinas Pendidikan.
    - 6) Reklasifikasi dari aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan atas pekerjaan pembangunan Jembatan Kuala Asam Desa Adow Tahap I sebesar Rp720.791.000,00 dan Pembangunan Jembatan Desa Tonala Tahap I yang masih memiliki lanjutan pekerjaan dan belum dapat dimanfaatkan sebesar Rp630.469.650,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
    - 7) Reklasifikasi dari aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan berupa atribusi biaya perencanaan pembangunan talud SDN Iligon sebesar Rp7.810.000,00.
  - Pengurangan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp5.881.730.500,00 :
    - 1) Reklasifikasi ke aset tetap gedung dan bangunan atas pekerjaan pembangunan Gereja Oikumene di Panango sebesar Rp3.584.494.000,00, pembangunan Pura di Panango sebesar Rp1.775.700.000,00 yang fisiknya telah selesai pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

- 2) Reklasifikasi ke aset tetap gedung dan bangunan atas kapitalisasi biaya perencanaan pembangunan Taman Masjid di Panango sebesar Rp29.678.000,00 dan kapitalisasi biaya perencanaan pembangunan Taman Gereja Oikumene di Panango sebesar Rp29.400.000,00 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.
  - 3) Reklasifikasi ke aset tetap gedung dan bangunan atas pekerjaan pembangunan Pusat Informasi Pariwisata di Panango sebesar Rp462.458.500,00 yang fisiknya telah selesai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
4. Penyesuaian utang pengadaan aset tetap terdiri dari penambahan sebesar Rp111.259.350,00. Penyesuaian utang pengadaan aset tetap ini berasal dari pekerjaan pembangunan jembatan Desa Tonala tahap I yang belum dapat dimanfaatkan dan memiliki lanjutan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Adapun daftar pekerjaan yang dicatat sebagai aset tetap konstruksi dalam pengerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.59 Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan**

SKPD	NAMA PEKERJAAN	SALDO AWAL (Rp)	PE-NAMBAHAN (Rp)	PE-NGURANGAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
DINAS PU	1 Perencanaan/DED Gedung Laboratorium, Gudang dan Workshop TA 2014	49.885.000,00	-	-	49.885.000,00
	2 Pekerjaan Pembuatan Tugu Perbatasan Bolser-Bolmong Yang Tidak Terlaksana Dengan kualitas Fisik 30% Karena Permasalahan Tanah TA 2015	147.279.000,00	-	-	147.279.000,00
	3 Pembangunan Jaringan Air Minum Desa Onggunil Tahun 2015. DAK REGULER	1.452.485.000,00	-	-	1.452.485.000,00
	4 Pembangunan Jaringan Air Minum Desa Sondana Tahun 2016. DAK REGULER	626.809.800,00	-	-	626.809.800,00
	5 Peningkatan Jaringan SPAM DKK Bolaang LM Tahun 2016. DAK REGULER	3.248.451.250,00	-	-	3.248.451.250,00
	6 Peningkatan Jaringan SPAM DKK Hiriolalan Tahun 2016. DAK	2.997.206.700,00	-	-	2.997.206.700,00
	7 Pembangunan Jaringan Air Minum Desa Dudepo-Dudepo Barat Tahun 2016. DAK REGULER	619.011.100,00	-	-	619.011.100,00
	8 Pembangunan Jaringan Air Minum Desa Manggedas Tahun 2016. DAK REGULER	1.471.041.250,00	-	-	1.471.041.250,00
	9 Pengadaan Lampu Hias Alun-alun Sukota Kabupaten Tahun 2017	116.357.400,00	-	116.357.400,00	-
	10 Pembangunan Jembatan Kuala Asam Desa Adiw TA 2019	-	720.791.000,00	-	720.791.000,00
	11 Pembangunan Jembatan Desa Tonala TA 2019	-	741.729.000,00	-	741.729.000,00
SETDA – Bagian Umum	1 Perencanaan Pembangunan / DED Bangunan Tambahan Guest House TA 2014	29.534.000,00	-	-	29.534.000,00
	2 Perencanaan Rumah Dinas Bupati TA 2012	229.855.000,00	-	-	229.855.000,00
	3 Perencanaan Rumah Dinas Wakil Bupati TA 2012	168.657.000,00	-	-	168.657.000,00
	4 Perencanaan Rumah Dinas Ketua DPRD TA 2012	182.800.000,00	-	-	182.800.000,00
	5 Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Sirego Kiri TA 2015	49.280.000,00	-	-	49.280.000,00
	6 Rehabilitasi Kantor Bupati yang putus kontrak dikurangi koneksi kelebihan pengakuan progres fisik sebagai dasar pembayaran sebesar Rp183.790.178,00 sesuai temuan pemeriksaan BPK RI TA 2018	1.656.996.774,00	3.379.416.000,00	-	5.036.412.774,00
SETDA – Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 Pembangunan Islamic Center Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017	29.963.732.000,00	331.375.000,00	-	30.295.107.000,00
	2 Pembangunan Gereja Oikumene Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017	3.584.494.000,00	-	3.584.494.000,00	-
	3 Pembangunan Pura Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017	1.775.700.000,00	-	1.775.700.000,00	-
	4 Perencanaan Taman Tempat Zedah Masjid Panango TA 2018	29.678.000,00	-	29.678.000,00	-
	5 Perencanaan Taman Tempat Zedah Pura Panango TA 2018	29.900.000,00	-	-	29.900.000,00
	6 Perencanaan Taman Tempat Zedah Gereja Panango TA 2018	29.400.000,00	-	29.400.000,00	-

SKPD	NAMA PEKERJAAN	SALDO AWAL (Rp)	PE-TAMBAHAN (Rp)	PE-NGURANGAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	7 Perimbangan Pembangunan Rumah Petugas Keagamaan Kompleks Perkantoran Panenjo TA 2018	198.500.000,00	-	-	198.500.000,00
	8 Perencanaan Pembangunan Hunusan HTQ TA 2018	48.774.000,00	-	-	48.774.000,00
INSPEKTORAT	1 Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Inspektori TA 2014	35.500.000,00	-	-	35.500.000,00
DINAS PERTANIAN	1 Perencanaan Jalan Usaha Tani (Rp2.453.000 x 7 JUT yang belum selesai dan total 20 JUT sebesar Rp49.060.000 = Rp2.453.000 x 20 JUT) TA 2014	17.171.000,00	-	-	17.171.000,00
	1 Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Perjuangan (Plus Perencanaan/Pengawasan) TA 2014	139.514.612,00	-	-	139.514.612,00
	3 Perencanaan Jalan Usaha Tani Yang Belum Tertakana Fisiknya TA 2015	48.920.000,00	-	-	48.920.000,00
	4 Perencanaan Jaringan Irigasi TA 2015	43.570.000,00	-	-	43.570.000,00
	3 Perencanaan Pipasasi dan Peningkatannya Desa Dumagin B Yang Tidak Tertakana Fisiknya TA 2015	3.750.000,00	-	-	3.750.000,00
RAJID	1 Perencanaan Pembangunan Tempat Parkir Bangunan Rumah Sakit TA 2014	37.660.000,00	-	-	37.660.000,00
BKPD	1 Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor TA 2018	98.800.000,00	-	-	98.800.000,00
Bapelitbang	1 Perencanaan Pembangunan Gedung Tempat Pertemuan/Serba Guna TA 2018	98.800.000,00	-	-	98.800.000,00
Diparbud	1 Pembangunan Pusat Informasi Pariwisata TA 2018	462.458.500,00	-	462.458.500,00	-
	2 Perencanaan Pembangunan Museum TA 2019	-	58.000.000,00	-	58.000.000,00
	3 Perencanaan Pembangunan Kolam Renang Objek Wisata Botulodu TA 2019	-	49.780.000,00	-	49.780.000,00
Kec. Bolaang Ulu	1 Pembangunan Ragar Balai Pertemuan Umum Kantor Camat Bolaang Ulu TA 2018	162.073.116,00	-	-	162.073.116,00
Dinas Pendidikan	1 Pekerjaan Sekolah 20 (dua puluh) paket TA 2019	-	3.605.567.414,49	-	3.605.567.414,49
	2 Pembangunan Asrama Mahasiswa Putra di Gorontalo TA 2019	-	927.374.000,00	-	927.374.000,00
	3 Pembangunan Talud SDN Ijpon TA 2019	-	7.810.000,00	-	7.810.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>40.876.038.302,00</b>	<b>9.881.842.414,49</b>	<b>5.998.087.900,00</b>	<b>44.759.793.016,49</b>

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2019

#### g. Akumulasi Penyusutan

Tabel 5.60 Akumulasi Penyusutan

URAIAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
<b>ASET TETAP</b>				
Akumulasi Penyusutan	(509.170.206.827,54)	(405.605.852.826,69)	(103.564.354.000,85)	25,53%

Sumber : Neraca Tahun 2019

Sesuai dengan PSAP 07 Paragraf 53, penyusutan didefinisikan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena dampak penggunaannya dalam kegiatan operasional pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Tujuan utama penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan, melainkan untuk menyesuaikan nilai aset tetap agar mencerminkan nilai wajarnya.

Penyusutan dapat dilakukan dalam 3 metode (i) metode garis lurus; (ii) metode saldo menurun ganda; dan (iii) metode unit produksi, namun metode yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melakukan perhitungan penyusutan adalah metode garis lurus sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Metode garis lurus diambil karena metode ini

merupakan metode yang paling populer dan dirasakan paling sederhana. Akan tetapi, diluar dari pertimbangan populer dan sederhana, metode penyusutan dapat dikaitkan dengan karakteristik aset, cara dan intensitas pemanfaatannya. Jika unit manfaat bersifat spesifik dan terkuantitatif, maka perhitungan penyusutan yang lebih logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode unit produksi. Jika intensitas pemanfaatan bersifat menurun dalam artian pemanfaatan penyusutan yang lebih logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode saldo menurun ganda. Akan tetap jika unit masa manfaat kurang spesifik dan tidak terkuantifikasi, atau walaupun unit masa manfaat dapat memenuhi unsur spesifik dan terkuantifikasi tetapi perhitungan hendak dilakukan semudah mungkin, maka perhitungan penyusutan yang lebih logis dan proporsional dapat dilakukan dengan memakai metode garis lurus.

Akumulasi penyusutan disajikan pada neraca dengan simbol minus dikarenakan akumulasi penyusutan merupakan pengurang nilai aset tetap. Laporan Rekapitulasi Penyusutan Aset Tetap dapat dilihat pada Lampiran VI dalam laporan keuangan ini. Berikut rekapitulasi akumulasi penyusutan per jenis aset tetap.

**Tabel 5.61 Rincian Akumulasi Penyusutan**

URAIAN	2019 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tanah	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(129.569.593.661,87)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(35.032.898.983,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	(337.990.073.080,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(6.577.641.102,67)
<b>Jumlah</b>	<b>(509.170.206.827,54)</b>

Jika dibandingkan dengan saldo akumulasi penyusutan tahun 2018 sebesar minus Rp405.605.852.826,69, akumulasi penyusutan mengalami kenaikan sebesar Rp103.564.354.000,85 atau 25,53% pada tahun 2019 sehingga saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2019 adalah sebesar minus Rp509.170.206.827,54. Kenaikan saldo akumulasi penyusutan tahun 2019 diperoleh dari penambahan sebesar Rp4.805.161.865,00 dan pengurangan sebesar Rp99.851.464.395,00. Adapun rincian penambahan dan pengurangan akumulasi penyusutan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.62 Rincian Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan**

URAIAN	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN 2019
Koreksi Sa do Awal	38.957.314,00	852.892.569.569,53
Mutasi Antar SKPD	(713.591.735,00)	(713.591.735,00)
Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap ke Aset Lainnya	4.173.749.282,68	-
Beban Penyusutan	-	106.924.168.028,00
<b>JUMLAH</b>	<b>3.499.144.861,68</b>	<b>107.063.468.862,53</b>

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2019

Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap terdiri dari penambahan sebesar Rp38.957 dan pengurangan sebesar Rp852.892.569.569,53. Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan berasal dari penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah. Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud berdampak terhadap perubahan kebijakan akuntansi dari sisi klasifikasi struktur Bagan Akun Standar maupun dari sisi masa manfaat aset tetap, sehingga penyusutan aset tetap perlu dilakukan penghitungan kembali. Koreksi saldo awal penyusutan terjadi pada

tiga jenis lobyek akumulasi penyusutan yaitu peralatan dan mesin sebesar minus Rp78.672.442,53, gedung dan bangunan sebesar Rp38.957.314,00, dan aset tetap lainnya sebesar minus Rp774.220.127,00.

Mutasi akumulasi penyusutan antar SKPD terdiri dari penambahan dan pengurangan sebesar minus Rp713.591.735,00. Mutasi akumulasi penyusutan antar SKPD terdiri dari :

1. Bagian Humas ke Bagian Ekonomi sebesar minus Rp11.431.959,00.
2. Dinas Pendidikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar minus Rp437.523.055,00.
3. Dinas Pendidikan ke Kecamatan Bolaang Uki sebesar minus Rp74.781.425,00.
4. Dinas Pendidikan ke Kecamatan Pinolosian sebesar minus Rp57.072.180,00.
5. Dinas Pendidikan ke Kecamatan Pinolosian Tengah sebesar minus Rp35.606.250,00.
6. Dinas Pendidikan ke Kecamatan Pinolosian Timur sebesar minus Rp35.081.417,00.
7. Dinas Pendidikan ke Kecamatan Posigadan sebesar minus Rp57.720.887,00.
8. Dinas Pertanian ke Dinas Perikanan sebesar minus Rp4.374.562,00.

Reklasifikasi akumulasi penyusutan terdiri dari penambahan sebesar Rp4.173.749.282,68 yang berasal dari reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap yang telah rusak berat. Sementara beban penyusutan tahun 2019 tercatat sebesar Rp106.924.168.028,00.

#### 5.3.1.4. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Per 31 Desember 2019 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak memiliki dana cadangan.

#### 5.3.1.5. Aset Lainnya

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

Tabel 5.63 Aset Lainnya

URAIAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
<b>ASET TETAP</b>				
Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	6.230.323.508,18	5.596.039.719,04	634.283.789,14	11,33%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	22.639.727.950,00	20.475.843.450,00	2.163.884.500,00	10,57%
Aset Lain-lain	5.339.960.859,43	5.786.830.596,93	(446.869.737,50)	-7,72%
<b>JUMLAH</b>	<b>34.210.012.317,61</b>	<b>31.858.713.765,97</b>	<b>2.351.298.551,64</b>	<b>7,38%</b>

Sumber : Neraca Tahun 2019

Jika dibandingkan dengan saldo aset lainnya tahun 2018 sebesar Rp31.858.713.765,97, saldo aset lainnya mengalami kenaikan sebesar



Rp2.351.298.551,64 atau 7,38% pada tahun 2019 sehingga saldo aset lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp34.210.012.317,61. Dikarenakan karakteristik jenis aset lainnya berbeda antara satu dengan yang lain, maka penambahan dan pengurangan saldo aset lainnya secara umum akan dijelaskan pada masing-masing jenis akun aset lainnya sebagai berikut.

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak penjualan aset yang bersangkutan. Per 31 Desember 2019 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongonow Selatan tidak memiliki tagihan penjualan angsuran sebagaimana dimaksud.

b. Tuntutan Ganti Rugi

Jika dibandingkan dengan saldo tuntutan ganti rugi tahun 2018 sebesar Rp5.596.039.719,04, tuntutan ganti rugi mengalami kenaikan sebesar Rp634.283.789,14 atau 11,33% pada tahun 2019 sehingga saldo tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.230.323.508,18. Kenaikan saldo tuntutan ganti rugi tahun 2019 diperoleh dari penambahan sebesar Rp1.307.942.726,51 yang berasal dari hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2018 dan pengurangan sebesar Rp673.658.937,37 berasal dari penyeteroran selama tahun 2019 yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Penambahan saldo tuntutan ganti rugi sebesar Rp1.307.942.726,51 berasal dari hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2018.
2. Pengurangan saldo tuntutan ganti rugi sebesar Rp673.658.937,37 terdiri dari :
  - Penyeteroran kerugian atas hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2009 s.d 2015 dan hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah terhadap perjalanan dinas sebesar Rp45.427.175,00.
  - Penyeteroran kerugian atas hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2016 dan belanja tahun 2017 sebesar Rp18.052.950,00.
  - Penyeteroran kerugian atas hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2017 sebesar Rp12.600.000,00.
  - Penyeteroran kerugian atas hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atas belanja modal tahun 2016 sebesar Rp3.750.000,00.
  - Koreksi atas penyeteroran kerugian yang tidak terakomodir pada laporan keuangan sebelumnya sebesar Rp29.595.000,00.

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dengan swasta berdasarkan perjanjian. Kemitraan dengan pihak ketiga dinilai sebesar nilai kontrak kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga. Bentuk kemitraan tersebut antara lain Bangun Guna Serah/*Built Operate Transfer (BOT)*,<sup>46</sup>Bangun Serah Guna/*Built Transfer Operate (BTO)* dan bentuk kemitraan lainnya. Per 31 Desember 2019 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak memiliki kemitraan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud.

d. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini merupakan hasil kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset non keuangan artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.

Pada Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Aset tidak Berwujud Berbasis AkruaI dijelaskan bahwa terdapat perlakuan khusus pencatatan transaksi aset tidak berwujud terkait amortisasi. Aset tidak berwujud disajikan pada lembar muka neraca sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tidak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Kebijakan penerapan amortisasi merupakan dampak dari perubahan konsep dalam Laporan Operasional dimana beban amortisasi harus disajikan. Amortisasi aset tidak berwujud sama prinsipnya seperti penyusutan pada aset tetap. Amortisasi dapat dilakukan dalam 3 metode (i) metode garis lurus; (ii) metode saldo menurun ganda; dan (iii) metode unit produksi, namun metode yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melakukan perhitungan amortisasi adalah dengan metode garis lurus dengan masa manfaat terbatas selama 5 (lima) tahun.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mencatat aset tidak berwujud berupa hak cipta dan kajian per 31 Desember 2019 yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Sesuai dengan kebijakan akuntansi, aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak diamortisasi. Nilai aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah aset tidak berwujud tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka aset tidak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tersebut mengalami penurunan nilai. Jika aset tidak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka akan diajukan proses penghapusan aset tidak berwujud tersebut sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

**Tabel 5.64 Aset Tidak Berwujud**

URAIAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
Hak Cipta				
Hak Cipta	170.528.000,00	170.528.000,00	.	0,00%
Aset Tidak Berwujud				
Software	1.538.965.000,00	1.313.965.000,00	225.000.000,00	17,12%
Kajian	21.596.489.200,00	19.383.311.700,00	2.213.177.500,00	11,42%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(666.254.250,00)	(391.961.250,00)	(274.293.000,00)	69,98%
<b>JUMLAH</b>	<b>22.639.727.950,00</b>	<b>20.475.843.450,00</b>	<b>2.163.884.500,00</b>	<b>10,57%</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Jika dibandingkan dengan saldo aset tidak berwujud tahun 2018 sebesar Rp20.475.843.450,00, aset tidak berwujud mengalami kenaikan sebesar Rp2.163.884.500,00 atau 10,57% pada tahun 2019 sehingga saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.639.727.950,00. Adapun rincian penambahan dan pengurangan aset tidak berwujud dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.65 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tidak Berwujud**

URAIAN	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN 2019
Hak Cipta	-	-
Software	225.000.000,00	-
Kajian	2.213.177.500,00	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	274.293.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.438.177.500,00</b>	<b>274.293.000,00</b>

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2019

Kenaikan saldo aset tidak berwujud pada tahun 2019 diperoleh dari penambahan sebesar Rp2.438.177.500,00 dan pengurangan sebesar Rp274.293.000,00. Penambahan dan pengurangan tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

1. Penambahan aset tidak berwujud berasal dari :

- *Software* sebesar Rp225.000.000 berupa *Geographic Information System* (GIS) Perikanan sebesar Rp150.000.000,00 dan Sistem Informasi Pengembangan e-Pajak sebesar Rp75.000.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Kajian sebesar Rp2.213.177.500,00 berupa :
  - 1) Masterplan dan Roadmap Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp200.000.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - 2) Masterplan dan DED Drainase Ibukota Kecamatan Posigadan sebesar Rp271.260.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  - 3) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Salongo Timur sebesar Rp226.996.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  - 4) Rencana Kontijensi Bencana Alam sebesar Rp99.700.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - 5) Masterplan dan DED Drainase Ibukota Kecamatan Pinolosian Tengah sebesar Rp271.546.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  - 6) Rencana Induk Terminal Tipe C sebesar Rp180.009.500,00 pada Dinas Perhubungan.
  - 7) Feasibility Study (FS) Sentra Industri sebesar Rp49.885.000,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
  - 8) Masterplan dan DED Sentra Industri sebesar Rp99.880.000,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
  - 9) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebesar Rp191.851.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
  - 10) Database jaringan irigasi sebesar Rp622.050.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

2. Pengurangan aset tidak berwujud berasal dari amortisasi aset tidak berwujud tahun 2019 sebesar Rp274.293.000,00. Perhitungan amortisasi aset tidak berwujud dapat dilihat pada Lampiran VII dalam laporan keuangan ini.

e. Aset Lain-lain

**Tabel 5.66 Aset Lain-lain**

URATAN	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
Aset Lain-lain lainnya	426.470.055,70	426.470.055,70	-	0,00%
Aset Tetap Rusak Berat	9.043.902.936,30	8.219.229.928,62	824.673.007,68	10,03%
Aset Tetap Hilang	80.850.000,00	80.850.000,00	-	0,00%
Aset Tetap Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.426.021.579,00	11.910.621.579,00	(484.600.000,00)	-4,07%
Aset Tetap Yang Akan Diserahkan Ke Pemerintah Provinsi	210.767.105,00	210.767.105,00	-	0,00%
Aset Tetap Yang Merupakan Barang Habis Pakai	9.699.800,00	9.699.800,00	-	0,00%
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(15.857.750.616,57)	(15.070.807.871,39)	(786.942.745,18)	5,22%
<b>JUMLAH</b>	<b>5.339.960.859,43</b>	<b>5.786.830.596,93</b>	<b>(446.869.737,50)</b>	<b>-7,72%</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Jika dibandingkan dengan saldo aset lain-lain tahun 2018 sebesar Rp5.786.830.596,93, aset lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp446.869.737,50 atau 7,72% pada tahun 2019 sehingga saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.339.960.859,43. Penurunan saldo aset lain-lain di tahun 2019 diperoleh dari penambahan sebesar Rp11.688.969.648,50 dan pengurangan sebesar Rp22.706.214.023,39.

Adapun mutasi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.67 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain**

URAIAN	PENAMBAHAN 2019	PENGURANGAN 2019
Aset Lain-lain lainnya	-	-
Aset Tetap Rusak Berat	4.335.540.499,68	3.510.867.492,00
Aset Tetap Hilang	-	-
Aset Tetap Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	156.094.000,00	640.694.000,00
Aset Tetap Yang Akan Diserahkan Ke Pemerintah Provinsi	-	-
Aset Tetap Yang Merupakan Barang Habis Pakai	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	3.423.539.430,50	4.210.482.175,68
<b>JUMLAH</b>	<b>7.915.173.930,18</b>	<b>8.362.043.667,68</b>

Sumber : Buku Besar Pembantu LKPD Tahun 2019

Penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dirinci sebagai berikut.

1. Aset tetap rusak berat mengalami penambahan sebesar Rp4.335.540.499,68 dan pengurangan sebesar Rp3.510.867.492,00.
  - Penambahan aset tetap rusak berat sebesar Rp4.335.540.499,68 berasal dari reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin yang telah rusak berat tahun 2019.

- Pengurangan aset tetap rusak berat sebesar Rp3.510.867.492,00 berasal dari :
  - 1) Penghapusan aset tetap rusak berat berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 142 Tahun 2019 tentang Penghapusan Barang Inventaris dan Kendaraan Dari Daftar Inventaris Barang Tahun 2019 sebesar 3.519.361.842,00. Dari jumlah nilai barang yang dihapuskan dalam keputusan tersebut, didalamnya terdapat aset tetap rusak berat yang dicatat pada buku inventaris ekstrakomptabel sebesar Rp31.494.300,00, sehingga jumlah aset tetap yang dihapuskan dari neraca hanya sebesar Rp3.487.867.542,00 atau yang tercatat pada buku inventaris intrakomptabel.
  - 2) Penghapusan aset tetap rusak berat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 418 Tahun 2018 tentang Penghapusan Barang-barang Inventaris Dari Daftar Barang Inventaris Tahun 2018 pada lampiran III yang belum dihapuskan dari neraca berupa 1 (satu) unit handycam tahun perolehan 2010 sebesar Rp5.000.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan 1 (satu) unit proyektor+attachment tahun perolehan 2012 sebesar Rp17.999.950,00 pada Dinas Perhubungan.
- 2. Aset tetap diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga terdiri dari penambahan sebesar Rp156.094.000,00 dan pengurangan sebesar Rp640.694.000,00.
  - Penambahan aset tetap diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp156.094.000 berasal dari mutasi antar SKPD dari Dinas Pertanian ke Dinas Perikanan.
  - Pengurangan aset tetap diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga sebesar Rp640.694.000,00 berasal dari mutasi antar SKPD dari Dinas Pertanian ke Dinas Perikanan sebesar Rp156.094.000,00, dan penghapusan aset tetap diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 418 Tahun 2018 tentang Penghapusan Barang-barang Inventaris Dari Daftar Barang Inventaris Tahun 2018 pada lampiran II yang belum dihapuskan dari neraca berupa 2 (dua) unit kendaraan roda empat pick up tahun perolehan 2017 yang dihibahkan kepada Kepolisian Resort Bolaang Mongondow sebesar Rp484.600.000,00 pada Bagian Umum.
- 3. Akumulasi penyusutan aset lain-lain lainnya terdiri dari penambahan sebesar Rp3.423.539.430,50 dan pengurangan sebesar Rp4.210.482.175,68.
  1. Penambahan akumulasi penyusutan aset lain-lain lainnya sebesar Rp3.423.539.430,50 berasal dari penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap rusak berat yang dihapuskan.
  2. Pengurangan akumulasi penyusutan aset lain-lain lainnya sebesar Rp4.210.482.175,68 berasal dari :
    - Penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin rusak berat yang direklasifikasikan ke aset lainnya sebesar Rp4.173.749.282,68.
    - Penyesuaian beban penyusutan aset tetap peralatan dan mesin rusak berat yang direklasifikasikan ke aset lainnya sebesar Rp36.732.893,00

### 5.3.2. Kewajiban

Secara umum seluruh kewajiban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.276.376.685,44. Jenis kewajiban ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban tersebut secara keseluruhan merupakan kewajiban jangka pendek, karena Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan tidak memiliki kewajiban jangka panjang seperti utang dalam negeri maupun kewajiban jangka panjang lainnya. Kewajiban jangka pendek tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.68 Kewajiban Jangka Pendek**

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.481.867.724,00	933.172.344,00
Utang Bunga	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	29.662.000,00	29.708.027,00
Utang Beban	1.227.172.053,00	408.382.547,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.537.674.905,44	1.351.541.974,44
<b>JUMLAH</b>	<b>6.276.376.685,44</b>	<b>2.722.804.892,44</b>

Sumber : Neraca Tahun 2019

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada tahun 2019 adalah sebesar Rp2.481.867.724,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) ini terdiri dari utang PPh 21 pada BUD sebesar Rp129.703.215,00, utang PPh 21 pada bendahara Kapitasi sebesar Rp11.776.925,00, utang PPh 21 pada bendahara BOS sebesar Rp6.248.661,00, utang PPh 22 pada bendahara Kapitasi sebesar Rp2.055.150,00, utang PPh 23 pada bendahara BOS sebesar Rp6.178.317,00, utang PPN pada bendahara Kapitasi sebesar Rp13.659.250,00, utang PPN pada bendahara BOS sebesar Rp46.320.565,00, utang jaminan pemeliharaan pekerjaan terhadap pihak ketiga yang belum dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.435.539.258,00, utang zakat profesi yang telah dipungut oleh BUD namun belum disetorkan ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp830.336.383,00, dan utang PFK lainnya berupa sisa dana bantuan pemerintah kegiatan Bimbingan Teknis Bindikel sebesar Rp50.000,00 yang akan dikembalikan kepada Kementerian Pendidikan. Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tersebut dapat dilihat sebagaimana table berikut.

**Tabel 5.69 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Utang PPh 21	147.728.801,00	56.863.449,00
Utang PPh 22	2.055.150,00	-
Utang PPh 23	6.178.317,00	2.045.480,00
Utang PPN Pusat	59.979.815,00	33.590.392,00
Utang Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan	1.435.539.258,00	840.673.023,00
Utang Zakat Profesi	830.336.383,00	-
Utang PFK Lainnya	50.000,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>2.481.867.724,00</b>	<b>933.172.344,00</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Utang PPh 21 pada BUD merupakan utang PPh 21 yang direncanakan akan dikompensasi pada kelebihan setor pajak PPh 21 atas gaji dan tunjangan serta uang representasi karena perubahan PTKP yang belum disesuaikan pada tahun 2016 berdasarkan temuan BPK RI. Utang PPh 21 pada BUD ini sampai dengan tanggal pelaporan, masih menunggu proses kompensasi sehingga belum dilakukan koreksi. Adapun rincian utang jaminan pemeliharaan pekerjaan dapat dilihat pada Lampiran VIII pada laporan keuangan ini.

b. Utang Bunga

Utang bunga merupakan biaya bunga yang harus dicatat atas biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Per 31 Desember 2019 tidak memiliki utang bunga.

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Per 31 Desember 2019 tidak terdapat bagian lancar utang jangka panjang pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

d. Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2019 sebesar Rp29.662.000,00. Pendapatan diterima dimuka merupakan kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pendapatan diterima dimuka ini merupakan pendapatan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah berupa sewa ruang kantor kas dan ATM Bank Sulut Cabang Molibagu untuk masa sewa tahun 2020.

e. Utang Beban

Utang beban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019 sebesar Rp1.227.172.053,00 yang dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.70 Utang Beban**

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Utang Beban Pegawai	96.095.222,00	31.100.516,00
Utang Beban Barang dan Jasa	1.038.269.704,00	230.427.812,00
Utang Beban Transfer	92.807.127,00	146.854.219,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.227.172.053,00</b>	<b>408.382.547,00</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Utang beban pegawai sebesar Rp96.095.222,00 merupakan kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai negeri sipil yang disebabkan telah diterbitkannya Daftar Gaji (tagihan pembayaran gaji) Tahun 2019 namun belum dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Utang beban barang dan jasa sebesar Rp1.038.269.704,00 sebagaimana dimaksud terdiri dari beban barang/bahan pakai habis sebesar Rp307.037.500,00, beban listrik sebesar Rp8.152.404,00, beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet sebesar Rp285.855.000,00, beban pajak kendaraan bermotor sebesar Rp46.406.900,00, beban jasa konsultasi perencanaan sebesar Rp231.165.000,00 dan beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp159.652.900,00. Adapun rincian utang beban

pegawai dapat dilihat pada Lampiran IX dan utang beban barang dan jasa dapat dilihat pada Lampiran X laporan keuangan ini.

Utang beban transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019 sebesar Rp92.807.127,00 merupakan utang beban transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa. Alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019. Adapun rincian utang beban transfer dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.71 Utang Beban Transfer**

NO.	DESA	ALOKASI 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	KURANG BAYAR 2019 Rp
1	Desa Tangagah	6.246.301,00	5.344.794,00	901.507,00
2	Desa Salongo	6.276.894,00	5.369.765,00	907.129,00
3	Desa Toluaya	13.418.802,00	11.739.744,00	1.679.058,00
4	Desa Molibigu	14.554.195,00	12.905.946,00	1.648.249,00
5	Desa Popodu	17.898.738,00	11.912.908,00	5.985.830,00
6	Desa Tolondadu	6.199.545,00	5.294.165,00	905.380,00
7	Desa Tabilaa	14.097.370,00	11.931.165,00	2.166.205,00
8	Desa Sondana	15.258.116,00	13.425.933,00	1.832.183,00
9	Desa Dudepo	6.209.703,00	5.303.531,00	906.172,00
10	Desa Pinolantungan	6.449.349,00	5.543.984,00	905.365,00
11	Desa Tolondadu I	6.314.348,00	5.408.449,00	905.899,00
12	Desa Tolondadu II	5.883.209,00	5.041.581,00	841.628,00
13	Desa Soguo	7.729.545,00	6.606.056,00	1.123.489,00
14	Desa Pintadia	13.003.733,00	11.318.517,00	1.685.216,00
15	Desa Salongo Timur	5.711.198,00	4.868.071,00	843.127,00
16	Desa Salongo Barat	5.804.555,00	4.841.090,00	963.465,00
17	Desa Dudepo Barat	5.642.365,00	4.800.738,00	841.627,00
18	Desa Lion	5.732.255,00	4.886.539,00	845.716,00
19	Desa Momalia II	5.759.146,00	4.917.518,00	841.628,00
20	Desa Meyambanga	6.374.771,00	5.472.046,00	902.725,00
21	Desa Saibuah	5.734.075,00	4.896.892,00	837.183,00
22	Desa Tolutu	5.924.675,00	5.083.047,00	841.628,00
23	Desa Milangodaa	6.166.383,00	5.261.017,00	905.366,00
24	Desa Sinombayuga	5.858.270,00	5.016.642,00	841.628,00
25	Desa Luwoo	6.228.983,00	5.323.617,00	905.366,00
26	Desa Momalia I	13.667.873,00	11.967.564,00	1.700.309,00
27	Desa Milangodaa Barat	6.197.660,00	5.296.739,00	900.921,00
28	Desa Sakti	6.207.465,00	5.306.544,00	900.921,00
29	Desa Manggadaa	6.059.966,00	5.159.045,00	900.921,00
30	Desa Pilolahunga	5.635.832,00	4.793.697,00	842.135,00
31	Desa Tonala	5.818.724,00	4.981.261,00	837.463,00
32	Desa Botuliodu	6.365.933,00	5.464.532,00	901.401,00
33	Desa Iloheluma	5.676.517,00	4.839.334,00	837.183,00
34	Desa Meyambanga Timur	5.688.617,00	4.851.414,00	837.203,00
35	Desa Milangodaa Utara	5.630.300,00	4.788.673,00	841.627,00
36	Desa Molosipat	5.630.217,00	4.788.445,00	841.772,00
37	Desa Nunuka Raya	5.726.969,00	4.889.118,00	837.851,00
38	Desa Pakuku Jaya	5.791.981,00	4.954.798,00	837.183,00
39	Desa Momalia III	5.640.662,00	4.803.479,00	837.183,00
40	Desa Inosota	5.551.955,00	4.714.549,00	837.406,00
41	Desa Linawan	6.625.489,00	5.719.940,00	905.549,00
42	Desa Nunuk	6.754.523,00	5.715.069,00	1.039.454,00
43	Desa Pinolosian	13.786.465,00	12.086.550,00	1.699.915,00
44	Desa Kombat	9.033.896,00	7.642.701,00	1.391.195,00



NO.	DESA	ALOKASI 2019 Rp	REALISASI 2019 Rp	KURANG BAYAR 2019 Rp
45	Desa Lungkap	6.837.667,00	5.929.525,00	908.142,00
46	Desa Ilomata	6.326.211,00	5.402.132,00	924.079,00
47	Desa Linawan I	6.078.716,00	5.177.795,00	900.921,00
48	Desa Tolotoyon	5.979.653,00	5.137.320,00	842.333,00
49	Desa Pinolosian Selatan	7.278.459,00	6.155.084,00	1.123.375,00
50	Desa Kombot Timur	6.255.460,00	5.178.252,00	1.077.208,00
51	Desa Mataindo	5.784.608,00	4.947.425,00	837.183,00
52	Desa Adow	13.989.443,00	11.665.515,00	2.323.928,00
53	Desa Torosik	6.600.545,00	5.694.220,00	906.325,00
54	Desa Tobayagan	13.824.028,00	11.807.110,00	2.016.918,00
55	Desa Deaga	5.752.654,00	4.697.136,00	1.055.518,00
56	Desa Adow Selatan	5.712.402,00	4.870.106,00	842.296,00
57	Desa Mataindo Utara	5.879.799,00	5.039.759,00	840.040,00
58	Desa Tobayagan Selatan	13.208.609,00	11.576.875,00	1.631.733,00
59	Desa Motandoi	13.303.214,00	11.467.566,00	1.835.648,00
60	Desa Dumagin A	13.971.181,00	11.647.940,00	2.323.241,00
61	Desa Dumagin B	13.575.667,00	11.939.489,00	1.636.178,00
62	Desa Dayow	13.365.606,00	11.733.873,00	1.631.733,00
63	Desa Onggunoi	6.400.710,00	5.499.722,00	900.988,00
64	Desa Modisi	5.819.376,00	4.982.193,00	837.183,00
65	Desa Posilagon	5.675.162,00	4.833.535,00	841.627,00
66	Desa Pidung	13.413.553,00	11.780.056,00	1.633.497,00
67	Desa Iligon	5.660.649,00	4.823.466,00	837.183,00
68	Desa Matandoi Selatan	13.609.441,00	11.751.954,00	1.857.487,00
69	Desa Perjuangan	5.512.107,00	4.674.924,00	837.183,00
70	Desa Onggunoi Selatan	6.200.683,00	5.299.352,00	901.331,00
71	Desa Bakida	6.349.221,00	5.265.674,00	1.083.547,00
72	Desa Duminanga	6.364.650,00	5.258.236,00	1.106.414,00
73	Desa Biniha	6.163.668,00	5.303.934,00	859.734,00
74	Desa Pangia	6.260.597,00	5.215.111,00	1.045.486,00
75	Desa Sinandaka	5.760.693,00	5.044.985,00	715.708,00
76	Desa Soputa	6.098.495,00	5.299.566,00	798.929,00
77	Desa Biniha Timur	6.277.873,00	5.206.823,00	1.071.050,00
78	Desa Motolohu	5.700.293,00	4.956.666,00	743.627,00
79	Desa Trans Pato'a	5.687.056,00	5.042.731,00	644.325,00
80	Desa Halabolu	5.716.692,00	4.809.207,00	907.485,00
81	Desa Biniha Selatan	5.556.387,00	4.719.204,00	837.183,00
<b>JUMLAH</b>		<b>627.918.796,00</b>	<b>535.111.669,00</b>	<b>92.807.127,00</b>

Sumber : Perbup Nomor 16 Tahun 2020 dan Buku Besar Pembantu Tahun 2019

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

Tabel 5.72 Utang Jangka Pendek Lainnya

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	36.658.500,00	36.658.500,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	352.067.566,44	352.067.566,44
Utang Pengadaan Aset Tetap	2.148.948.842,00	962.815.908,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.537.674.908,44</b>	<b>1.351.541.974,44</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Utang jangka pendek lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember tahun 2019 sebesar Rp2.537.674.908,44. Utang ini terdiri dari utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya atas sisa dana BOS Tahun 2011 yang belum disetorkan kembali ke Kas Negara per 31 Desember

2019 sebesar Rp36.658.500,00, Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp352.067.566,44 dan Utang Pengadaan Aset Tetap sebesar Rp2.148.948.842,00 sebagaimana tabel diatas.

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp352.067.566,44 terdiri dari :

- Uang jangka pendek lainnya kepada Subdivre Bulog cabang Kotamobagu atas kekurangan pembayaran hibah beras miskin TA 2012 sebesar Rp22.734.000,00.
- Utang jangka pendek lainnya atas kelebihan pembayaran tahun sebelumnya yang telah ditutup sebesar Rp322.836.766,44.
- Utang Jangka Pendek Lainnya atas Pekerjaan Rehabilitasi RDG SD Muhammadiyah Molibagu TA 2014 (sekolah swasta) pada SKPD Dinas Pendidikan sebesar Rp6.496.800,00.

Utang Pengadaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.713.513.842,00 merupakan utang jangka pendek lainnya atas pekerjaan yang belum dibayar lunas sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang dapat dilihat pada Lampiran XI dalam laporan keuangan ini. Jumlah saldo utang pengadaan aset tetap tersebut diperoleh dari saldo awal utang pengadaan aset tetap sebesar Rp962.815.908,00 dikurangi dengan pelunasan atau realisasi pembayaran utang pengadaan aset tetap tahun 2019 sebesar Rp852.133.216,00 ditambah pengakuan utang pengadaan aset tetap tahun 2019 sebesar Rp1.602.831.150,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Adapun rincian utang pengadaan aset tetap untuk setiap SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.73 Utang Pengadaan Aset Tetap**

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Dinas Pendidikan	41.147.542,00	312.067.392,00
Dinas Kesehatan	63.054.400,00	63.054.400,00
Rumah Sakit Umum Daerah	4.739.000,00	4.739.000,00
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	2.038.266.150,00	333.695.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.741.750,00	1.741.750,00
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	14.207.250,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	-	129.720.000,00
Kecamatan Bolaang Uki	-	103.591.116,00
<b>JUMLAH</b>	<b>2.148.948.842,00</b>	<b>962.815.908,00</b>

Sumber : Rincian Saldo Buku Besar Tahun 2019

### 5.3.3. Ekuitas

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.116.401.846.025,13. Jika dibandingkan dengan ekuitas tahun 2018 sebesar Rp1.088.403.675.232,84 dapat dilihat terjadi kenaikan nilai ekuitas sebesar Rp27.998.170.792,29. Adapun penjelasan ekuitas lebih rinci dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas.

## 5.4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Rincian Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

### 5.4.1. Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Realisasi Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019 sebesar Rp541.932.747.501,26 yang dapat dirinci sebagai berikut.

#### a. Pendapatan Asli Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO untuk tahun 2019 sebesar Rp16.919.084.692,06 yang dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.74 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO**

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.015.412.478,00	5.031.326.838,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	736.890.337,00	766.492.228,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan - LO	-	626.846.731,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	11.166.781.877,06	12.318.859.279,50
<b>JUMLAH</b>	<b>16.919.084.692,06</b>	<b>18.743.525.076,50</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

#### 1) Pendapatan Pajak Daerah – LO

**Tabel 5.75 Pendapatan Pajak Daerah – LO**

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Pajak Hotel - LO	15.452.000,00	1.500.000,00
Pajak Restoran - LO	2.598.179.966,00	2.764.398.860,00
Pajak Hiburan - LO	1.840.000,00	5.000.000,00
Pajak Reklame - LO	41.200.095,00	63.797.006,00
Pajak Penerangan Jalan - LO	980.663.153,00	787.239.604,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	557.011.720,00	692.333.437,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	677.215.544,00	678.697.064,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	143.850.000,00	38.360.867,00
<b>JUMLAH</b>	<b>5.015.412.478,00</b>	<b>5.031.326.838,00</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO untuk tahun 2018 sebesar Rp5.015.412.478,00 yang dapat dirinci sebagai berikut.

- a) Pajak hotel – LO sebesar Rp15.452.000,00 merupakan realisasi penerimaan pajak rumah penginapan dan sejenisnya – LO sebesar Rp13.472.000,00 dan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) – LO sebesar Rp1.980.000,00. Tidak terdapat selisih antara pendapatan pajak hotel – RA dan pendapatan pajak hotel – LO.

- b) Pajak restoran – LO tahun 2019 sebesar Rp2.598.179.966,00 merupakan realisasi atas pajak rumah makan – LO sebesar Rp3.940.000,00 dan pajak jasa boga/katering – LO sebesar Rp2.594.239.966,00. Terdapat selisih nilai realisasi pendapatan pajak restoran-LRA jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak restoran-LO sebesar Rp545.362.920,00 (Rp3.143.542.886,00 - Rp2.598.179.966,00). Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penurunan dan penambahan piutang pajak restoran tahun 2019, dimana terjadi penurunan akibat pelunasan piutang pajak restoran oleh PT. Prasmanindo Boga Utama sebesar Rp724.113.801,00 dan penambahan piutang pajak restoran bulan Desember 2019 sebesar Rp178.750.881,00 yang belum dilunasi oleh PT. Prasmanindo Boga Utama. Penurunan piutang pajak restoran merupakan pelunasan piutang pajak restoran yang penerimaan hanya dicatat pada pendapatan – LRA sedangkan penambahan piutang pajak restoran merupakan penetapan atas pajak restoran bulan Desember 2019 yang belum disetor sehingga hanya dicatat sebagai pendapatan – LO.
- c) Pendapatan pajak hiburan - LO tahun 2019 sebesar Rp1.840.000,00 merupakan realisasi penerimaan pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya – LO sebesar Rp340.000,00 dan pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO sebesar Rp1.500.000,00. Tidak terdapat selisih antara pendapatan pajak hiburan – LRA dan pendapatan pajak hiburan – LO.
- d) Pendapatan pajak reklame – LO tahun 2019 sebesar Rp 41.200.095,00 merupakan realisasi atas pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron – LO. Tidak terdapat selisih antara pendapatan pajak reklame – LRA dan pendapatan pajak reklame – LO.
- e) Pendapatan pajak penerangan jalan – LO tahun 2019 sebesar Rp980.663.153,00. Terdapat selisih nilai realisasi pendapatan pajak penerangan jalan-LO jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan-LRA sebesar Rp18.029.331,00 (Rp980.663.153,00 - Rp962.633.822,00). Selisih tersebut merupakan kenaikan piutang pajak penerangan jalan tahun 2019, atau merupakan selisih yang dipengaruhi oleh kenaikan piutang yang merupakan pajak penerangan jalan bulan Desember tahun 2019 sebesar Rp95.985.489,00 yang belum disetor oleh PT. PLN (Persero) Kotamobagu sehingga dicatat sebagai pendapatan-LO, dan penurunan piutang yang merupakan setoran pajak penerangan jalan bulan Desember 2018 oleh PT. PLN (Persero) Kotamobagu sebesar Rp77.956.158,00 yang hanya dicatat sebagai pendapatan - LRA.
- f) Pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan – LO tahun 2019 sebesar Rp557.011.720,00. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan pajak batu kapur - LO sebesar Rp180.545.564,00, pasir dan kerikil – LO sebesar Rp252.148.401,00, pasir kuarsa – LO sebesar Rp36.924.239,00, dan tanah diatome - LO sebesar Rp87.393.516,00. Tidak terdapat selisih antara Pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan – LO dengan Pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan – LRA.
- g) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO tahun 2019 sebesar Rp677.215.544,00. Terdapat selisih antara pendapatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan-LRA dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan-LO sebesar Rp67.797,00 (Rp677.283.341,00 - Rp677.215.544,00). Selisih tersebut dipengaruhi oleh

kenaikan dan penurunan piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2019, dimana kenaikan piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp407.440,00 merupakan pajak bumi dan bangunan pedesaan tahun 2019 yang belum disetor atas nama Musril Melanu NOP 711103200300200050 sebesar Rp10.000,00 dan NOP 711103200300200060 sebesar Rp397.440,00 sehingga dicatat sebagai pendapatan-LO, sedangkan penurunan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah sebesar Rp475.237,00 merupakan pelunasan piutang pajak bumi dan bangunan perkotaan tahun 2018 sebesar Rp41.307,00 serta pelunasan piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan tahun 2018 sebesar Rp433.930,00 yang dicatat sebagai pendapatan-LRA.

- h) Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO tahun 2019 sebesar Rp143.850.000,00. Realisasi penerimaan ini terdiri dari BPHTB Pemindahan Hak - LO sebesar Rp97.000.000,00 dan BPHTB Pemberian Hak Baru - LO sebesar Rp46.850.000,00. Tidak terdapat selisih antara pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO dengan pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA.

2) Pendapatan Retribusi Daerah - LO

**Tabel 5.76 Pendapatan Retribusi Daerah - LO**

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	427.316.440,00	364.676.250,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	79.774.000,00	89.799.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	1.735.000,00	40.327.500,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	132.240.000,00	160.650.000,00
Retribusi Tempat Pelelangan - LO	61.757.500,00	17.377.000,00
Retribusi Terminal - LO	1.720.000,00	2.170.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	1.779.000,00	4.767.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	5.750.000,00	3.050.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	24.772.370,00	33.876.300,00
Retribusi Izin Gangguan - LO	46.027,00	49.799.178,00
<b>JUMLAH</b>	<b>736.890.337,00</b>	<b>766.492.228,00</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Realisasi pendapatan retribusi daerah - LO tahun 2019 sebesar Rp736.890.337,00 dapat dirinci sebagai berikut.

- a) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan - LO tahun 2019 sebesar Rp427.316.440,00. Pendapatan ini merupakan realisasi dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO sebesar Rp87.171.500,00, pendapatan retribusi puskesmas keliling - LO sebesar Rp2.415.000,00, pendapatan retribusi puskesmas pembantu - LO sebesar Rp34.365.000,00, dan pendapatan retribusi rumah sakit umum daerah - LO sebesar Rp303.364.940,00. Tidak terdapat selisih antara pendapatan retribusi pelayanan kesehatan - LO dengan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan - LRA.
- b) Pendapatan retribusi pelayanan pasar - LO tahun 2019 sebesar Rp79.774.000,00. Pendapatan ini merupakan realisasi dari pendapatan retribusi pelayanan pasar - pelataran - LO sebesar Rp34.048.000,00,

pendapatan retribusi pelayanan pasar - los - LO sebesar Rp37.116.000,00 dan pendapatan retribusi pelayanan pasar - kios - LO sebesar Rp8.610.000,00. Tidak terdapat selisih antara pendapatan retribusi pelayanan pasar - LO dengan pendapatan retribusi pelayanan pasar - LRA.

- c) Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor - LO tahun 2019 sebesar Rp1.735.000,00. Pendapatan ini terdiri dari realisasi pendapatan retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Pick Up - LO sebesar Rp1.535.000,00 dan retribusi PKB - Mobil Barang/Beban - Truck - LO sebesar Rp200.000,00. Tidak terdapat selisih antara pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor - LO dengan pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor - LRA.
- d) Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah - LO tahun 2019 sebesar Rp 132.240.000,00. Realisasi pendapatan ini merupakan realisasi atas retribusi kendaraan bermotor - LO. Tidak terdapat selisih antara pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah - LO dengan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah - LRA.
- e) Retribusi tempat pelelangan - LO tahun 2019 sebesar Rp61.757.500,00. Pendapatan retribusi ini merupakan pendapatan retribusi tempat pelelangan ikan - LO. Tidak terdapat selisih antara retribusi tempat pelelangan - LO dengan retribusi tempat pelelangan - LRA.
- f) Pendapatan retribusi terminal - LO untuk tahun 2019 sebesar Rp1.720.000,00. Pendapatan ini merupakan pendapatan atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum - LO. Tidak terdapat selisih antara pendapatan retribusi terminal - LO dengan pendapatan retribusi terminal - LRA.
- g) Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga- LO tahun 2019 sebesar Rp1.779.000,00. Pendapatan ini merupakan realisasi dari pendapatan pelayanan tempat pariwisata - LO. Tidak terdapat selisih antara pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga- LO dengan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga- LRA.
- h) Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah - LO tahun 2019 sebesar Rp5.750.000,00. Pendapatan ini merupakan pendapatan atas penjualan hasil produksi usaha daerah - LO berupa benih ikan. Tidak terdapat selisih antara pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah - LO dengan pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah - LRA.
- i) Pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan - LO tahun 2019 sebesar Rp24.772.370,00. Tidak terdapat selisih antara pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan - LO dengan pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan - LRA.
- j) Pendapatan retribusi izin gangguan - LO tahun 2019 sebesar Rp46.027,00. Pendapatan ini merupakan realisasi atas pendapatan pemberian izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi - LO. Pendapatan ini juga merupakan selisih antara pendapatan retribusi izin gangguan - LO dengan pendapatan retribusi izin gangguan - LRA sebab hanya dicatat pada pendapatan - LO karena merupakan pendapatan diterima dimuka tahun 2018 yang sepenuhnya telah menjadi hak Pemerintah Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019 dan tidak dicatat pada pendapatan – LRA.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak memiliki pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO pada tahun 2019. Hal ini berbeda dengan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA yang memiliki realisasi sebesar Rp626.846.731,00. Realisasi tersebut merupakan penurunan piutang bagian laba (Devide:n) Tahun 2019 atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada PT. Bank SulutGo yang hanya dicatat penerimaannya pada pendapatan LRA.

4) Lain-Lain PAD yang Sah – LO

**Tabel 5.77 Lain-Lain PAD yang Sah - LO**

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	276.250.000,00	31.309.000,00
Penerimaan Jasa Giro - LO	1.060.814.733,00	1.545.439.795,00
Pendapatan Bunga - LO	2.960.416.656,00	3.005.208.319,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	718.964.774,00	1.458.222.755,90
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	176.165.438,00	130.487.136,00
Pendapatan Denda Pajak - LO	35.731.248,00	35.878.643,00
Pendapatan Denda Retribusi - LO	14.747.333,00	857.727,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	17.000.000,00	265.940.700,00
Pendapatan dari Pengembalian -LO	531.601.077,00	813.351.394,90
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO	18.592.000,00	-
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	29.662.000,00	27.946.000,00
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	97.892.441,06	24.132.096,70
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	3.644.688.377,00	3.293.257.812,00
Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN - LO	1.584.255.800,00	1.686.827.900,00
<b>JUMLAH</b>	<b>11.166.781.877,06</b>	<b>12.318.859.279,50</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah – LO tahun 2019 sebesar Rp11.166.781.877,06. Rincian Nilai Lain-lain PAD yang Sah – LO tahun 2019 menurut objek pendapatan sebagai berikut.

- Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan – LO sebesar Rp 276.250.000,00 merupakan pendapatan hasil penjualan peralatan dan mesin selama tahun 2019 yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah habis masa manfaatnya.
- Penerimaan jasa giro – LO tahun 2019 sebesar Rp1.060.814.733,00 terdiri dari jasa giro kas daerah - LO sebesar Rp1.028.623.432,00 dan jasa giro bendahara – LO sebesar Rp32.191.301,00. Tidak terdapat selisih antara penerimaan jasa giro – LO dengan penerimaan jasa giro – LRA.
- Pendapatan Bunga – LO tahun 2019 sebesar Rp2.960.416.656,00. Pendapatan bunga ini merupakan realisasi atas pendapatan bunga deposito – LO, dimana pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menempatkan deposito pada PT. Bank Sulutgo Cabang Molibagu. Tidak terdapat selisih antara pendapatan bunga – LO dengan pendapatan bunga – LRA.

- d) Tuntutan ganti kerugian daerah – LO tahun 2019 sebesar Rp718.964.774,00 diperoleh dari penerimaan TGR daerah terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan – LO.
- e) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan- LO tahun 2019 sebesar Rp176.165.438,00 terdiri dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang kesehatan - LO sebesar Rp43.464.881,00, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang pekerjaan umum - LO sebesar Rp114.107.514,00, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang perencanaan pembangunan - LO sebesar Rp15.629.280,00, dan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM – LO sebesar Rp2.963.763,00. Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan- LO dengan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan- LRA.
- f) Pendapatan Denda Pajak – LO tahun 2019 sebesar Rp35.731.248,00. Pendapatan ini terdiri dari pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran pajak restoran - LO sebesar Rp18.866.736,00, pendapatan denda pajak reklame - LO sebesar Rp20.790,00, dan pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan – LO sebesar Rp16.843.722,00. Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Denda Pajak – LO dengan Pendapatan Denda Pajak – LRA.
- g) Pendapatan Denda Retribusi – LO tahun 2019 sebesar Rp14.747.333,00 merupakan realisasi atas Pendapatan Denda Retribusi pelayanan kesehatan - LO.
- h) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO tahun 2019 sebesar Rp 17.000.000,00. Pendapatan ini merupakan hasil eksekusi atas jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan ruang kelas baru MIS Batuhamba tahun 2017 pada SKPD Dinas Pendidikan.
- i) Pendapatan dari Pengembalian-LO tahun 2019 sebesar Rp531.601.077,00 terdiri dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan – LO sebesar Rp15.776.700,00, pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas - LO sebesar Rp103.775.500,00, pendapatan dari pengembalian uang muka - LO sebesar Rp116.357.400,00, pengembalian kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan - LO sebesar Rp207.566.700,00, dan pengembalian kelebihan pembayaran lainnya sebesar Rp88.124.777,00. Terdapat selisih antara Pendapatan dari Pengembalian – LRA dengan Pendapatan dari Pengembalian LO sebesar Rp40.348.300,00 (Rp571.949.377,00 - Rp531.601.077,00). Selisih tersebut disebabkan oleh penurunan piutang dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp3.008.300,00 dengan penurunan piutang dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya sebesar Rp37.340.000,00.
- j) Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat – LO tahun 2019 sebesar Rp18.592.000,00. Pendapatan ini merupakan penerimaan biaya pelatihan dasar CPNS Golongan III tahun 2019 dimana pesertanya bukan merupakan calon pegawai negeri sipil Kab. Bolaang Mongondow Selatan yakni atas nama Devied Pittersen Ruus dan Jenifer Stephanie Porong.



- k) Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO tahun 2019 sebesar Rp29.662.000,00 merupakan pendapatan diterima dimuka berupa Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa – LO bangunan kantin selama tahun 2018 yang telah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019. Terdapat selisih antara Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LRA dengan Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO sebesar Rp4.000.000,00. Selisih tersebut merupakan penurunan piutang pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah tahun 2019 yang hanya dicatat penerimaannya pada pendapatan – LRA.
- l) Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO tahun 2019 sebesar Rp97.892.441,06. Terdapat selisih antara Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO dengan Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LRA tahun 2019 sebesar Rp94.557.534,06. Selisih tersebut merupakan pendapatan lain-lain PAD yang sah lainnya yang hanya dicatat pada pendapatan - LO berupa pelunasan utang beban sebesar Rp38.742.619,00, penerimaan kembali piutang yang telah disisihkan atau beban penyisihan yang diterima kembali pada tahun berikutnya sebesar Rp24.236.565,06, penghapusan utang pengadaan aset tetap yang disebabkan adanya surat pernyataan dari Pihak Ketiga bahwa tidak akan menagih sebesar Rp25.672.350,00, dan penghapusan utang jaminan pemeliharaan pekerjaan yang disebabkan oleh adanya surat pernyataan dari Pihak Ketiga bahwa tidak akan menagih sebesar Rp5.906.000,00.
- m) Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO tahun 2019 sebesar Rp3.644.688.377,00. Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO dengan Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LRA tahun 2019.
- n) Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN – LO tahun 2019 sebesar Rp1.584.255.800,00. Terdapat selisih antara Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN – LRA dengan Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN – LO sebesar Rp26.591.700,00. Selisih tersebut dipengaruhi oleh penurunan dan kenaikan piutang pendapatan dana non kapitasi JKN dimana penurunannya berupa setoran dari pihak BPJS sebesar Rp301.616.600,00, dan kenaikan piutang sebesar Rp275.024.900,00 yang merupakan klaim dana non kapitasi tahun 2019 yang belum disetor oleh pihak BPJS sehingga dicatat sebagai pendapatan-LO.

b. Pendapatan Transfer – LO

Realisasi Pendapatan Transfer – LO tahun 2019 sebesar Rp499.731.025.442,00 yang dapat dirinci sebagai berikut.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO tahun 2019 sebesar Rp485.987.137.173,00. Terdapat selisih antara pendapatan transfer pemerintah pusat-LO jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-LRA. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA tahun 2019 menurut objek pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.78 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dan LRA**

URAIAN	LO 2019 Rp	LRA 2019 Rp	SELISIH 2019 Rp
Bagi Hasil Pajak	14.026.421.822,00	8.148.848.231,00	5.877.573.591,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	21.514.874.004,00	18.949.338.819,00	2.565.535.185,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	364.595.503.000,00	364.595.503.000,00	-
Dana Alokasi Khusus (DAK)	85.850.338.347,00	85.850.338.347,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>485.987.137.173,00</b>	<b>477.544.028.397,00</b>	<b>8.443.108.776,00</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Selisih pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp5.877.573.591,00 dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sebesar Rp2.565.535.185 berasal dari penetapan alokasi kurang bayar dana bagi hasil tahun 2019 sebesar Rp4.917.388.275,00 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 dan kurang bayar dana bagi hasil tahun 2018 sebesar Rp3.525.720.501,00 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak memiliki Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO.

3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO tahun 2019 sebesar Rp13.743.888.269,00 yang dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.79 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO**

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor - LO	2.759.374.568,00	2.444.894.510,00
Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	2.039.624.668,00	2.307.186.714,00
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	5.918.153.812,00	6.015.980.559,00
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO	45.501.497,00	18.758.764,00
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok - LO	2.981.233.724,00	3.554.873.986,00
<b>JUMLAH</b>	<b>13.743.888.269,00</b>	<b>14.341.694.533,00</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA sebesar Rp14.031.200.625,00, terdapat selisih sebesar Rp287.312.356,00. Selisih tersebut dipengaruhi oleh penurunan piutang pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya atas DBH PKB, DBH BBN KB, DBH PBB KB dan DBH PAP bulan Oktober s.d Desember 2018 yang telah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp2.428.443.196,00 serta Piutang Pajak Rokok sebesar Rp645.787.317,00, dengan kenaikan piutang pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya atas DBH PKB, DBH BBN KB, DBH PBB KB dan DBH PAP bulan Oktober s.d Desember 2019 sebesar Rp1.915.262.737,00 dan Pajak Rokok bulan Desember 2019 sebesar Rp871.655.420,00. Adapun rincian selisih tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.80 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO dan LRA**

URAIAN	LO 2019 Rp	LRA 2019 Rp	SELISIH 2019 Rp
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	2.759.374.566,00	2.876.000.641,00	116.626.073,00
Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.039.624.668,00	2.236.483.044,00	196.858.376,00
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.918.153.812,00	6.122.322.369,00	204.168.557,00
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	45.501.497,00	41.028.950,00	(4.472.547,00)
Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	2.981.233.724,00	2.755.365.621,00	(225.868.103,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>13.743.888.269,00</b>	<b>14.031.200.625,00</b>	<b>287.312.356,00</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

4) Bantuan Keuangan – LO

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak memiliki pendapatan berupa Bantuan Keuangan – LO tahun 2019. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan – LO sebesar Rp829.255.500,00. Bantuan keuangan tersebut merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Bidang Infrastruktur Olahraga. Tidak terdapat selisih antara pendapatan Bantuan Keuangan – LO dengan Bantuan Keuangan – LRA.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO tahun 2019 sebesar Rp25.282.637.367,20 yang diperoleh dari Pendapatan Hibah - LO. Terdapat selisih antara Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO dengan Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LRA sebesar Rp54.192.685.632,80. Selisih tersebut dipengaruhi oleh adanya pencatatan realisasi Dana Desa tahun 2019 pada pendapatan LRA sebesar Rp68.752.683.000,00 dan pendapatan hibah lainnya sebesar Rp14.559.997.367,20 yang hanya dicatat pada pendapatan LO. Adapun selisih pendapatan hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.81 Pendapatan Hibah – LO dan LRA**

URAIAN	LO 2019 Rp	LRA 2019 Rp	SELISIH 2019 Rp
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	12.920.420.292,20	-	12.920.420.292,20
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	1.417.077.075,00	-	1.417.077.075,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO	155.000.000,00	-	155.000.000,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat - LO	67.500.000,00	-	67.500.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS - LRA	10.722.640.000,00	10.722.640.000,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>25.282.637.367,20</b>	<b>10.722.640.000,00</b>	<b>14.559.997.367,20</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Adapun selisih pendapatan hibah – LO dan pendapatan hibah – LRA dapat diuraikan sebagai berikut.

Pendapatan hibah dari Pemerintah – LO terdiri dari :

- Hibah Uang berupa penerimaan Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kegiatan Bimbingan Teknis Bindikel TA. 2019 sebesar Rp157.447.000,00.
- Hibah Uang berupa penerimaan Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Kegiatan Sosialisasi Bindikel TA. 2019 sebesar Rp40.280.000,00.
- Hibah Uang berupa penerimaan Bantuan Pemerintah dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bidang Mesin dan Teknik Industri Bandung (Tematik SD) Kemendikbud melalui PKP Berbasis Zonasi TA. 2019 sebesar Rp60.000.000,00.
- Hibah Uang berupa penerimaan Bantuan Pemerintah dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Matematika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Diklat PKB melalui PKP Berbasis Zonasi TA. 2019 sebesar Rp28.062.000,00.
- Hibah Uang berupa penerimaan Bantuan Pemerintah dari Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Seni Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk Diklat Guru Sasaran melalui PKP Berbasis Zonasi TA. 2019 sebesar Rp26.112.000,00.
- Hibah Uang berupa penerimaan Bantuan Pemerintah dari LPPPTK Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemendikbud (TIK SMP) melalui PKP Berbasis Zonasi TA. 2019 sebesar Rp27.081.000,00.
- Hibah Uang berupa penerimaan Bantuan Pemerintah dari PPPPTK TK dan PLB Kemendikbud melalui PKP Mata Pelajaran Tematik TK TA. 2019 sebesar Rp30.000.000,00.
- Hibah Aset Tetap berupa Hibah Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Penimbunan Desa Pinolantungan Ditjen Cipta Karya sebesar Rp6.953.100.000,00.
- Hibah aset tetap berupa Kapal Banawa Nusantara 48<sup>id</sup> dari Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp2.286.427.793,00.
- Hibah aset tetap berupa Instalasi Pengolahan Sampah Organik Lainnya Desa Molibagu Dusun III Ditjen Cipta Karya sebesar Rp480.500.000,00.
- Hibah aset tetap berupa 2 Unit Bus Ukuran Sedang Sekolah sebesar Rp663.000.000,00.
- Hibah aset tetap berupa Gedung Bangunan Pasar Tradisional Desa Toluaya Kemerkop dan UKM sebesar Rp985.163.000,00.
- Hibah Aset Tetap Dari Ditjen Perkebunan Satker Dekonsentrasi Dinas Perkebunan Provinsi Sulut sebesar Rp12.615.000,00.
- Penerimaan Hibah berupa barang dari Kementerian Kesehatan RI TA. 2019 sebesar Rp277.005.456,00.
- Hibah aset tetap berupa peralatan kesehatan Dari Ditkesling Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI TA. 2019 sebesar Rp43.014.043,20.
- Hibah aset tetap dan barang Dari Ditjen Dikdasmen sebesar Rp420.613.000,00.
- Hibah Uang berupa penerimaan Dana Bantuan Pemerintah Sekolah Model, Pembinaan Kurikulum Zonasi Sekolah dan Pembinaan Mutu Pendidikan TA. 2019 sebesar Rp430.000.000,00.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO terdiri dari:

- Hibah Aset Tetap Dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahap IV sebesar Rp822.298.570,00

- Penerimaan Hibah Barang dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulut TA. 2019 sebesar Rp594.778.505,00.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO sebesar Rp155.000.000,00 merupakan hibah uang yang dibelikan aset tetap berupa 5 unit Kontainer Sampah dari CSR PT Bank SulutGo. Sedangkan pendapatan hibah dari kelompok masyarakat – LO sebesar Rp67.500.000,00 merupakan penerimaan hibah aset tetap berupa 13 bidang tanah dari masyarakat Desa Lion.

#### 5.4.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Total beban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019 adalah sebesar Rp513.981.736.933,90. Rincian beban tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut.

##### a. Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai – LO tahun 2019 sebesar Rp168.141.752.497,00 terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan - LO sebesar Rp125.283.490.205,00, Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO sebesar Rp41.207.183.956,00 dan Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO sebesar Rp1.651.078.336,00. Terdapat selisih antara beban pegawai – LO dengan belanja pegawai – LRA sebesar Rp64.994.706,00. Selisih tersebut disebabkan oleh penurunan utang beban pegawai tahun 2018 yang telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2019 sebesar Rp31.100.516,00, dengan penambahan utang beban pegawai atas gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan tagihan pembayaran gaji dan tunjangannya namun belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019 sebesar Rp96.095.222,00. Adapun rincian selisih beban pegawai - LO dan belanja pegawai – LRA dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.82 Beban Pegawai – LO dan Belanja Pegawai - LRA**

URAIAN	LO 2019 Rp	LRA 2019 Rp	SELISIH 2019 Rp
Gaji dan Tunjangan	125.283.490.205,00	125.218.495.499,00	64.994.706,00
Tambahan Penghasilan PNS	41.207.183.956,00	41.207.183.956,00	0,00
Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.651.078.336,00	1.651.078.336,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>168.141.752.497,00</b>	<b>168.076.757.791,00</b>	<b>64.994.706,00</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

##### b. Beban Persediaan

Beban Persediaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 sebesar Rp24.098.195.418,13 yang dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.83 Beban Persediaan**

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Beban Bahan Pakai Habis	9.335.255.345,38	9.111.052.975,62
Beban Persediaan Bahan/ Material	3.996.596.625,75	4.399.067.854,79
Beban Cetak dan Penggandaan	3.495.268.947,00	2.385.673.061,00
Beban Makanan dan Minuman	5.765.609.650,00	5.684.830.455,00
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	380.646.100,00	424.722.600,00
Beban Pakaian Kerja	252.793.400,00	303.198.500,00

Beban Pakaiian khusus dan hari-hari tertentu	594.262.350,00	666.200.000,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	277.763.000,00	10.437.497.600,00
<b>JUMLAH</b>	<b>24.098.195.418,13</b>	<b>33.414.243.046,41</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Terdapat selisih antara Belanja Barang yang menghasilkan persediaan di LRA dengan Beban Persediaan sebesar Rp912.764.491,87 (Rp25.010.959.910,00 - Rp24.098.195.418,13). Selisih tersebut merupakan selisih antara penambahan dan pengurangan beban persediaan selama tahun 2019. Adapun perhitungan beban persediaan akhir tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.84 Perhitungan Beban Persediaan**

URAIAN	SALDO 2019 (Rp)
<b>Belanja Barang Yang Menghasilkan Persediaan Tahun 2019</b>	<b>25.010.959.910,00</b>
<b>Penambahan Beban Persediaan Tahun 2019</b>	<b>8.198.649.143,95</b>
Saldo Awal Beban Persediaan (Persediaan Akhir Tahun 2018)	5.765.532.025,25
Penerimaan Hibah Tahun 2019	1.102.389.811,00
Pengakuan Utang Beban dari Barang Yang Menghasilkan Persediaan Tahun 2019	385.271.500,00
Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Persediaan Tahun 2019	3.160.000,00
Koreksi Nilai Persediaan (Koreksi Ekuitas)	942.295.807,70
<b>Pengurangan Beban Persediaan Tahun 2019</b>	<b>9.111.413.635,82</b>
Pelunasan Utang Beban Persediaan Tahun 2019	14.928.660,00
Persediaan Akhir Tahun 2019	8.782.175.116,94
Koreksi Persediaan ke Koreksi Ekuitas (Barang Rusak/Expired)	127.565.858,88
Koreksi Persediaan ke Piutang Lainnya (Cadangan Persediaan Pangan Yang di pinjam Pengelola)	186.744.000,00
<b>Beban Persediaan Akhir Tahun 2019</b>	<b>24.098.195.418,13</b>

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan berbasis akrual pendekatan yang dilakukan secara sistematis menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan yaitu pada saat SP2D belanja yang menghasilkan barang persediaan diterbitkan, aplikasi secara otomatis melakukan pembukuan pada buku besar akun beban persediaan, sehingga seluruh belanja yang menghasilkan barang persediaan diakui sebagai beban persediaan terlebih dahulu kemudian dilakukan koreksi pada akhir tahun sesuai dengan hasil opname sisa barang persediaan.

c. Beban Jasa - LO

Beban jasa – LO tahun 2019 sebesar Rp99.945.518.363,00. Rincian Beban Jasa – LO tahun 2019 menurut objek beban dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.85 Beban Jasa - LO**

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Beban Jasa Kantor	52.407.438.939,00	52.305.671.651,00
Beban Premi Asuransi	11.680.622.751,00	7.707.458.196,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.390.536.164,00	2.211.397.878,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	279.190.000,00	1.254.320.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	593.078.600,00	963.677.500,00
Beban Jasa Konsultasi	328.615.000,00	2.424.800.000,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	158.630.137,00	134.684.931,00

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	701.615.000,00	941.221.000,00
Beban Honorarium PNS - LO	7.987.833.500,00	10.961.085.000,00
Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	394.500.000,00	894.500.000,00
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	-	184.762.000,00
Beban Barang Dana BOS	4.925.134.853,00	-
Beban Beasiswa Pendidikan Non PNS	1.561.500.000,00	1.580.500.000,00
Beban Jasa Pemeriksaan Kesehatan	75.000.000,00	-
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.149.605.000,00	3.334.376.450,00
Beban Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	548.148.000,00	597.162.500,00
Beban Pengujian Kualitas Lingkungan*	30.000.000,00	42.000.000,00
Beban Barang dibawah Kapitalisasi	4.226.042.703,00	2.988.904.501,00
Beban Pegawai Dana BOS	564.595.000,00	-
Beban Transportasi dan Akomodasi	3.249.532.716,00	1.812.583.197,00
Beban Operasional Pengawasan	2.693.900.000,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>99.945.518.363,00</b>	<b>90.339.104.804,00</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Terdapat selisih antara Beban Jasa-LO dengan Belanja Jasa di LRA sebesar Rp96.517.612,00 (Rp99.945.518.363,00 - Rp99.849.000.751,00). Selisih tersebut merupakan selisih antara penambahan dan pengurangan beban jasa selama tahun 2019. Adapun perhitungan beban jasa akhir tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.86 Perhitungan Beban Jasa - LO**

URAIAN	SALDO 2019 (Rp)
<b>Belanja Jasa - LRA Tahun 2019</b>	<b>99.849.000.751,00</b>
<b>Penambahan Beban Jasa Tahun 2019</b>	<b>3.987.269.221,00</b>
Beban d' bayar dimuka tahun 2018	368.725.131,00
Penerimaan Hibah Tahun 2019	562.205.000,00
Pengakuan Utang Beban Tahun 2019	525.172.404,00
Reklasifikasi Aset Tetap ke Beban	1.056.546.586,00
Reklasifikasi Beban	1.474.620.100,00
<b>Pengurangan Beban Jasa Tahun 2019</b>	<b>3.890.751.609,00</b>
Pelunasan Utang Beban Tahun 2019	83.519.533,00
Reklasifikasi Beban	1.686.706.600,00
Reklasifikasi Beban ke Aset Tetap	2.052.615.878,00
Beban dibayar dimuka tahun 2019	34.913.698,00
Persediaan Akhir Tahun 2019 (Persediaan BOS)	32.995.900,00
<b>Beban Jasa Akhir Tahun 2019</b>	<b>99.945.518.363,00</b>

Sumber : Diolah

d. Beban Pemeliharaan

**Tabel 5.87 Beban Pemeliharaan**

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	5.150.681.082,00	4.600.249.683,00
Beban Pemeliharaan	4.728.235.835,00	5.380.797.242,00
<b>JUMLAH</b>	<b>9.878.916.917,00</b>	<b>9.981.046.925,00</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2019 sebesar Rp9.878.916.917,00. Terdapat selisih antara beban pemeliharaan dan belanja pemeliharaan di LRA sebesar Rp40.514.762,00 (Rp9.878.916.917,00 - Rp9.838.402.155,00). Selisih tersebut disebabkan oleh adanya penambahan dan pengurangan beban pemeliharaan selama tahun 2019. Penambahan beban pemeliharaan terdiri dari pengakuan utang beban sebesar Rp46.406.900,00 dan beban dibayar dimuka tahun 2018 sebesar Rp73.287.238,00, sedangkan pengurangan beban terdiri dari pelunasan utang beban sebesar Rp2.378.400,00, beban dibayar dimuka tahun 2019 sebesar Rp71.800.976,00 dan persediaan akhir tahun sebesar Rp5.000.000,00.

e. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 sebesar Rp52.112.043.204,00. Beban perjalanan dinas ini terdiri dari beban perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp2.814.387.889,00 dan beban perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp49.297.655.315,00. Tidak terdapat selisih antara beban perjalanan dinas dengan belanja perjalanan dinas – LRA tahun 2019.

f. **Beban Hibah**

Beban hibah tahun 2019 sebesar Rp2.896.570.262,00. Beban hibah ini merupakan beban hibah kepada organisasi kemasyarakatan. Terdapat selisih antara belanja hibah dengan beban hibah sebesar Rp7.006.264.650,00 (Rp9.902.834.912,00 -Rp2.896.570.262,00). Selisih tersebut merupakan selisih antara penambahan dan pengurangan beban hibah yang dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.88 Perhitungan Beban Hibah**

URAIAN	SALDO 2019 (Rp)
<b>Belanja Hibah - LRA tahun 2019</b>	<b>9.902.834.912,00</b>
<b>Penambahan Beban Hibah</b>	<b>107.469.350,00</b>
Koreksi aset tetap ke beban hibah	89.576.850,00
Reklasifikasi beban barang dibawah kapitalisasi ke beban hibah	17.892.500,00
<b>Pengurangan Beban Hibah</b>	<b>7.113.734.000,00</b>
Koreksi ekuitas lainnya	17.100.000,00
Persediaan Akhir Beban Hibah	7.051.567.000,00
Reklasifikasi beban hibah ke aset tetap	43.417.000,00
Reklasifikasi beban hibah ke beban barang dibawah kapitalisasi	1.650.000,00
<b>Beban Hibah Akhir tahun 2019</b>	<b>2.896.570.262,00</b>

Sumber : Diolah

g. **Beban Bantuan Sosial**

Beban bantuan sosial tahun 2019 sebesar Rp8.747.223.690,00. Terdapat selisih antara belanja bantuan sosial dengan beban bantuan sosial sebesar Rp6.872.420.000,00 (Rp15.619.643.690,00 - Rp8.747.223.690,00). Selisih tersebut disebabkan adanya pengurangan dan penambahan beban bantuan sosial selama tahun 2019. Pengurangan beban bantuan sosial sebesar Rp7.069.114.000,00 merupakan persediaan akhir Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat tahun 2019 berupa Rumah Layak Huni. Sedangkan penambahan beban bantuan sosial terdiri dari reklasifikasi beban jasa konsultansi pengawasan ke beban bantuan sosial sebesar Rp194.194.000,00 dan penerimaan hibah sebesar Rp2.500.000,00.



h. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Bebarj penyusutan dan amortisasi tahun 2019 sebesar Rp107.235.193.921,00 dengan rincian berdasarkan objek beban sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.89 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	19.797.559.258,33	28.481.706.629,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.193.373.119,00	6.690.494.110,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	79.849.720.627,00	64.369.005.359,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	120.247.916,67	264.125.664,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	274.293.000,00	219.058.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>107.235.193.921,00</b>	<b>100.024.389.762,00</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

i. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2019 sebesar Rp84.055.314,77 yang dapat dirinci sesuai dengan objek beban sebagai berikut.

**Tabel 5.90 Beban Penyisihan Piutang**

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Beban Penyisihan Piutang Pajak	25.215.935,59	134.375.110,59
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	3.134.233,66
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.689.244,50	2.141.304,50
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	42.215.543,89	-
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya	13.934.590,79	15.371.152,58
<b>JUMLAH</b>	<b>84.055.314,77</b>	<b>155.021.801,33</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

j. Beban Lain-lain

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk tahun 2019 tidak memiliki beban lain-lain .

k. Beban Transfer

Beban transfer Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp40.842.267.347,00 yang dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.91 Beban Transfer**

URAIAN	SALDO 2019 Rp	SALDO 2018 Rp
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	627.918.796,00	671.670.048,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	39.036.821.200,00	39.303.813.370,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	177.527.351,00	196.117.350,00
<b>JUMLAH</b>	<b>40.842.267.347,00</b>	<b>41.171.600.768,00</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

1) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2019 sebesar Rp627.918.796,00. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah ini merupakan beban transfer bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa. Terdapat selisih antara Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dengan beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp54.047.092,00 (Rp681.965.888,00 - Rp627.918.796,00). Selisih tersebut merupakan selisih antara penurunan utang beban transfer sebesar Rp146.854.219,00 dengan kenaikan utang beban transfer tahun 2019 sebesar Rp92.807.127,00. Adapun alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019.

2) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00. Tidak terdapat selisih antara Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dengan belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya - LRA. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah lainnya merupakan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atas pelaksanaan pembangunan Stand Sulawesi Utara di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) guna mengoptimalkan fungsi dan peran anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

3) Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa

Beban transfer bantuan keuangan ke desa tahun 2019 sebesar Rp39.036.821.200,00 merupakan beban transfer bantuan keuangan ke Desa berupa Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Terdapat selisih antara beban transfer Bantuan Keuangan ke Desa dengan belanja bantuan keuangan ke Desa sebesar Rp68.752.683.000,00 (Rp107.789.504.200,00 - Rp39.036.821.200,00). Selisih tersebut merupakan transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat melalui APBD Kabupaten ke Pemerintah Desa, dimana Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak memiliki hak untuk menggunakan dana tersebut melainkan memiliki kewajiban untuk menyalurkan kembali kepada yang berhak menerima transfer tersebut.

4) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Beban transfer bantuan keuangan lainnya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019 sebesar Rp177.527.351,00. Beban transfer bantuan keuangan lainnya ini merupakan bantuan kepada partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar Rp108.980.300,00, Partai Golongan Karya (Golkar) sebesar Rp31.548.184,00, Partai Demokrat sebesar Rp15.043.600,00, Partai Persatuan Pembangunan sebesar Rp10.300.767,00 dan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) sebesar Rp11.654.500,00. Tidak terdapat selisih antara Beban transfer bantuan keuangan lainnya dengan belanja bantuan keuangan lainnya.

### 5.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Sedangkan defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memperoleh surplus dari kegiatan operasi sebesar Rp27.951.010.567,36. Surplus ini diperoleh dari pendapatan – LO sebesar Rp541.932.747.501,26 dikurangi dengan beban operasi selama tahun 2019 sebesar Rp513.981.763.933,90.

### 5.4.4. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/defisit sebelum pos luar biasa merupakan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak memiliki kegiatan non operasional selama tahun 2019, sehingga surplus/defisit sebelum pos luar biasa hanya diperoleh dari surplus/defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp27.951.010.567,36.

### 5.4.5. Pos Luar Biasa

Terdapat realisasi Pos Luar Biasa pada Beban Luar Biasa tahun 2019 sebesar Rp117.003.000,00. Beban luar biasa ini merupakan pengembalian sisa dana bantuan khusus keuangan bidang infrastruktur olahraga kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

### 5.4.6. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki Surplus – LO sebesar Rp27.834.007.567,36. Saldo surplus – LO ini kemudian menambah ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2019. Adapun perhitungan surplus/defisit – LO adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN - LO	541.932.747.501,26
BEBAN	<u>513.981.736.933,90</u>
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	27.951.010.567,36
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	<u>-</u>
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	27.951.010.567,36
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	<u>(117.003.000,00)</u>
SURPLUS/DEFISIT-LO	27.834.007.567,36

## 5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

**Tabel 5.92 Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

URAIAN	2019 Rp	2018 Rp
Arus Kas Masuk	588.823.971.270,00	591.018.302.191,00
Arus Kas Keluar	490.175.642.852,00	476.015.114.190,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>98.648.328.418,00</b>	<b>115.003.188.001,00</b>

Sumber : Laporan Arus Kas Tahun 2019

Jumlah saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp98.648.328.418,00. Saldo tersebut menunjukkan terjadi penurunan kas bersih sebesar Rp16.354.859.583,00 jika dibandingkan dengan tahun 2018.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi berasal dari selisih antara arus kas masuk dari pendapatan operasi (pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan bagi hasil pajak Provinsi, pendapatan hibah dan pendapatan lainnya) dengan arus kas keluar dari belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, transfer bagi hasil pajak daerah, transfer bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, transfer bantuan keuangan ke desa, dan transfer bantuan keuangan lainnya). Adanya selisih positif antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi menunjukkan bahwa belanja operasi mampu dibiayai oleh pendapatan operasi yang diperoleh selama tahun 2019.

Jika dibandingkan dengan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019, terdapat selisih arus kas masuk dari aktivitas operasi pada pos Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp276.250.000,00, serta arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar minus Rp109.766.000.439,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.93 Pendapatan – LRA dan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - LAK**

URAIAN	LRA Rp	LAK Rp	SELISIH Rp
Pendapatan Pajak Daerah	5.542.813.864,00	5.542.813.864,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	736.844.310,00	736.844.310,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	626.846.731,00	626.846.731,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah	11.143.164.343,00	10.866.914.343,00	276.250.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	477.544.028.397,00	477.544.028.397,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemda Lainnya	14.031.200.625,00	14.031.200.625,00	0,00
Pendapatan Hibah	10.722.640.000,00	10.722.640.000,00	0,00
Pendapatan Lainnya	68.752.683.000,00	68.752.683.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>589.100.221.270,00</b>	<b>588.823.971.270,00</b>	<b>276.250.000,00</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

Selisih antara pendapatan – LRA dan arus kas masuk dari aktivitas operasi – LAK pada pos lain-lain PAD yang sah sebesar Rp276.250.000,00 disebabkan oleh pendapatan yang bersumber dari penjualan peralatan/mesin yang merupakan arus kas masuk dari aktivitas investasi bukan dari aktivitas operasi. Sedangkan selisih minus Rp109.766.000.439,00 merupakan arus kas keluar dari aktivitas operasi berupa Belanja Tak Terduga sebesar Rp117.003.000,00, transfer bagi hasil pajak daerah sebesar Rp681.965.888,00, transfer bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya sebesar Rp1.000.000.000,00, transfer bantuan keuangan ke Desa sebesar Rp107.789.504.200,00, dan transfer bantuan keuangan lainnya sebesar

Rp177.527.351,00 dimana pada laporan realisasi anggaran diklasifikasikan bukan sebagai Belanja Operasi tapi sebagai Transfer. Adapun rinciannya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.94 Belanja Operasi – LRA dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – LAK**

URAIAN	LRA Rp	LAK Rp	SELISIH Rp
Belanja Pegawai	168.076.757.791,00	168.076.757.791,00	-
Belanja Barang dan Jasa	186.810.406.020,00	186.810.406.020,00	-
Belanja Hibah	9.902.834.912,00	9.902.834.912,00	-
Belanja Bantuan Sosial	15.619.643.690,00	15.619.643.690,00	-
Belanja Tak Terjuga	-	117.003.000,00	(117.003.000,00)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	-	681.965.888,00	(681.965.888,00)
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	-	107.789.504.200,00	(107.789.504.200,00)
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	177.527.351,00	(177.527.351,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>380.409.642.413,00</b>	<b>490.175.642.852,00</b>	<b>(109.766.000.439,00)</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

**Tabel 5.95 Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

URAIAN	2019 Rp	2018 Rp
Arus Kas Masuk	276.250.000,00	31.309.000,00
Arus Kas Keluar	93.210.597.555,00	150.320.829.452,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(92.934.347.555,00)</b>	<b>(150.289.520.452,00)</b>

Sumber : Laporan Arus Kas Tahun 2019

Arus kas bersih dari aktivitas investasi diperoleh dari selisih antara arus kas masuk dari pendapatan penjualan aset tetap dengan arus kas keluar berupa belanja modal. Pada tahun 2019 terdapat arus kas masuk dari hasil penjualan aset tetap berupa peralatan/mesin sebesar Rp276.250.000,00 akan tetapi lebih kecil dari arus kas keluar sebesar Rp93.210.597.555,00 sehingga menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas investasi minus sebesar Rp92.934.347.555,00. Hal ini menunjukkan bahwa arus kas keluar berupa belanja modal tidak dapat dibiayai oleh arus kas masuk dari aktivitas Investasi.

Jumlah saldo arus kas keluar dari aktivitas investasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp93.210.597.555,00. Saldo tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan atas realisasi belanja modal sebesar Rp57.110.231.897,00 jika dibandingkan dengan belanja modal tahun 2018 yang mencapai Rp150.320.829.452,00. Tidak terdapat selisih antara Belanja Modal - LRA dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi – LAK. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.96 Belanja Modal – LRA dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi - LAK**

URAIAN	LRA Rp	LAK Rp	SELISIH Rp
Belanja Modal Tanah	638.545.000,00	638.545.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.807.122.512,00	18.807.122.512,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.854.664.401,00	25.854.664.401,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.983.703.366,00	46.983.703.366,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	926.562.276,00	926.562.276,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>93.210.597.555,00</b>	<b>93.210.597.555,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Daftar Saldo Buku Besar Tahun 2019

c. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

**Tabel 5.97 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

URAIAN	2019 Rp	2018 Rp
Arus Kas Masuk	37.108.102.450,00	43.943.141.425,00
Arus Kas Keluar	35.555.631.416,00	42.799.010.923,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>1.552.471.034,00</b>	<b>1.144.130.502,00</b>

Sumber : Laporan Arus Kas Tahun 2019

Jumlah saldo arus kas bersih dari aktivitas Transitoris per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.552.471.034,00. Saldo tersebut diperoleh dari selisih antara arus kas masuk dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp37.108.102.450,00 dengan arus kas keluar dari aktivitas transitoris sebesar Rp35.555.631.416,00.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp1.552.471.034,00 terdiri dari:

- Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) PPh Ps. 21 sebesar Rp91.022.852,00, PPh Ps. 22 sebesar Rp2.055.150,00, PPh Ps. 23 sebesar Rp4.132.837,00 dan PPN sebesar Rp26.389.423,00 yang belum disetorkan oleh BUD ke Kas Negara per 31 Desember 2019.
- Penambahan Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan tahun 2019 sebesar Rp594.866.235,00,
- Zakat Profesi yang belum disetorkan ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp830.336.383,00, dan
- Koreksi SiLPA sebesar Rp3.825.654,00.

Dikurangi dengan Koreksi Saldo Awal Utang PFK Dana BOS tahun 2018 SDN Toluaya dan SMPN Momalia atas Utang PFK PPh Ps. 21 yang seharusnya tidak dikenakan kepada pegawai negeri sipil Golongan II sebesar Rp157.500,00.

d. Saldo Akhir Kas

Saldo awal kas tahun 2019 merupakan Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BOS, Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan Kas di Bendahara Non Kapitasi tahun 2018, sedangkan saldo akhir kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp31.899.388.918,47 terdiri dari Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BOS, Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan Kas di Bendahara Non Kapitasi sebesar Rp31.899.338.918,47 ditambah Kas Lainnya sebesar Rp50.000,00.

**Tabel 5.98 Perhitungan Saldo Akhir Kas**

URAIAN	2019 Rp	2018 Rp
Kenaikan / (Penurunan) Kas	7.266.451.897,00	(34.142.201.949,00)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara BOS, Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Bendahara Non Kapitasi	24.632.887.021,47	58.775.088.970,47
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara BOS, Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Bendahara Non Kapitasi	31.899.338.918,47	24.632.887.021,47
Kas di BUD	-	-
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	-
Kas di Bendahara BOS	-	-
Kas Lainnya	50.000,00	429.000,00
Setara Kas	-	-
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>31.899.388.918,47</b>	<b>24.633.316.021,47</b>

Sumber : Laporan Arus Kas Tahun 2019

## 5.6.Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas akhir tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar Rp1.116.401.846.025,13. Ringkasan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut.

Tabel 5.99 Perubahan Ekuitas

URAIAN	2019
EKUITAS AWAL	1.088.403.675.232,84
SURPLUS/DEFISIT-LO	27.834.007.567,36
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Nilai Persediaan	814.729.948,82
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(650.566.723,89)
EKUITAS AKHIR	1.116.401.846.025,13

Sumber : Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019

Adapun penjelasan atas perubahan ekuitas tahun 2019 adalah sebagai berikut

- 1) Saldo awal ekuitas sebesar Rp1.088.403.675.232,84 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2018.
- 2) Suplus/defisit – LO sebesar Rp27.834.007.567,36 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2019.
- 3) Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp814.729.948,82 diperoleh dari penambahan nilai persediaan yang bukan diperoleh dari pembelian tahun 2019 (koreksi saldo awal persediaan) sebesar Rp942.295.807,70 dan pengurangan yang disebabkan oleh adanya persediaan yang telah rusak/expired sebesar Rp127.565.858,88.
- 4) Koreksi ekuitas lainnya sebesar minus Rp650.566.723,89 merupakan koreksi atas penambahan/pengurangan kas, aset tetap, dan utang, selama tahun 2019. Adapun mutasi penambahan/pengurangan koreksi ekuitas lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Mutasi penambahan terdiri dari:

- Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp634.283.789,14 diperoleh dari penambahan koreksi ekuitas lainnya atas penyesuaian aset lainnya tuntutan ganti rugi LHP BPK tahun 2018 sebesar Rp1.307.942.726,51 dan pengurangan atas penyesuaian penyeteroran tuntutan ganti rugi tahun 2019 sebesar Rp673.658.937,37.
- Koreksi ekuitas utang beban sebesar Rp9.439.700,00, merupakan koreksi utang beban pajak kendaraan bermotor tahun 2018.
- Koreksi ekuitas utang jangka pendek lainnya sebesar Rp3.925.000,00 yang merupakan koreksi utang pengadaan aset tetap yang disebabkan kesalahan pengisian nilai kontrak yang digabungkan dengan honorarium pengadaan barang dan jasa pekerjaan peningkatan jalan desa Tabilaa Hot Mix TA 2016.

Mutasi pengurangan terdiri dari:

- Koreksi ekuitas kas tahun berjalan sebesar Rp10.273.456,00 terdiri dari koreksi ekuitas atas sisa dana bantuan pemerintah yang tidak dipergunakan dan dikembalikan ke kas Negara sebesar Rp9.714.150,00, koreksi ekuitas atas pengenaan biaya administrasi dan penutupan kas rekening tabungan dana BOS tahun 2019 sebesar Rp509.306,00, serta koreksi ekuitas atas sisa dana bantuan

pemerintah kegiatan Bimbingan Teknis Bindikel sebesar Rp50.000,00 yang akan dikembalikan kepada Kementerian Pendidikan.

- Koreksi ekuitas kas saldo awal sebesar Rp1.571.040,00 yang diperoleh dari pengurangan saldo awal kas atas pengenaan biaya administrasi bank rekening tabungan dana BOS tahun 2018 sebesar Rp1.579.822,00 dan penambahan saldo awal kas atas penerimaan jasa giro rekening tabungan dan lain-lain pendapatan tahun 2018 sebesar Rp8.782,00.
  - Koreksi ekuitas beban sebesar Rp17.100.000,00 yang merupakan koreksi ke beban hibah atas jasa konsultasi perencanaan pembuatan tempat parkir objek wisata pantai modisi tahun 2018 sebesar Rp12.000.000,00 dan perencanaan pemasangan lampu taman pantai modisi tahun 2018 sebesar Rp5.100.000,00 yang tidak dicatat sebagai hutang.
  - Koreksi ekuitas aset tetap sebesar Rp1.269.270.717,03 terdiri dari koreksi penambahan berupa hibah aset tetap mobil perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp232.950.000,00, koreksi saldo awal penyusutan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp38.957.314,00, penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin yang dihapuskan TA 2019 sebesar Rp3.421.041.930,50, dan penyesuaian beban penyusutan aset tetap peralatan dan mesin yang dihapuskan TA 2019 sebesar Rp2.497.500,00, serta koreksi pengurangan berupa penghapusan aset berdasarkan SK Penghapusan Nomor 142 Tahun 2019 sebesar Rp3.487.867.542,00, penghapusan aset berdasarkan SK Nomor 418 tahun 2018 yang baru dibukukan di tahun 2019 sebesar Rp507.599.950,00, koreksi atas uang muka pekerjaan pemasangan lampu hias alun-alun Ibu kota Molibagu TA 2017 yang dicatat KDP namun kontrak dan pelaksanaan pekerjaannya di TA 2019 menggunakan bahan-bahan dari KDP sebesar Rp116.357.400,00, koreksi saldo awal penyusutan aset tetap peralatan mesin sebesar Rp78.672.442,53 dan koreksi saldo awal penyusutan aset tetap lainnya sebesar Rp774.220.127,00.
- 5) Ekuitas akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.116.401.846.025,13. Jika dibandingkan dengan jumlah ekuitas tahun sebelumnya, maka tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah ekuitas sebesar Rp27.998.170.792,29 yang diperoleh dari surplus kegiatan operasi, koreksi nilai persediaan dan koreksi ekuitas lainnya tahun 2019. Saldo akhir Ekuitas tersebut sudah sesuai dengan Ekuitas yang tercatat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan per 31 Desember 2019.